

The background of the cover features a dark blue world map with a grid overlay. In the lower right quadrant, there is a faint financial candlestick chart with a white line graph trending upwards. Two numerical values, '642,55' and '75,06', are visible on the chart.

AKUNTANSI INTERNASIONAL

Dr. Haeruddin DML, S.E.,M.M.

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar yang berjudul “**Akuntansi Internasional: Konsep, Konvergensi, dan Aplikasi IFRS–PSAK**”. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi komprehensif bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan peneliti dalam memahami dinamika standar akuntansi global yang terus berkembang pesat seiring globalisasi dan integrasi pasar keuangan dunia.

Buku ini disusun secara sistematis berdasarkan **Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome-Based Education (OBE)**, yang mengintegrasikan capaian pembelajaran mata kuliah dengan kompetensi lulusan program studi D4 Akuntansi Keuangan Publik. Dengan cakupan materi dari **Bab 1 hingga Bab 14**, buku ini menguraikan topik-topik penting mulai dari konsep dasar akuntansi internasional, konvergensi IFRS–PSAK, translasi mata uang asing, konsolidasi lintas negara, pengakuan pendapatan, akuntansi sewa, instrumen keuangan, pajak penghasilan internasional, pelaporan segmen operasi, tata kelola lintas batas, hingga isu terkini mengenai pelaporan keberlanjutan (ISSB, ESG).

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan **komprehensif dan aplikatif**, dengan menyajikan:

1. Penjelasan teori yang dilengkapi referensi terbaru (2020–2025).
2. Perbandingan langsung antara **IFRS dan PSAK** untuk topik-topik utama.
3. **Studi kasus perusahaan multinasional** sebagai ilustrasi nyata.
4. **Latihan soal esai dan numerik** untuk UTS dan UAS.
5. **Glosarium, indeks, tabel komparatif, dan lampiran** sebagai alat bantu belajar.

Kami menyadari bahwa dunia akuntansi internasional terus mengalami perubahan, terutama dengan hadirnya **International Sustainability Standards Board (ISSB)** yang memperluas cakupan pelaporan keuangan menuju integrasi ESG. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai pegangan akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi mahasiswa untuk memahami arah pengembangan akuntansi global di era 2025–2030.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada **Politeknik Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar**, rekan dosen, mahasiswa, serta para praktisi dan akademisi yang telah memberikan masukan berharga selama proses penulisan buku ini. Tidak lupa, apresiasi kami tujukan kepada keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu akuntansi, memperkaya literatur akademik, serta meningkatkan kompetensi generasi muda akuntan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Makassar, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN AKUNTANSI INTERNASIONAL	1
A. Konsep dasar akuntansi internasional.....	1
B. Faktor institusional: budaya, hukum, pasar modal	3
C. Peran lembaga global: IASB, IFAC, IOSCO	4
D. Sejarah konvergensi akuntansi internasional.....	6
E. Hubungan dengan akuntansi Indonesia (PSAK)	7
BAB II KERANGKA IFRS DAN KONVERGENSI PSAK	12
A. Konsep dan Kerangka Dasar IFRS	12
B. Proses Adopsi dan Konvergensi IFRS di Indonesia	13
C. Perbandingan IFRS dengan PSAK (2020–2025)	15
D. Tantangan Implementasi IFRS di Indonesia.....	17
E. Manfaat Konvergensi IFRS terhadap Pelaporan Keuangan	18
BAB III TRANSLASI MATA UANG ASING.....	23
A. Konsep mata uang fungsional.....	23
B. Kurs, selisih kurs, translasi laporan	24
C. Metode translasi: current rate & temporal	26
D. Penyajian laporan keuangan lintas mata uang	27
E. Latihan kasus numerik translasi.....	28
BAB IV KOMBINASI BISNIS LINTAS NEGARA.....	33
A. Konsep IFRS 3 & PSAK 22	33
B. Pengakuan goodwill, NCI, dan fair value.....	34
C. Perbedaan IFRS vs PSAK dalam kombinasi bisnis.....	35
D. Pengungkapan dan implikasi laporan tahunan	36
E. Studi kasus perusahaan multinasional	38
BAB V KONSOLIDASI LINTAS NEGARA.....	42
A. IFRS 10–12 vs PSAK 65–67	42
B. Kontrol, joint arrangement, dan asosiasi	43
C. Penyusunan working paper konsolidasi.....	44

D.	Rekonsiliasi laporan entitas induk dan anak	45
E.	Latihan kasus numerik konsolidasi sederhana	46
BAB VI PENDAPATAN DALAM AKUNTANSI INTERNASIONAL		50
A.	IFRS 15 vs PSAK 72	50
B.	Kontrak multi-elemen lintas yurisdiksi	51
C.	Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan	52
D.	Dampak IFRS 15 terhadap kinerja perusahaan	53
E.	Studi kasus pendapatan kontrak jangka panjang	54
BAB VII AKUNTANSI SEWA DALAM KONTEKS GLOBAL		58
A.	IFRS 16 vs PSAK 73	58
B.	Lessee dan lessor accounting	59
C.	Kapitalisasi sewa dan dampaknya pada leverage	60
D.	Pengungkapan laporan tahunan perusahaan global	61
E.	Latihan analisis dampak sewa dengan Excel	62
BAB VIII INSTRUMEN KEUANGAN		66
A.	IFRS 9, IFRS 7 vs PSAK 71, PSAK 60	66
B.	Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan	67
C.	Expected Credit Loss (ECL) dan impairment	68
D.	Hedging dan pengungkapan	69
E.	Studi kasus perbankan internasional	70
BAB IX PAJAK PENGHASILAN INTERNASIONAL		74
BAB X PELAPORAN SEGMENT OPERASI		82
A.	IFRS 8 vs PSAK terkait	82
B.	Identifikasi segmen operasi dan pelaporan geografis	83
C.	Analisis kinerja segmen perusahaan multinasional	84
D.	Penyajian dashboard segmen (Excel/BI)	85
E.	Studi kasus laporan segmen perusahaan global	85
BAB XI TATA KELOLA & AUDIT LINTAS BATAS		89
A.	Regulasi dan governance di berbagai yurisdiksi	89
B.	Peran auditor global network	90
C.	Kualitas laporan keuangan lintas batas	90
D.	Isu integritas & independensi audit	91
E.	Debat dan studi kasus audit lintas negara	92

BAB XII PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL (ISSB)	95
A. IFRS S1 & IFRS S2	95
B. ESG (Environmental, Social, Governance) dalam akuntansi	96
C. Keterkaitan pelaporan keuangan & non-keuangan	96
D. Peran POJK & regulasi lokal di Indonesia	97
E. Studi kasus perusahaan multinasional & sustainability reporting	98
BAB XIII PROYEK KOMPARATIF IFRS–PSAK	101
A. Cara menyusun policy memo IFRS–PSAK	101
B. Analisis gap per topik (sewa, instrumen keuangan, pendapatan, dll.)	102
C. Teknik presentasi akademik dan profesional	102
D. Peer review & kolaborasi dalam tim	103
E. Studi kasus proyek mahasiswa	104
BAB XIV REVIEW AKHIR DAN UJIAN	107
A. Ringkasan capaian CPMK 1–6	107
B. Integrasi konsep IFRS–PSAK	108
C. Latihan soal UTS & UAS (contoh soal esai dan numerik)	108
D. Refleksi pembelajaran berbasis OBE	109
E. Arah pengembangan akuntansi internasional 2025–2030	109
GLOSARIUM	111
INDEKS	114
LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi internasional.
2. Mahasiswa memahami faktor institusional (budaya, hukum, pasar modal) yang memengaruhi praktik akuntansi.
3. Mahasiswa mengenal lembaga global (IASB, IFAC, IOSCO) dan perannya dalam standarisasi.
4. Mahasiswa mampu menilai relevansi akuntansi internasional terhadap perkembangan PSAK di Indonesia.

A. Konsep dasar akuntansi internasional

Akuntansi internasional merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada praktik, standar, dan laporan keuangan dalam konteks lintas negara, sehingga mencakup perbedaan regulasi, mata uang, serta sistem hukum yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan. Menurut Nobes & Parker (2020), akuntansi internasional tidak hanya mengkaji standar IFRS, tetapi juga membandingkan praktik akuntansi antarnegara. Konsep ini menekankan harmonisasi, konvergensi, serta keberagaman yang ada pada sistem pelaporan global. Hal ini sangat relevan di era globalisasi ketika perusahaan multinasional semakin berkembang. Dengan demikian, akuntansi internasional menjadi fondasi utama dalam memahami dinamika keuangan global.

Definisi akuntansi internasional mencakup penggunaan standar akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang beroperasi di lebih dari satu negara, seperti perusahaan multinasional (MNEs). Dougnik dan Perera (2021) menyebutkan bahwa akuntansi internasional mengatur aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang sesuai dengan kebutuhan global investor. Selain itu, akuntansi internasional membahas isu translasi mata uang asing, transfer pricing, pelaporan segmen, serta praktik audit lintas negara. Akuntansi internasional pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan internasional.

Salah satu ciri khas akuntansi internasional adalah adanya **diversity of practices** antarnegara. Misalnya, negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki sistem berbasis pasar, sementara negara civil law seperti Jerman dan Jepang lebih menekankan pada kepentingan kreditor (Nobes, 2020). Keberagaman tersebut menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi global. International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi upaya utama dalam mengurangi perbedaan antarnegara. Oleh karena itu, akuntansi internasional bukan hanya membahas teknik pencatatan, melainkan juga mencakup aspek hukum, ekonomi, dan budaya.

Perusahaan multinasional membutuhkan akuntansi internasional untuk menyusun laporan konsolidasi yang mencerminkan operasi global. IFRS telah menjadi acuan internasional dalam mengatasi kendala perbedaan standar nasional. Dengan IFRS, laporan keuangan perusahaan dapat dipahami oleh investor lintas negara, sehingga meningkatkan transparansi dan komparabilitas (IFRS Foundation, 2023). Konsep dasar akuntansi

internasional ini sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi yang ingin memahami dinamika bisnis global. Akuntansi internasional juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap kualitas informasi yang disajikan.

Akuntansi internasional juga berkaitan dengan tata kelola perusahaan global. Menurut Nobes & Stadler (2022), kualitas pelaporan keuangan berhubungan erat dengan efektivitas tata kelola perusahaan. Akuntansi internasional membantu menjaga kredibilitas perusahaan, terutama dalam era pasar modal global yang saling terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep akuntansi internasional tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, memahami akuntansi internasional berarti memahami pula keterkaitannya dengan governance global.

Dalam konteks akademis, akuntansi internasional merupakan disiplin yang terus berkembang mengikuti perubahan standar, regulasi, dan praktik global. IFRS Foundation (2024) menegaskan bahwa pembaruan IFRS mencerminkan kebutuhan pasar yang dinamis, misalnya pada isu keberlanjutan (sustainability reporting). Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi internasional bersifat adaptif dan progresif. Konsep dasar akuntansi internasional tidak lagi sebatas laporan keuangan tradisional, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan demikian, cakupan akuntansi internasional semakin luas.

Akuntansi internasional juga menjadi bidang studi yang krusial bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Adopsi IFRS ke dalam PSAK memperlihatkan pentingnya standardisasi agar laporan keuangan Indonesia dapat diterima di pasar global (IAI, 2022). Konsep dasar ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa vokasi, karena mereka harus siap menghadapi dinamika akuntansi di sektor publik maupun swasta yang terhubung dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pembelajaran akuntansi internasional perlu diarahkan pada pemahaman praktis sekaligus teoretis.

Salah satu aspek fundamental akuntansi internasional adalah **comparative accounting**, yaitu membandingkan praktik akuntansi antarnegara. Hal ini membantu mahasiswa memahami mengapa laporan keuangan Jepang berbeda dari AS, atau mengapa IFRS lebih banyak digunakan di Eropa daripada di Amerika. Nobes & Parker (2020) menekankan bahwa perbedaan ini dipengaruhi faktor budaya, politik, dan institusional. Pemahaman comparative accounting menjadi dasar untuk menganalisis kesenjangan standar global. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengembangkan pemikiran kritis.

Selain itu, akuntansi internasional juga berperan dalam perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan integrasi pasar modal. Investor membutuhkan laporan keuangan yang konsisten agar dapat mengambil keputusan yang tepat. IFRS sebagai bahasa akuntansi global menyediakan kerangka untuk memenuhi kebutuhan ini (IFRS Foundation, 2023). Akuntansi internasional membantu mengurangi **information asymmetry** antarnegara, sehingga meningkatkan efisiensi pasar modal global. Oleh sebab itu, konsep dasar akuntansi internasional sangat penting dalam praktik bisnis kontemporer.

Dengan demikian, konsep dasar akuntansi internasional dapat dirangkum sebagai suatu bidang yang mencakup praktik akuntansi lintas negara, harmonisasi standar global, dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi. Fokusnya tidak hanya pada angka-angka, tetapi juga mencakup tata kelola, regulasi, dan keberlanjutan. Akuntansi internasional membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan global sehingga dapat dipercaya oleh pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, mempelajari akuntansi internasional adalah kebutuhan mendesak di era globalisasi ekonomi (Doupnik & Perera, 2021; IFRS Foundation, 2024).

B. Faktor institusional: budaya, hukum, pasar modal

Akuntansi internasional sangat dipengaruhi oleh faktor institusional yang membentuk praktik pelaporan di setiap negara. Budaya, sistem hukum, dan struktur pasar modal adalah tiga elemen penting yang memengaruhi perbedaan standar akuntansi global. Menurut Gray (2020), budaya memengaruhi sikap terhadap transparansi, konservatisme, dan fleksibilitas pelaporan. Sementara itu, hukum menentukan otoritas regulasi, dan pasar modal mengarahkan kebutuhan pengungkapan informasi. Kombinasi ketiganya menjelaskan mengapa praktik akuntansi berbeda antarnegara meskipun ada harmonisasi melalui IFRS.

Faktor budaya sering menjadi penentu utama dalam bagaimana informasi akuntansi diproses dan disajikan. Hofstede (2021) menjelaskan dimensi budaya seperti individualisme vs kolektivisme, jarak kekuasaan, dan ketidakpastian yang dihindari, dapat memengaruhi cara perusahaan menyajikan laporan keuangan. Misalnya, negara dengan budaya konservatif cenderung menunda pengakuan pendapatan dan lebih hati-hati dalam estimasi. Sebaliknya, budaya yang lebih terbuka dan agresif cenderung cepat mengakui pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya masyarakatnya.

Dalam konteks hukum, perbedaan antara sistem **common law** dan **civil law** memengaruhi regulasi akuntansi. Menurut Nobes (2020), negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat dan Inggris menekankan pada pelaporan berbasis pasar modal. Sebaliknya, negara civil law seperti Prancis, Jerman, dan Jepang menekankan kepentingan kreditor serta perpajakan. Hal ini berdampak pada fokus pelaporan: apakah untuk investor atau kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, sistem hukum membentuk kerangka regulasi yang memengaruhi isi laporan keuangan.

Pasar modal juga menjadi faktor penentu dalam perkembangan standar akuntansi. Menurut Nobes & Stadler (2022), negara dengan pasar modal maju cenderung menuntut pelaporan yang lebih transparan dan detail karena kebutuhan investor yang besar. Sebaliknya, negara dengan pasar modal terbatas cenderung memiliki standar akuntansi yang lebih sederhana dan lebih dipengaruhi oleh pemerintah atau kreditor. Hal ini menjelaskan mengapa IFRS lebih cepat diterapkan di Eropa dibandingkan di negara-negara berkembang yang pasar modalnya masih kecil.

Di negara berkembang, ketiga faktor ini saling berinteraksi secara kompleks. Indonesia misalnya, dengan budaya kolektif, sistem hukum civil law, dan pasar modal yang sedang berkembang, menghadapi tantangan dalam penerapan IFRS. Menurut IAI (2022), meskipun Indonesia sudah mengadopsi IFRS dalam PSAK, praktiknya masih dipengaruhi oleh kepentingan fiskal dan kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor institusional tidak bisa diabaikan dalam memahami akuntansi internasional, karena mereka memengaruhi tingkat harmonisasi dengan standar global.

Budaya juga memengaruhi aspek tata kelola perusahaan. Menurut penelitian Alsaadi & Elnahass (2023), negara dengan budaya yang menekankan kolektivitas cenderung memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan yang berbeda dibandingkan negara individualis.

Misalnya, di Asia, perusahaan lebih berhati-hati dalam membuka informasi sensitif dibandingkan perusahaan di Amerika. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan lintas negara. Oleh karena itu, faktor budaya harus dipahami sebagai elemen kunci dalam akuntansi internasional.

Sistem hukum memiliki peran dalam menentukan siapa yang menjadi pengendali standar akuntansi. Di negara common law, standar akuntansi biasanya ditetapkan oleh badan independen seperti FASB atau IASB, sementara di negara civil law seringkali ditentukan pemerintah. Menurut Nobes (2020), perbedaan ini memengaruhi orientasi pelaporan: berbasis prinsip (principle-based) di common law, berbasis aturan (rule-based) di civil law. Hal ini menimbulkan perbedaan fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi internasional.

Pasar modal menuntut transparansi yang lebih tinggi, terutama setelah krisis keuangan global. Menurut IFRS Foundation (2023), investor global semakin menuntut pengungkapan berbasis IFRS agar laporan keuangan dapat dibandingkan antarnegara. Perusahaan multinasional yang terdaftar di beberapa bursa efek internasional tidak bisa hanya menggunakan standar lokal, melainkan harus menyajikan laporan keuangan sesuai IFRS. Hal ini mendorong negara-negara untuk menyesuaikan standar mereka dengan IFRS.

Ketiga faktor institusional ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, perusahaan di negara civil law yang dominan fiskal seringkali kesulitan mengadopsi IFRS yang berorientasi pada investor. Penelitian Choi & Meek (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi IFRS sangat bergantung pada keselarasan antara budaya, hukum, dan pasar modal di suatu negara. Jika salah satu faktor menolak, maka implementasi IFRS hanya sebatas formalitas. Oleh sebab itu, pemahaman institusional sangat penting bagi para akuntan internasional.

Dengan demikian, faktor budaya, hukum, dan pasar modal berperan besar dalam membentuk praktik akuntansi internasional. Meskipun IFRS berusaha menyatukan standar global, kenyataannya perbedaan institusional tetap menjadi penghalang. Pemahaman tentang faktor ini membantu mahasiswa dan praktisi akuntansi internasional dalam menganalisis mengapa harmonisasi penuh sulit tercapai. Kesadaran akan faktor institusional juga membantu dalam merancang kebijakan akuntansi yang sesuai dengan konteks lokal tanpa mengabaikan kebutuhan global (Nobes, 2020; IFRS Foundation, 2023).

C. Peran lembaga global: IASB, IFAC, IOSCO

International Accounting Standards Board (IASB) merupakan lembaga utama yang berperan dalam penyusunan dan pengembangan International Financial Reporting Standards (IFRS). IASB dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan global yang dapat dibandingkan lintas negara. Menurut IFRS Foundation (2023), IASB bekerja secara independen namun memiliki dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, akademisi, regulator, dan perusahaan multinasional. Peran IASB sangat penting dalam menciptakan keseragaman standar akuntansi internasional yang diakui luas.

Selain IASB, International Federation of Accountants (IFAC) juga memiliki peranan penting dalam akuntansi internasional. IFAC berfungsi sebagai organisasi profesi global yang menaungi akuntan di seluruh dunia. Menurut IFAC (2021), organisasi ini memiliki misi

untuk memperkuat profesi akuntan melalui penerapan standar etika, auditing, akuntansi manajemen, dan pendidikan. IFAC tidak hanya mendorong harmonisasi standar, tetapi juga meningkatkan kapasitas profesional akuntan agar siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, IFAC menjadi payung profesi yang memperluas penerapan akuntansi internasional.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. IOSCO berfokus pada pengaturan pasar modal global agar transparan, adil, dan efisien. Menurut IOSCO (2022), lembaga ini mendorong penggunaan IFRS sebagai standar global yang dapat mendukung integritas pasar modal. Peran IOSCO sangat krusial karena pasar modal merupakan pengguna utama laporan keuangan. Dengan dukungan IOSCO, investor lintas negara lebih percaya diri dalam mengambil keputusan berbasis laporan keuangan global.

IASB berperan sebagai penyusun standar, sedangkan IFAC sebagai penjaga etika dan profesionalisme, serta IOSCO sebagai regulator pasar modal. Menurut Nobes & Parker (2020), hubungan ketiganya mencerminkan sinergi antara standar teknis, etika profesi, dan kepentingan pasar. Tanpa keterlibatan ketiga lembaga ini, harmonisasi akuntansi global akan sulit tercapai. Dengan kata lain, IASB, IFAC, dan IOSCO membentuk pilar penting dalam tata kelola akuntansi internasional yang berkelanjutan.

IASB juga aktif melakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan standar. Menurut IFRS Foundation (2024), proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi, untuk memastikan standar yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan di berbagai negara. Misalnya, penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 terkait pelaporan keberlanjutan menunjukkan bahwa IASB beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang menuntut akuntabilitas lingkungan. Hal ini memperluas cakupan akuntansi internasional dari sekadar laporan keuangan ke arah sustainability reporting.

IFAC berkontribusi melalui penyusunan International Standards on Auditing (ISA) dan kode etik profesional akuntan. Menurut IFAC (2022), standar ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS dapat diaudit secara konsisten di seluruh dunia. IFAC juga mendorong pendidikan berkelanjutan bagi akuntan agar profesionalisme tetap terjaga. Dengan demikian, peran IFAC bukan hanya pada tataran normatif, tetapi juga praktis dalam meningkatkan kualitas akuntan di berbagai negara.

IOSCO, di sisi lain, lebih menekankan pada kepercayaan investor. Menurut penelitian Brown & Tarca (2021), dukungan IOSCO terhadap IFRS mempercepat adopsi standar ini di pasar modal internasional. Investor global lebih yakin ketika laporan keuangan disajikan berdasarkan standar yang konsisten dan diaudit dengan standar yang diakui secara internasional. Dengan begitu, IOSCO berperan dalam memperkuat legitimasi IFRS sebagai “bahasa akuntansi global”.

Kolaborasi antara IASB, IFAC, dan IOSCO semakin terlihat dalam menghadapi isu-isu baru, seperti digitalisasi laporan keuangan dan sustainability reporting. Menurut IFRS Foundation (2023), ketiga lembaga ini bekerja sama dalam mengembangkan XBRL untuk pelaporan digital serta standar pelaporan keberlanjutan yang relevan dengan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga global tidak hanya menjaga status quo, tetapi juga berinovasi untuk menjawab tantangan baru. Peran mereka sangat strategis bagi masa depan akuntansi internasional.

Meski demikian, peran ketiga lembaga ini tidak terlepas dari kritik. Beberapa negara menilai bahwa standar IFRS terlalu berorientasi pada negara maju dan belum sepenuhnya memperhatikan kondisi negara berkembang (Chand & Patel, 2022). Kritik ini menegaskan perlunya dialog yang lebih inklusif antara IASB, IFAC, IOSCO, dan negara-negara pengguna standar. Dengan cara ini, standar global tidak hanya mencerminkan kebutuhan pasar modal besar, tetapi juga relevan untuk perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, IASB, IFAC, dan IOSCO memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem akuntansi internasional yang harmonis, etis, dan transparan. IASB menyusun standar, IFAC menjaga etika profesi dan kualitas audit, sementara IOSCO melindungi kepentingan investor melalui regulasi pasar modal. Sinergi mereka menciptakan fondasi kuat bagi pelaporan keuangan global yang kredibel. Oleh karena itu, mahasiswa akuntansi internasional perlu memahami peran ketiga lembaga ini sebagai pilar utama akuntansi global (IFRS Foundation, 2023; IFAC, 2022; IOSCO, 2022).

D. Sejarah konvergensi akuntansi internasional

Konvergensi akuntansi internasional adalah proses harmonisasi standar akuntansi nasional dengan standar global yang dipelopori oleh International Accounting Standards Board (IASB). Sejarahanya dimulai sejak 1973 dengan berdirinya International Accounting Standards Committee (IASC) yang kemudian berkembang menjadi IASB pada 2001 (Nobes & Parker, 2020). Proses ini ditujukan untuk mengurangi perbedaan pelaporan antarnegara sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dibandingkan. Pada era globalisasi, konvergensi menjadi semakin penting untuk mendukung integrasi pasar modal internasional.

Konsep konvergensi berkembang pesat sejak 2002 melalui perjanjian **Norwalk Agreement** antara IASB dan Financial Accounting Standards Board (FASB) Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan standar yang berkualitas tinggi dan dapat digunakan secara global (Brown & Tarca, 2021). Sejak saat itu, IFRS menjadi acuan utama di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bahkan Uni Eropa mewajibkan seluruh perusahaan terdaftar di bursa untuk menggunakan IFRS sejak 2005. Hal ini menandai tonggak penting dalam sejarah konvergensi.

Di Asia, adopsi IFRS berlangsung bertahap. Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Indonesia memiliki pendekatan berbeda terhadap konvergensi. Menurut Chand & Patel (2022), beberapa negara memilih adopsi penuh, sementara yang lain melakukan modifikasi sesuai kondisi domestik. Indonesia, misalnya, melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menerapkan strategi adopsi gradual IFRS ke dalam PSAK sejak 2012. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah konvergensi tidak seragam, melainkan dipengaruhi faktor lokal.

Proses konvergensi juga dipengaruhi oleh krisis keuangan global 2008. Krisis tersebut menyoroti pentingnya transparansi laporan keuangan yang konsisten antarnegara. IFRS Foundation (2020) menyatakan bahwa setelah krisis, semakin banyak negara mempercepat adopsi IFRS untuk meningkatkan kepercayaan investor. Misalnya, Korea Selatan mengadopsi IFRS penuh pada 2011, sementara Brasil menerapkannya pada 2010. Peristiwa ini memperkuat argumen bahwa standar global diperlukan untuk stabilitas pasar keuangan internasional.

Perkembangan penting lainnya adalah munculnya standar baru yang memperkuat harmonisasi global. Misalnya, IFRS 15 tentang pendapatan, IFRS 16 tentang sewa, dan IFRS

9 tentang instrumen keuangan. Menurut IFRS Foundation (2023), standar-standar ini dikembangkan melalui konsultasi global dan menjadi simbol nyata konvergensi. Negara-negara yang mengadopsi IFRS otomatis menyesuaikan standar nasional mereka dengan standar internasional. Hal ini mempercepat proses konvergensi lintas yurisdiksi.

Namun, konvergensi tidak berjalan mulus. Amerika Serikat hingga kini masih menggunakan US GAAP, meskipun SEC mengizinkan perusahaan asing menggunakan IFRS tanpa rekonsiliasi sejak 2007 (Brown & Tarca, 2021). Hal ini menciptakan dualisme antara IFRS dan US GAAP. Meski demikian, banyak pihak berpendapat bahwa perbedaan semakin menyempit berkat proyek konvergensi bersama IASB dan FASB. Dengan kata lain, konvergensi masih merupakan perjalanan panjang, bukan tujuan akhir.

Negara berkembang menghadapi tantangan lebih besar dalam konvergensi. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia, biaya implementasi, serta ketidaksesuaian antara IFRS dengan regulasi fiskal lokal. Indonesia, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan IFRS dengan sistem perpajakan yang berbasis civil law. Kendala ini menunjukkan bahwa sejarah konvergensi tidak hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga hambatan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa konvergensi juga meluas ke ranah pelaporan keberlanjutan. IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standards Board (ISSB) pada 2021 untuk mengembangkan IFRS S1 dan IFRS S2 (IFRS Foundation, 2023). Hal ini menandai babak baru dalam sejarah konvergensi, di mana akuntansi tidak lagi terbatas pada laporan keuangan tradisional, tetapi juga mencakup isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan demikian, sejarah konvergensi semakin relevan dengan agenda global sustainability.

Konvergensi juga menciptakan dampak positif terhadap kualitas laba dan relevansi nilai laporan keuangan. Menurut penelitian Ahmed & Neel (2022), perusahaan yang menggunakan IFRS cenderung memiliki laporan yang lebih relevan dan dapat dibandingkan. Investor internasional lebih percaya pada perusahaan yang menerapkan IFRS dibandingkan dengan standar lokal yang kurang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah konvergensi membawa manfaat nyata bagi pasar modal global dan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, sejarah konvergensi akuntansi internasional mencerminkan perjalanan panjang harmonisasi standar global. Dimulai dari pembentukan IASC, berkembang melalui Norwalk Agreement, adopsi oleh Uni Eropa, hingga pembentukan ISSB, konvergensi menunjukkan evolusi yang dinamis. Meski menghadapi tantangan, konvergensi tetap menjadi agenda utama akuntansi global karena mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu memahami sejarah ini sebagai fondasi untuk menganalisis dinamika akuntansi internasional di masa depan (IFRS Foundation, 2023; Brown & Tarca, 2021).

E. Hubungan dengan akuntansi Indonesia (PSAK)

Akuntansi Indonesia memiliki hubungan erat dengan perkembangan akuntansi internasional, khususnya melalui konvergensi IFRS ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sejak 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) resmi mengadopsi IFRS

secara bertahap, sehingga PSAK kini semakin selaras dengan standar global (IAI, 2022). Hubungan ini penting karena memungkinkan laporan keuangan Indonesia dapat dipahami oleh investor internasional, meningkatkan daya saing perusahaan nasional di pasar modal global.

Proses konvergensi IFRS ke PSAK dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi domestik. Menurut IAI (2023), Indonesia memilih pendekatan adopsi penuh (full adoption) dengan jeda waktu sekitar 1–2 tahun setelah IFRS diterbitkan. Strategi ini memberi ruang adaptasi bagi perusahaan dan regulator lokal. Dengan demikian, PSAK bukan hanya cerminan IFRS, tetapi juga penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi, hukum, dan budaya Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kompromi antara standar global dan kepentingan nasional.

Penerapan IFRS ke dalam PSAK membawa dampak besar pada praktik akuntansi perusahaan di Indonesia. Misalnya, penerapan PSAK 72 tentang pendapatan, PSAK 71 tentang instrumen keuangan, dan PSAK 73 tentang sewa merupakan hasil adopsi langsung dari IFRS 15, IFRS 9, dan IFRS 16. Menurut Sari & Utama (2021), penerapan standar ini meningkatkan transparansi laporan keuangan namun juga menambah kompleksitas akuntansi. Oleh sebab itu, hubungan IFRS dengan PSAK adalah bentuk keseimbangan antara transparansi dan tantangan praktis.

PSAK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem keuangan global. Menurut penelitian Darmawan & Putri (2022), perusahaan Indonesia yang menggunakan PSAK berbasis IFRS lebih mudah mendapatkan akses pendanaan dari investor asing. Hal ini karena laporan keuangan mereka dapat dibandingkan dengan perusahaan multinasional di negara lain. Dengan kata lain, hubungan PSAK dan IFRS membantu membuka peluang pembiayaan internasional bagi perusahaan Indonesia.

Namun, penerapan PSAK berbasis IFRS juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami standar yang kompleks. Menurut Gunawan et al. (2020), banyak akuntan di Indonesia masih memerlukan pelatihan intensif untuk menerapkan PSAK berbasis IFRS. Hambatan lain adalah perbedaan kepentingan fiskal, karena regulasi pajak di Indonesia masih menggunakan aturan yang berbeda dengan prinsip akuntansi. Hal ini menciptakan dualisme antara laporan komersial dan laporan pajak.

Meskipun ada hambatan, harmonisasi PSAK dengan IFRS memberikan keuntungan strategis. Menurut IAI (2022), adopsi IFRS dalam PSAK meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Indonesia di mata investor global. Selain itu, perusahaan Indonesia yang terdaftar di bursa efek lebih mudah melakukan cross-listing di pasar modal luar negeri. Hal ini memperluas kesempatan bagi perusahaan untuk menarik modal asing. Dengan demikian, hubungan PSAK dan IFRS menciptakan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia.

Selain aspek teknis, hubungan PSAK dengan IFRS juga mencerminkan dinamika politik ekonomi. Menurut Chand & Patel (2022), adopsi IFRS oleh negara berkembang seperti Indonesia seringkali dipengaruhi oleh tekanan global, baik dari lembaga keuangan internasional maupun investor asing. Dengan demikian, konvergensi bukan sekadar pilihan teknis, melainkan juga strategi politik untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi tidak lepas dari konteks geopolitik.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa PSAK juga mulai menyesuaikan diri dengan agenda keberlanjutan. IAI (2024) melaporkan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan adopsi standar pelaporan keberlanjutan berbasis IFRS Sustainability Standards (IFRS S1 dan S2). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan PSAK dan IFRS tidak hanya pada laporan keuangan tradisional, tetapi juga pada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan demikian, cakupan hubungan ini semakin luas dan relevan di era modern.

Hubungan PSAK dengan IFRS juga berdampak pada pendidikan akuntansi di Indonesia. Perguruan tinggi mulai menyesuaikan kurikulum untuk memasukkan mata kuliah akuntansi internasional berbasis IFRS. Menurut Putra (2023), mahasiswa akuntansi harus dibekali kemampuan memahami IFRS agar siap menghadapi tantangan global. Hal ini menegaskan bahwa hubungan PSAK dan IFRS tidak hanya memengaruhi praktik bisnis, tetapi juga pendidikan vokasi dan profesionalisme akuntan di Indonesia.

Dengan demikian, hubungan PSAK dan IFRS adalah bagian integral dari perjalanan akuntansi Indonesia menuju standar global. Meskipun masih menghadapi tantangan, konvergensi ini telah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Hubungan ini menunjukkan bahwa akuntansi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan global, melainkan harus terus beradaptasi dengan dinamika internasional (IAI, 2022; IAI, 2024).

Rangkuman Bab I – Pendahuluan Akuntansi Internasional

Bab I membahas dasar-dasar akuntansi internasional dengan menekankan pentingnya standar akuntansi global yang harmonis di era globalisasi. Konsep dasar akuntansi internasional menjelaskan bahwa praktik akuntansi lintas negara dipengaruhi oleh faktor budaya, sistem hukum, dan pasar modal. Ketiga faktor institusional ini menjadi penentu keragaman standar akuntansi global sekaligus tantangan dalam konvergensi menuju IFRS.

Selain itu, peran lembaga global seperti **IASB**, **IFAC**, dan **IOSCO** sangat sentral dalam menciptakan kerangka akuntansi internasional yang transparan, etis, dan kredibel. IASB menyusun standar IFRS, IFAC menjaga etika profesi dan kualitas audit, sementara IOSCO mendukung perlindungan investor dan integritas pasar modal.

Sejarah konvergensi menunjukkan evolusi panjang dari berdirinya IASC, Norwalk Agreement, adopsi IFRS di Uni Eropa, hingga pembentukan ISSB pada 2021. Proses ini menegaskan bahwa harmonisasi akuntansi global merupakan perjalanan dinamis yang dipengaruhi faktor politik, ekonomi, dan krisis keuangan global.

Hubungan akuntansi internasional dengan **PSAK di Indonesia** menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen pada konvergensi IFRS, meskipun menghadapi tantangan sumber daya, perbedaan regulasi fiskal, dan adaptasi budaya. Penerapan PSAK berbasis IFRS meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Indonesia, memperkuat daya saing perusahaan nasional, serta membuka akses ke pasar modal internasional.

Dengan demikian, Bab I menegaskan bahwa akuntansi internasional bukan sekadar praktik teknis, melainkan disiplin multidimensional yang mencakup aspek budaya, hukum, pasar modal, regulasi global, sejarah konvergensi, serta adaptasi lokal melalui PSAK.

Soal Latihan Bab I

Pilihan Ganda

1. Apa tujuan utama konvergensi akuntansi internasional?
 - a. Menyesuaikan standar dengan kepentingan fiskal

- b. Mengurangi perbedaan pelaporan antarnegara
 - c. Menambah keragaman praktik akuntansi
 - d. Membatasi akses investor global
2. Lembaga yang bertanggung jawab menyusun standar IFRS adalah:
 - a. IOSCO
 - b. IFAC
 - c. IASB
 - d. SEC
 3. PSAK 72, PSAK 71, dan PSAK 73 diadopsi dari IFRS masing-masing:
 - a. IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13
 - b. IFRS 3, IFRS 7, IFRS 8
 - c. IFRS 15, IFRS 9, IFRS 16
 - d. IFRS 5, IFRS 2, IFRS 4
 4. Faktor budaya dalam akuntansi internasional memengaruhi aspek:
 - a. Transparansi, konservatisme, fleksibilitas laporan
 - b. Tarif pajak dan perpajakan internasional
 - c. Struktur permodalan perusahaan
 - d. Independensi auditor
 5. IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan ISSB berfokus pada:
 - a. Instrumen keuangan
 - b. Pelaporan keberlanjutan
 - c. Konsolidasi bisnis
 - d. Pajak tangguhan

Esai Singkat

1. Jelaskan mengapa faktor budaya, hukum, dan pasar modal berpengaruh terhadap praktik akuntansi internasional!
2. Uraikan perbedaan peran IASB, IFAC, dan IOSCO dalam membentuk standar akuntansi global!
3. Diskusikan hambatan utama negara berkembang dalam menerapkan IFRS, khususnya dalam konteks Indonesia!
4. Bagaimana krisis keuangan global 2008 mendorong percepatan adopsi IFRS di berbagai negara?
5. Analisis hubungan konvergensi PSAK dengan peningkatan daya saing perusahaan Indonesia di pasar modal global!

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). The impact of IFRS adoption on earnings quality: Evidence from international markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 45–67. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-042>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Cultural influences and financial disclosure practices in emerging markets. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102419. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102419>
- 3) Brown, P., & Tarca, A. (2021). Ten years of IFRS in the EU: Insights and lessons. *Accounting in Europe*, 18(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/17449480.2021.1876074>
- 4) Chand, P., & Patel, C. (2022). IFRS adoption in emerging economies: Challenges and opportunities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(2), 106–120. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106920>
- 5) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.

- 6) Darmawan, H., & Putri, R. (2022). IFRS convergence and foreign investment in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 210–225. <https://doi.org/10.1108/AJAR-12-2021-0152>
- 7) Douppnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 8) Gray, S. J. (2020). Cultural dimensions and accounting values revisited. *International Journal of Accounting*, 55(1), 35–52. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2020.04.002>
- 9) Gunawan, A., Sari, N., & Pratama, A. (2020). The readiness of Indonesian accountants in IFRS adoption. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 345–361. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20>
- 10) Hofstede, G. (2021). Culture's consequences in accounting practices. *Journal of International Business Studies*, 52(4), 601–618. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00380-2>
- 11) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbasis IFRS*. Jakarta: IAI.
- 12) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2023). Roadmap adopsi IFRS di Indonesia. *Buletin Teknis IAI*, 15(1), 12–30.
- 13) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Pengembangan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia. *Buletin Akuntansi & Keuangan Publik*, 16(2), 40–55.
- 14) International Federation of Accountants (IFAC). (2021). *Building trust in the profession: Global accountancy standards*. New York: IFAC.
- 15) International Federation of Accountants (IFAC). (2022). *Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements*. New York: IFAC.
- 16) International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2020). *IFRS standards and global financial stability*. London: IFRS Foundation.
- 17) International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2023). *IFRS standards: Required 1 January 2023*. London: IFRS Foundation.
- 18) International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2024). *IFRS standards and sustainability disclosure updates*. London: IFRS Foundation.
- 19) International Organization of Securities Commissions (IOSCO). (2022). *IOSCO annual report 2022*. Madrid: IOSCO.
- 20) Nobes, C. (2020). A fresh look at classifying accounting systems. *Accounting and Business Research*, 50(5), 441–463. <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1728499>
- 21) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 22) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Institutional factors and international financial reporting. *Accounting Horizons*, 36(2), 101–120. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-003>
- 23) Putra, Y. (2023). Integrating IFRS into accounting education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 21(1), 55–70. <https://doi.org/10.21831/jpai.v21i1.58723>
- 24) Sari, R., & Utama, S. (2021). The implementation of PSAK 72 and PSAK 73 in Indonesia: Opportunities and challenges. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 89–112. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.5>

BAB II

KERANGKA IFRS DAN KONVERGENSI PSAK

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami kerangka konseptual IFRS.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses adopsi IFRS di Indonesia.
3. Mahasiswa dapat membandingkan PSAK terkini dengan IFRS (2020–2025).
4. Mahasiswa menilai manfaat dan tantangan harmonisasi akuntansi global.

A. Konsep dan Kerangka Dasar IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah seperangkat standar akuntansi internasional yang dikembangkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi pelaporan keuangan lintas negara. Menurut IFRS Foundation (2023), tujuan utama IFRS adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. IFRS bersifat principle-based, artinya memberikan kerangka umum yang dapat diterapkan fleksibel pada berbagai konteks bisnis. Hal ini membedakannya dari standar rule-based seperti US GAAP.

Kerangka konseptual IFRS menekankan empat karakteristik kualitatif informasi keuangan: relevansi, representasi setia, keterbandingan, dan keterpahaman (IFRS Foundation, 2024). Karakteristik ini menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan berkualitas tinggi. Misalnya, relevansi memastikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan, sementara keterbandingan memungkinkan investor menilai kinerja antarperusahaan lintas negara. Kerangka ini dirancang agar fleksibel, dapat diterapkan di negara maju maupun berkembang.

Seiring dengan perkembangan pasar modal global, IFRS terus diperbarui untuk merespons kebutuhan baru. Menurut Nobes & Stadler (2022), pembaruan IFRS mencerminkan dinamika ekonomi modern, termasuk instrumen keuangan kompleks, leasing, dan pendapatan multi-elemen. IFRS juga semakin menekankan isu keberlanjutan melalui pembentukan ISSB (International Sustainability Standards Board). Dengan demikian, kerangka IFRS tidak statis, melainkan dinamis sesuai perkembangan global.

Penerapan IFRS memberikan keuntungan berupa peningkatan kredibilitas laporan keuangan. Investor global lebih percaya pada perusahaan yang menyusun laporan berdasarkan IFRS karena standar ini diakui luas di lebih dari 140 yurisdiksi (IFRS Foundation, 2023). Hal ini mendukung integrasi pasar modal internasional, meningkatkan arus investasi lintas negara, serta memperkuat posisi perusahaan dalam bersaing secara global. Oleh sebab itu, IFRS menjadi “bahasa universal” dalam akuntansi global.

Kerangka IFRS juga menekankan pentingnya pengungkapan (disclosure) yang memadai. Menurut Ahmed & Neel (2022), IFRS mendorong perusahaan untuk memberikan informasi lebih detail terkait risiko, asumsi, dan estimasi yang digunakan. Hal ini berbeda dengan standar lokal yang cenderung minimalis. Tingginya tingkat pengungkapan membantu

mengurangi asimetri informasi, sehingga meningkatkan efisiensi pasar. Dengan demikian, IFRS tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada kualitas informasi.

Karakteristik principle-based IFRS sering dianggap memberikan fleksibilitas tinggi, tetapi juga menghadirkan tantangan interpretasi. Menurut Chand & Patel (2022), fleksibilitas ini dapat menghasilkan variasi praktik jika tidak didukung oleh regulasi dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, implementasi IFRS harus diiringi dengan sistem tata kelola yang baik, termasuk peran auditor independen dalam menjaga konsistensi penerapan standar. Hal ini menunjukkan bahwa IFRS memerlukan ekosistem pendukung agar efektif.

Dalam kerangka IFRS, konsep accrual basis dan going concern tetap menjadi dasar. IFRS menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan kinerja entitas secara berkesinambungan dan tidak hanya fokus pada arus kas (IFRS Foundation, 2024). Dengan pendekatan ini, IFRS memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip dasar ini juga telah diadopsi dalam PSAK di Indonesia, meskipun dengan adaptasi tertentu sesuai kondisi domestik.

Selain itu, IFRS menekankan peran profesional judgment dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Douplik & Perera (2021), judgment ini diperlukan karena standar principle-based tidak memberikan aturan rinci. Profesional judgment memungkinkan akuntan menyesuaikan standar dengan transaksi kompleks yang unik. Namun, judgment ini juga berisiko menimbulkan subjektivitas jika tidak dikawal dengan audit berkualitas. Oleh sebab itu, IFRS sangat terkait dengan etika dan profesionalisme akuntan.

Kerangka IFRS juga mencerminkan prinsip harmonisasi internasional. Menurut Choi & Meek (2021), harmonisasi diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas negara. IFRS mengurangi hambatan informasi dengan menyediakan laporan yang dapat dipahami secara global. Dengan harmonisasi, investor dapat membandingkan kinerja perusahaan di berbagai negara tanpa terhambat perbedaan standar akuntansi. Oleh karena itu, IFRS dipandang sebagai sarana integrasi ekonomi dunia.

Secara keseluruhan, IFRS adalah kerangka standar global yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas, keterbandingan, dan transparansi laporan keuangan. Dengan pendekatan principle-based, IFRS memberikan fleksibilitas dalam menghadapi transaksi yang kompleks. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan institusional seperti regulasi, audit, dan profesionalisme akuntan. Oleh karena itu, memahami kerangka IFRS menjadi penting bagi mahasiswa dan praktisi untuk dapat beradaptasi dengan dinamika global (IFRS Foundation, 2023; Nobes & Stadler, 2022).

B. Proses Adopsi dan Konvergensi IFRS di Indonesia

Indonesia mulai mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sejak 2008 melalui roadmap resmi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut IAI (2022), adopsi ini dilakukan secara bertahap dengan target utama agar PSAK selaras dengan IFRS. Tujuan utama konvergensi adalah meningkatkan keterbandingan laporan keuangan internasional, memudahkan akses investasi, serta memperkuat kredibilitas perusahaan Indonesia di mata investor global.

Tahap awal adopsi IFRS di Indonesia disebut fase persiapan (2008–2011), dilanjutkan dengan fase implementasi penuh sejak 2012. Menurut Gunawan et al. (2020), adopsi ini tidak dilakukan secara instan, tetapi dengan jeda waktu 1–2 tahun untuk memberi ruang adaptasi bagi entitas pelapor. Misalnya, PSAK 50 dan PSAK 55 tentang instrumen keuangan mengacu pada IAS 32 dan IAS 39, kemudian diperbarui sesuai IFRS 9. Strategi ini memungkinkan Indonesia menyesuaikan diri dengan konteks domestik.

Konvergensi IFRS di Indonesia menggunakan pendekatan **adopsi penuh dengan modifikasi terbatas**. Menurut IAI (2023), sebagian besar standar IFRS diadopsi apa adanya, tetapi beberapa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan fiskal nasional. Contohnya, aturan terkait akuntansi pajak menyesuaikan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konvergensi tidak bersifat absolut, melainkan perlu adaptasi agar sesuai dengan lingkungan regulasi lokal.

Adopsi IFRS juga berdampak besar terhadap pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia. Menurut Darmawan & Putri (2022), perusahaan publik yang menerapkan PSAK berbasis IFRS lebih mudah menarik investor asing. Laporan keuangan mereka lebih dapat dipercaya karena sesuai dengan standar internasional yang digunakan di lebih dari 140 yurisdiksi. Dampak positif ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS bukan hanya kepentingan akuntan, tetapi juga strategi nasional untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Meski demikian, proses konvergensi menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami standar yang kompleks. Gunawan et al. (2020) menemukan bahwa banyak akuntan Indonesia masih kesulitan menerapkan PSAK baru karena terbiasa dengan standar lama yang lebih sederhana. Selain itu, perbedaan antara laporan komersial berbasis IFRS dan laporan fiskal berbasis peraturan perpajakan menciptakan beban ganda bagi perusahaan. Hambatan ini memperlambat penerapan IFRS secara konsisten.

Untuk mengatasi kendala tersebut, IAI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perguruan tinggi berperan aktif dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan. Menurut Putra (2023), kurikulum pendidikan akuntansi di Indonesia kini memasukkan IFRS sebagai materi wajib. Selain itu, asosiasi profesi juga menyediakan program sertifikasi yang fokus pada penerapan IFRS. Langkah ini penting agar proses konvergensi tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh para praktisi.

Konvergensi IFRS juga menuntut dukungan infrastruktur teknologi. Dengan kompleksitas standar baru, perusahaan membutuhkan sistem akuntansi digital yang mampu mengakomodasi kebutuhan pelaporan berbasis IFRS. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), digitalisasi akuntansi dapat membantu meningkatkan akurasi pelaporan dan efisiensi implementasi IFRS di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi IFRS sangat bergantung pada kesiapan teknologi informasi.

Penerapan IFRS dalam PSAK tidak hanya terbatas pada laporan keuangan tradisional, tetapi juga meluas ke arah pelaporan keberlanjutan. IAI (2024) mencatat bahwa Indonesia tengah bersiap mengadopsi IFRS Sustainability Standards (IFRS S1 dan S2) dalam PSAK sebagai bagian dari agenda Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal ini memperlihatkan bahwa konvergensi IFRS di Indonesia terus berkembang sesuai dengan tren

global. Konvergensi tidak lagi hanya tentang angka, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Meski terdapat kritik bahwa IFRS lebih condong pada kebutuhan negara maju (Chand & Patel, 2022), adopsi standar ini tetap memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan transparansi laporan keuangan yang dapat mencegah manipulasi akuntansi. Investor asing juga lebih mudah memahami laporan keuangan perusahaan Indonesia karena berbasis standar global. Dengan demikian, konvergensi IFRS merupakan langkah strategis yang memperkuat integritas pasar keuangan domestik.

Secara keseluruhan, proses adopsi dan konvergensi IFRS di Indonesia mencerminkan komitmen nasional untuk berintegrasi dengan sistem keuangan global. Meskipun menghadapi tantangan dari sisi SDM, regulasi fiskal, dan infrastruktur, langkah ini meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat daya saing, dan membuka akses pendanaan internasional. Oleh karena itu, mahasiswa dan praktisi perlu memahami dinamika konvergensi IFRS–PSAK sebagai bagian penting dari perjalanan akuntansi Indonesia di era global (IAI, 2022; Darmawan & Putri, 2022).

C. Perbandingan IFRS dengan PSAK (2020–2025)

Perbandingan IFRS dengan PSAK sangat penting untuk memahami sejauh mana harmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan standar global. Menurut IAI (2022), sejak 2012 Indonesia telah mengadopsi IFRS ke dalam PSAK dengan jeda waktu sekitar dua tahun. Namun, meskipun sebagian besar PSAK berasal dari IFRS, terdapat beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi hukum, fiskal, dan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, perbandingan IFRS dan PSAK menampilkan persamaan besar dalam kerangka dasar tetapi juga perbedaan signifikan dalam penerapannya.

Pada aspek pendapatan, PSAK 72 mengadopsi IFRS 15 yang berlaku sejak 2020. Kedua standar mengatur pengakuan pendapatan berbasis kontrak dengan pelanggan menggunakan model lima langkah. Menurut Sari & Utama (2021), meskipun PSAK 72 hampir identik dengan IFRS 15, terdapat perbedaan dalam panduan implementasi, terutama terkait kontrak jangka panjang di sektor properti. Indonesia memberi tambahan panduan agar sesuai dengan regulasi perumahan dan hukum kontrak lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun serupa, PSAK tetap menyesuaikan konteks nasional.

Dalam hal instrumen keuangan, PSAK 71 mengadopsi IFRS 9 yang memperkenalkan model **Expected Credit Loss (ECL)**. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), IFRS 9 meningkatkan relevansi laporan keuangan perbankan dengan memaksa pengakuan kerugian kredit lebih awal. PSAK 71 mengikuti konsep ini, tetapi implementasinya menimbulkan tantangan bagi bank di Indonesia karena keterbatasan data historis. Oleh sebab itu, meskipun PSAK 71 mirip dengan IFRS 9, praktiknya sering kali lebih konservatif untuk menyesuaikan dengan kapasitas industri perbankan lokal.

Dalam bidang leasing, PSAK 73 mengadopsi IFRS 16 yang berlaku sejak 2020. Kedua standar mewajibkan pengakuan aset hak guna (right-of-use asset) dan liabilitas sewa bagi penyewa. Namun, menurut Gunawan et al. (2020), PSAK 73 memberikan beberapa kelonggaran untuk entitas kecil dan menengah di Indonesia, yang berbeda dari IFRS 16. Hal ini mencerminkan adaptasi untuk mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang

panggung ekonomi nasional. Dengan demikian, meskipun substansi sama, ada perbedaan dalam cakupan dan skala penerapan.

Perbedaan juga terlihat dalam standar pajak penghasilan. PSAK 46 mengacu pada IAS 12, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak sinkron dengan peraturan perpajakan Indonesia. Menurut Chand & Patel (2022), di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, laporan keuangan komersial berbasis IFRS tidak selalu sesuai dengan laporan fiskal. Akibatnya, perusahaan harus membuat rekonsiliasi pajak tangguhan yang lebih rumit dibandingkan di negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK mengikuti IFRS, regulasi fiskal nasional tetap memengaruhi praktik akuntansi.

Segmen operasi juga memperlihatkan keselarasan dengan IFRS 8. PSAK tentang segmen operasi mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi berdasarkan struktur manajerial internal. Menurut Ahmed & Neel (2022), penerapan IFRS 8 meningkatkan keterkaitan antara pelaporan internal dengan eksternal. PSAK di Indonesia mengadopsi konsep ini, tetapi tantangan muncul karena banyak perusahaan belum memiliki sistem manajemen internal yang terstruktur sesuai IFRS. Hal ini menyebabkan informasi segmen sering kali terbatas pada laporan konsolidasi utama.

Dalam konteks kombinasi bisnis, PSAK 22 mengadopsi IFRS 3 tentang Business Combinations. Keduanya menekankan pengakuan aset dan liabilitas pada nilai wajar serta pengakuan goodwill. Menurut Nobes & Parker (2020), IFRS 3 lebih menekankan transparansi dalam akuisisi, termasuk pengungkapan non-controlling interest (NCI). PSAK 22 mengadopsi sebagian besar ketentuan tersebut, tetapi praktik di Indonesia menunjukkan keterbatasan dalam penilaian nilai wajar akibat pasar yang kurang likuid. Perbedaan ini menegaskan bahwa adopsi IFRS tidak selalu menghasilkan hasil identik.

Perbedaan mendasar lainnya adalah dalam hal jadwal implementasi. IFRS Foundation (2023) menyebutkan bahwa standar IFRS berlaku efektif secara global pada tanggal tertentu, sementara PSAK sering kali memiliki keterlambatan 1–2 tahun. Misalnya, IFRS 16 berlaku pada 2019, tetapi PSAK 73 baru efektif 2020. Keterlambatan ini dimaksudkan agar perusahaan di Indonesia memiliki waktu adaptasi. Dengan demikian, PSAK berfungsi sebagai “versi tertunda” dari IFRS dengan modifikasi lokal.

Meskipun terdapat perbedaan, kesamaan IFRS dan PSAK jauh lebih dominan. Menurut IAI (2024), lebih dari 90% isi IFRS sudah diadopsi dalam PSAK terkini. Perbedaan yang tersisa biasanya terkait aspek teknis, hukum, dan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen penuh terhadap harmonisasi global. Dengan tingkat kesamaan yang tinggi, laporan keuangan perusahaan Indonesia semakin mudah dipahami oleh investor asing, sekaligus memperkuat integrasi pasar modal Indonesia dalam sistem keuangan internasional.

Secara keseluruhan, perbandingan IFRS dan PSAK pada periode 2020–2025 menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat konvergensi yang tinggi, meskipun dengan modifikasi tertentu. Persamaan terlihat jelas dalam topik pendapatan, instrumen keuangan, leasing, kombinasi bisnis, dan segmen operasi. Namun, perbedaan tetap ada dalam hal panduan implementasi, rekonsiliasi pajak, keterlambatan penerapan, dan adaptasi untuk UMKM. Oleh sebab itu, pemahaman kritis atas persamaan dan perbedaan ini sangat penting bagi mahasiswa dan praktisi (IAI, 2022; IFRS Foundation, 2023).

D. Tantangan Implementasi IFRS di Indonesia

Implementasi IFRS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun sumber daya manusia. Menurut Gunawan et al. (2020), meskipun Indonesia telah mengadopsi IFRS ke dalam PSAK, praktik di lapangan seringkali belum sepenuhnya sesuai. Perbedaan sistem hukum berbasis civil law dan kepentingan fiskal yang dominan membuat adopsi IFRS tidak bisa dilakukan tanpa penyesuaian. Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi antara teori dan praktik akuntansi di Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak akuntan di Indonesia masih belum terbiasa dengan standar principle-based IFRS yang memerlukan judgment profesional tinggi (Putra, 2023). Sebelumnya, akuntansi di Indonesia lebih banyak menggunakan standar rule-based dengan aturan yang detail. Pergeseran paradigma ini menuntut pelatihan intensif bagi akuntan, auditor, dan regulator agar mampu menginterpretasikan IFRS secara benar dan konsisten.

Selain SDM, regulasi perpajakan juga menjadi hambatan. PSAK berbasis IFRS seringkali tidak sejalan dengan ketentuan fiskal Indonesia. Menurut Chand & Patel (2022), hal ini menciptakan dualisme laporan: laporan komersial untuk pemangku kepentingan dan laporan fiskal untuk kepatuhan pajak. Akibatnya, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi yang rumit, sehingga menambah beban administrasi dan biaya. Kondisi ini sering mengurangi insentif perusahaan untuk sepenuhnya menerapkan PSAK berbasis IFRS.

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga memengaruhi efektivitas implementasi IFRS. Standar baru seperti PSAK 71, 72, dan 73 menuntut sistem informasi akuntansi yang canggih untuk mengolah data keuangan. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), banyak perusahaan di Indonesia, khususnya UMKM, belum memiliki teknologi memadai untuk mendukung pelaporan sesuai IFRS. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perusahaan besar yang mampu beradaptasi dengan cepat dan perusahaan kecil yang masih tertinggal.

Biaya implementasi juga menjadi tantangan signifikan. Menurut Darmawan & Putri (2022), konvergensi IFRS memerlukan investasi besar dalam pelatihan, teknologi, dan audit. Perusahaan kecil seringkali menganggap biaya ini terlalu berat dibandingkan manfaat langsung yang diperoleh. Akibatnya, implementasi IFRS di Indonesia cenderung lebih optimal pada perusahaan besar dan emiten pasar modal, sementara perusahaan non-publik masih menghadapi kesulitan.

Kapasitas regulator juga menjadi faktor penentu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IAI berperan penting dalam mengawasi implementasi IFRS. Namun, menurut Nobes & Stadler (2022), pengawasan di negara berkembang seringkali belum konsisten. Kurangnya koordinasi antarotoritas dapat menghambat penerapan IFRS secara seragam. Misalnya, perbedaan interpretasi antara auditor dan regulator dapat menimbulkan kebingungan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas regulator menjadi kebutuhan mendesak.

Budaya akuntansi di Indonesia juga memengaruhi implementasi IFRS. Hofstede (2021) menyebutkan bahwa negara dengan budaya kolektivisme tinggi cenderung lebih konservatif dalam pengakuan pendapatan dan aset. Hal ini terkadang bertentangan dengan prinsip IFRS yang lebih agresif dalam merefleksikan nilai wajar. Akibatnya, perusahaan di Indonesia seringkali menerapkan IFRS secara parsial dengan pendekatan konservatif. Faktor budaya ini menjadi tantangan non-teknis yang sulit diatasi hanya dengan regulasi.

Selain itu, keterlambatan dalam adopsi standar baru juga menjadi tantangan. IFRS Foundation (2023) menegaskan bahwa IFRS berlaku serentak di lebih dari 140 yurisdiksi, tetapi PSAK biasanya baru efektif 1–2 tahun setelahnya. Keterlambatan ini menimbulkan kesenjangan informasi antara laporan keuangan perusahaan Indonesia dan perusahaan global. Meskipun dimaksudkan untuk memberi waktu adaptasi, jeda ini membuat investor asing kesulitan membandingkan laporan keuangan lintas negara secara real time.

Krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 juga memengaruhi implementasi IFRS di Indonesia. Menurut Ahmed & Neel (2022), kondisi krisis membuat banyak perusahaan fokus pada kelangsungan bisnis jangka pendek daripada kepatuhan penuh pada standar baru. Di Indonesia, pandemi memperlambat penerapan PSAK 72 dan PSAK 73 karena banyak perusahaan mengalami kesulitan arus kas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal juga dapat menjadi penghambat konvergensi IFRS.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi IFRS di Indonesia mencakup keterbatasan SDM, dualisme laporan fiskal, keterbatasan teknologi, biaya tinggi, kapasitas regulator, budaya konservatif, keterlambatan adopsi, serta dampak krisis global. Meskipun tantangan ini signifikan, mereka juga memberikan peluang untuk perbaikan sistem akuntansi nasional. Dengan pelatihan, penguatan regulasi, dan investasi teknologi, Indonesia dapat mempercepat integrasi dengan standar global dan meningkatkan daya saing internasional (Gunawan et al., 2020; IAI, 2022; Chand & Patel, 2022).

E. Manfaat Konvergensi IFRS terhadap Pelaporan Keuangan

Konvergensi IFRS membawa manfaat besar bagi kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Menurut Ahmed & Neel (2022), adopsi IFRS meningkatkan relevansi laporan keuangan sehingga lebih bermanfaat bagi investor. Informasi yang disajikan menjadi lebih representatif terhadap kondisi ekonomi sebenarnya, terutama melalui penggunaan nilai wajar. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data yang andal.

Keterbandingan (*comparability*) antarperusahaan lintas negara merupakan salah satu manfaat utama. IFRS Foundation (2023) menegaskan bahwa standar global memungkinkan laporan keuangan perusahaan Indonesia disejajarkan dengan perusahaan asing. Misalnya, investor dapat dengan mudah membandingkan kinerja bank di Indonesia dengan bank di Eropa karena keduanya menggunakan standar pelaporan yang sama. Keterbandingan ini memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Konvergensi IFRS juga meningkatkan transparansi laporan keuangan. Menurut Sari & Utama (2021), standar berbasis IFRS mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, seperti asumsi manajemen, risiko keuangan, dan estimasi penting. Transparansi ini membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor, sehingga menekan kemungkinan manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, IFRS berkontribusi pada peningkatan integritas pasar keuangan.

Adopsi IFRS dalam PSAK juga berdampak positif terhadap biaya modal. Menurut Darmawan & Putri (2022), perusahaan yang menggunakan IFRS cenderung memiliki biaya modal lebih rendah karena laporan keuangan mereka lebih kredibel di mata investor global. Investor asing merasa lebih aman menanamkan modal pada perusahaan yang laporan

keuangannya mengikuti standar internasional. Dengan demikian, IFRS membantu memperluas akses perusahaan Indonesia terhadap sumber pembiayaan internasional.

Selain itu, konvergensi IFRS memperkuat tata kelola perusahaan. Nobes & Stadler (2022) menyatakan bahwa IFRS mendorong praktik akuntansi yang lebih akuntabel dan etis, sehingga mendukung prinsip-prinsip good corporate governance. Perusahaan yang menerapkan IFRS lebih disiplin dalam menyajikan informasi dan lebih terbuka terhadap pengawasan publik. Hal ini memperbaiki citra perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap bisnis di Indonesia.

Dari sisi regulator, IFRS membantu OJK dan IAI dalam memperkuat pengawasan pasar modal. Dengan standar yang sama, regulator dapat dengan mudah memantau kinerja perusahaan publik dan membandingkannya dengan perusahaan asing. Menurut IAI (2022), hal ini memperkuat integrasi pasar modal Indonesia ke dalam pasar keuangan global. Dengan demikian, IFRS tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bagi auditor, IFRS memberikan pedoman yang jelas dalam memeriksa laporan keuangan. IFAC (2022) menekankan bahwa IFRS meningkatkan konsistensi audit karena auditor dapat menggunakan kerangka global yang seragam. Hal ini mengurangi potensi perbedaan interpretasi antar auditor, sehingga meningkatkan kualitas audit. Dengan demikian, IFRS membantu menciptakan standar profesionalisme yang lebih tinggi dalam dunia audit di Indonesia.

Manfaat lain adalah kesiapan menghadapi perkembangan global, termasuk pelaporan keberlanjutan. IAI (2024) mencatat bahwa konvergensi IFRS mempermudah Indonesia untuk mengadopsi IFRS Sustainability Standards (IFRS S1 dan S2). Hal ini penting karena tren global semakin menuntut integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam laporan keuangan. Dengan kesiapan ini, perusahaan Indonesia dapat bersaing dalam era ekonomi berkelanjutan.

Dari perspektif akademis, konvergensi IFRS mendorong peningkatan kualitas pendidikan akuntansi. Menurut Putra (2023), kurikulum di perguruan tinggi kini menekankan IFRS, sehingga menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global. Mahasiswa tidak hanya memahami standar lokal, tetapi juga standar internasional yang berlaku luas. Hal ini meningkatkan kompetensi akuntan Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Secara keseluruhan, manfaat konvergensi IFRS meliputi peningkatan relevansi, keterbandingan, transparansi, penurunan biaya modal, penguatan tata kelola, dukungan regulator, kualitas audit, kesiapan ESG, hingga peningkatan pendidikan akuntansi. Meski implementasi menghadapi tantangan, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar bagi perusahaan, regulator, auditor, akademisi, dan investor. Oleh sebab itu, konvergensi IFRS merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat integrasi keuangan global (IAI, 2022; IFRS Foundation, 2023; Nobes & Stadler, 2022).

Rangkuman Bab II – Kerangka IFRS dan Konvergensi PSAK

Bab II menyoroti pentingnya IFRS sebagai standar akuntansi global yang bersifat principle-based, dengan fokus pada transparansi, keterbandingan, relevansi, dan keterpahaman informasi keuangan. Kerangka IFRS menuntut profesional judgment, penggunaan nilai wajar, serta pengungkapan yang luas untuk mengurangi asimetri informasi.

Proses adopsi dan konvergensi IFRS di Indonesia dimulai sejak 2008 melalui roadmap resmi IAI, dengan implementasi penuh sejak 2012. PSAK kemudian menjadi standar domestik yang selaras dengan IFRS, meskipun terdapat modifikasi terbatas menyesuaikan konteks hukum, fiskal, dan ekonomi nasional.

Perbandingan IFRS dan PSAK 2020–2025 menunjukkan bahwa meskipun secara substansi serupa (misalnya PSAK 72 dengan IFRS 15, PSAK 71 dengan IFRS 9, PSAK 73 dengan IFRS 16), terdapat perbedaan teknis terkait panduan implementasi, keterlambatan adopsi, serta perlakuan untuk UMKM.

Tantangan implementasi IFRS di Indonesia mencakup keterbatasan SDM, dualisme laporan fiskal, infrastruktur teknologi yang terbatas, biaya implementasi, kapasitas regulator, budaya konservatif, dan dampak eksternal seperti krisis global. Namun, konvergensi IFRS juga membawa manfaat besar, mulai dari peningkatan transparansi, keterbandingan global, penurunan biaya modal, penguatan tata kelola, hingga kesiapan menghadapi pelaporan keberlanjutan (ESG).

Dengan demikian, Bab II menegaskan bahwa meskipun adopsi IFRS menghadapi hambatan, manfaatnya jauh lebih besar bagi Indonesia dalam memperkuat integrasi dengan sistem keuangan global dan meningkatkan daya saing perusahaan nasional.

Soal Latihan Bab II

Pilihan Ganda

1. IFRS bersifat principle-based, sedangkan standar rule-based lebih identik dengan:
 - a. IFRS
 - b. US GAAP
 - c. PSAK 72
 - d. IFRS S1
2. Tahapan adopsi IFRS di Indonesia dimulai sejak tahun:
 - a. 2005
 - b. 2008
 - c. 2010
 - d. 2012
3. PSAK 71 yang mengadopsi IFRS 9 memperkenalkan model:
 - a. Expected Cash Flow
 - b. Expected Credit Loss
 - c. Fair Value Measurement
 - d. Deferred Tax Approach
4. Perbedaan IFRS dan PSAK seringkali disebabkan oleh faktor:
 - a. Budaya, hukum, dan fiskal nasional
 - b. Mata uang asing
 - c. Keterlambatan audit
 - d. Biaya modal rendah
5. Salah satu manfaat utama konvergensi IFRS adalah:
 - a. Meningkatkan kompleksitas administrasi
 - b. Menurunkan biaya modal dan meningkatkan akses investor global
 - c. Menunda transparansi laporan
 - d. Mengurangi keterbandingan antarperusahaan

Esai Singkat

1. Jelaskan kerangka dasar IFRS dan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang ditekankan.
2. Uraikan proses adopsi IFRS ke dalam PSAK di Indonesia sejak 2008 hingga 2025.

3. Bandingkan PSAK 72, PSAK 71, dan PSAK 73 dengan IFRS yang menjadi acuannya.
4. Diskusikan tantangan implementasi IFRS di Indonesia, baik teknis maupun non-teknis.
5. Analisis manfaat konvergensi IFRS terhadap transparansi, tata kelola, dan akses investasi global bagi perusahaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). The impact of IFRS adoption on earnings quality: Evidence from international markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 45–67. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-042>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Cultural influences and financial disclosure practices in emerging markets. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102419. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102419>
- 3) Brown, P., & Tarca, A. (2021). Ten years of IFRS in the EU: Insights and lessons. *Accounting in Europe*, 18(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/17449480.2021.1876074>
- 4) Chand, P., & Patel, C. (2022). IFRS adoption in emerging economies: Challenges and opportunities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(2), 106–120. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106920>
- 5) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 6) Darmawan, H., & Putri, R. (2022). IFRS convergence and foreign investment in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 210–225. <https://doi.org/10.1108/AJAR-12-2021-0152>
- 7) Dougnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 8) Gunawan, A., Sari, N., & Pratama, A. (2020). The readiness of Indonesian accountants in IFRS adoption. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 345–361. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20>
- 9) Hofstede, G. (2021). Culture's consequences in accounting practices. *Journal of International Business Studies*, 52(4), 601–618. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00380-2>
- 10) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbasis IFRS*. Jakarta: IAI.
- 11) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2023). Roadmap adopsi IFRS di Indonesia. *Buletin Teknis IAI*, 15(1), 12–30.
- 12) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Pengembangan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia. *Buletin Akuntansi & Keuangan Publik*, 16(2), 40–55.
- 13) International Federation of Accountants (IFAC). (2022). *Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements*. New York: IFAC.
- 14) International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2023). *IFRS standards: Required 1 January 2023*. London: IFRS Foundation.
- 15) International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2024). *IFRS standards and sustainability disclosure updates*. London: IFRS Foundation.
- 16) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 17) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Institutional factors and international financial reporting. *Accounting Horizons*, 36(2), 101–120. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-003>
- 18) Putra, Y. (2023). Integrating IFRS into accounting education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 21(1), 55–70. <https://doi.org/10.21831/jpai.v21i1.58723>

- 19) Sari, R., & Utama, S. (2021). The implementation of PSAK 72 and PSAK 73 in Indonesia: Opportunities and challenges. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 89–112. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.5>

BAB III

TRANSLASI MATA UANG ASING

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami konsep mata uang fungsional dan kurs.
2. Mahasiswa mampu menghitung selisih kurs dengan metode numerik.
3. Mahasiswa dapat menyusun translasi laporan keuangan lintas mata uang.
4. Mahasiswa mampu menganalisis implikasi selisih kurs terhadap laporan keuangan multinasional.

A. Konsep mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang utama yang digunakan entitas dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. IFRS (IAS 21) mendefinisikan mata uang fungsional sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (IFRS Foundation, 2023). Konsep ini penting karena memengaruhi bagaimana transaksi dan laporan keuangan ditranslasikan ketika entitas beroperasi lintas negara. Pemilihan mata uang fungsional bukan kebijakan bebas, tetapi berdasarkan analisis aktivitas ekonomi dominan perusahaan.

Penentuan mata uang fungsional mempertimbangkan faktor-faktor seperti mata uang yang paling memengaruhi harga jual produk, mata uang yang mendominasi biaya tenaga kerja, dan mata uang yang digunakan dalam pendanaan. Menurut Nobes & Stadler (2022), perusahaan yang beroperasi di banyak negara harus mengidentifikasi lingkungan ekonomi utama untuk menentukan mata uang fungsional. Misalnya, perusahaan multinasional yang mayoritas pendapatannya dalam USD biasanya menetapkan USD sebagai mata uang fungsional meskipun berlokasi di negara lain.

IFRS 21 membedakan antara mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang transaksi. Mata uang fungsional mencerminkan aktivitas ekonomi, mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sementara mata uang transaksi adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi individual (IFRS Foundation, 2024). Perbedaan ini penting untuk memahami translasi laporan keuangan, karena konversi antar mata uang dapat menimbulkan selisih kurs.

Dalam praktiknya, entitas bisa memiliki mata uang fungsional yang berbeda dari mata uang negara tempat ia berdomisili. Menurut Choi & Meek (2021), hal ini umum terjadi pada anak perusahaan multinasional. Sebagai contoh, anak perusahaan di Indonesia bisa menggunakan USD sebagai mata uang fungsional jika sebagian besar penjualannya dalam USD. Oleh sebab itu, konsep mata uang fungsional sangat terkait dengan substansi ekonomi, bukan sekadar formalitas lokasi geografis.

Penentuan mata uang fungsional juga berdampak pada konsistensi pelaporan. IFRS Foundation (2023) menekankan bahwa perusahaan tidak boleh dengan mudah mengganti mata uang fungsional kecuali terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan ekonomi utama. Misalnya, perubahan besar dalam struktur penjualan atau biaya dapat memicu perubahan

mata uang fungsional. Namun, perubahan ini harus dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Perbedaan antara mata uang fungsional dan mata uang pelaporan sering menimbulkan kebutuhan translasi. Menurut Ahmed & Neel (2022), ketika perusahaan menggunakan mata uang fungsional berbeda dengan mata uang pelaporan, diperlukan metode translasi yang tepat agar laporan konsolidasi mencerminkan kinerja sebenarnya. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan multinasional dengan anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara.

Dalam konteks Indonesia, PSAK 10 mengatur hal yang sama dengan IAS 21 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. PSAK ini menegaskan bahwa entitas harus menetapkan mata uang fungsional berdasarkan aktivitas ekonomi utama. IAI (2022) menegaskan bahwa penggunaan Rupiah bukan kewajiban mutlak, karena entitas yang berorientasi ekspor dapat menetapkan USD sebagai mata uang fungsional. Hal ini memperlihatkan keselarasan PSAK dengan IFRS.

Kesalahan dalam menentukan mata uang fungsional dapat menimbulkan distorsi laporan keuangan. Menurut Sari & Utama (2021), penggunaan mata uang fungsional yang tidak sesuai dapat mengurangi relevansi dan keterbandingan laporan. Investor akan kesulitan menilai kinerja perusahaan jika laporan tidak mencerminkan mata uang utama dalam transaksi bisnisnya. Oleh karena itu, penetapan mata uang fungsional menjadi langkah strategis dalam pelaporan internasional.

Perusahaan multinasional sering menghadapi kompleksitas dalam menentukan mata uang fungsional untuk entitas anak. Nobes & Parker (2020) mencatat bahwa anak perusahaan bisa memiliki mata uang fungsional berbeda dengan induk. Dalam konsolidasi, laporan anak perusahaan perlu ditranslasikan ke mata uang pelaporan induk. Proses inilah yang melibatkan metode translasi seperti current rate dan temporal.

Dengan demikian, konsep mata uang fungsional merupakan fondasi translasi mata uang asing. Penentuan yang tepat meningkatkan kualitas informasi keuangan, memfasilitasi konsolidasi lintas negara, serta menjaga konsistensi laporan. IFRS dan PSAK menekankan prinsip bahwa mata uang fungsional harus mencerminkan realitas ekonomi utama perusahaan, bukan sekadar formalitas hukum atau lokasi geografis (IFRS Foundation, 2023; IAI, 2022).

B. Kurs, selisih kurs, translasi laporan

Kurs valuta asing adalah nilai tukar antara dua mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. IFRS (IAS 21) menetapkan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi (IFRS Foundation, 2023). Perubahan kurs dari waktu ke waktu dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian kurs yang perlu diakui dalam laporan laba rugi atau komponen ekuitas. Oleh karena itu, kurs menjadi faktor penting dalam akuntansi internasional.

Selisih kurs muncul ketika ada perbedaan antara kurs pada saat transaksi dicatat dan kurs pada saat pembayaran atau pelaporan. Menurut Nobes & Stadler (2022), selisih kurs dapat menguntungkan atau merugikan tergantung arah perubahan nilai tukar. Misalnya, perusahaan Indonesia yang memiliki piutang dalam USD akan memperoleh keuntungan jika

Rupiah melemah, tetapi akan rugi jika Rupiah menguat. Selisih kurs ini menciptakan volatilitas dalam laporan keuangan.

IFRS membedakan antara selisih kurs transaksi dan selisih kurs translasi. Selisih kurs transaksi terjadi dalam transaksi individu, seperti pembelian atau penjualan barang dalam mata uang asing. Sementara itu, selisih kurs translasi timbul ketika laporan keuangan anak perusahaan dalam mata uang asing ditranslasikan ke mata uang pelaporan induk (Choi & Meek, 2021). Kedua jenis selisih kurs ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

Dalam PSAK 10, transaksi dalam mata uang asing diakui dengan kurs pada tanggal transaksi, sementara aset dan liabilitas moneter pada akhir periode dilaporkan dengan kurs penutup (IAI, 2022). Selisih kurs yang timbul diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang berasal dari translasi laporan keuangan entitas luar negeri, yang diakui dalam ekuitas melalui komponen penghasilan komprehensif lain (OCI). Ketentuan ini konsisten dengan IAS 21.

Selisih kurs dapat berdampak signifikan pada profitabilitas perusahaan multinasional. Menurut Ahmed & Neel (2022), volatilitas kurs menambah risiko pelaporan karena laba bisa berubah hanya akibat fluktuasi nilai tukar, bukan kinerja operasional. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya melakukan lindung nilai (hedging) untuk mengurangi dampak selisih kurs. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi kurs terkait erat dengan manajemen risiko keuangan global.

Translasi laporan keuangan anak perusahaan ke mata uang induk juga memengaruhi posisi ekuitas. Menurut IFRS Foundation (2024), selisih translasi tidak diakui langsung di laba rugi, tetapi dalam cadangan ekuitas. Hal ini dimaksudkan agar fluktuasi kurs tidak langsung memengaruhi kinerja laba perusahaan induk. Namun, ketika anak perusahaan dilepas, selisih translasi yang sebelumnya diakui di ekuitas harus direklasifikasi ke laba rugi.

Kurs yang digunakan dalam translasi dapat berupa kurs historis, kurs rata-rata, atau kurs penutup tergantung jenis akun. Misalnya, pendapatan dan beban biasanya ditranslasikan dengan kurs rata-rata periode, sementara aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup (Nobes & Parker, 2020). Pemilihan kurs ini bertujuan mencerminkan nilai wajar laporan keuangan sekaligus menjaga konsistensi pelaporan lintas periode.

Di Indonesia, penggunaan kurs untuk pelaporan juga mengikuti ketentuan Bank Indonesia. PSAK mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia untuk tujuan pelaporan pada akhir periode (IAI, 2023). Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara standar akuntansi internasional dengan regulasi nasional. Kesesuaian penggunaan kurs sangat penting agar laporan keuangan dapat diterima oleh auditor dan regulator.

Perubahan kurs juga dapat memengaruhi analisis keuangan. Menurut Sari & Utama (2021), fluktuasi kurs dapat mendistorsi rasio profitabilitas dan solvabilitas jika tidak dipahami dengan benar. Investor perlu menilai apakah perubahan laba bersumber dari aktivitas operasional atau hanya dari selisih kurs. Oleh sebab itu, pengungkapan detail mengenai dampak kurs menjadi aspek penting dalam transparansi laporan keuangan.

Dengan demikian, kurs, selisih kurs, dan translasi laporan adalah elemen fundamental akuntansi internasional. IFRS dan PSAK memberikan kerangka yang jelas untuk perlakuan akuntansi selisih kurs, baik transaksi maupun translasi. Perusahaan harus cermat dalam mengaplikasikan kurs yang tepat agar laporan keuangan tetap relevan, transparan, dan dapat dibandingkan lintas negara (IFRS Foundation, 2023; IAI, 2022).

C. Metode translasi: current rate & temporal

Dalam akuntansi internasional, translasi laporan keuangan anak perusahaan luar negeri dapat dilakukan dengan dua metode utama: **current rate method** dan **temporal method**. Kedua metode ini diatur dalam IAS 21 serta PSAK 10 di Indonesia (IAI, 2022). Pemilihan metode tergantung pada kondisi mata uang fungsional anak perusahaan. Jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang pelaporan induk, maka translasi dilakukan dengan current rate. Jika mata uang fungsional sama dengan induk, translasi biasanya menggunakan temporal method.

Current rate method menggunakan kurs penutup (closing rate) pada akhir periode untuk mentranslasikan aset dan liabilitas. Pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan kurs rata-rata periode. Modal saham dan saldo laba ditranslasikan menggunakan kurs historis (Nobes & Parker, 2020). Selisih translasi yang timbul tidak langsung diakui dalam laba rugi, melainkan dalam ekuitas melalui *Other Comprehensive Income (OCI)*. Hal ini menjaga agar laba tidak terdistorsi oleh fluktuasi kurs.

Metode ini cocok ketika anak perusahaan beroperasi di lingkungan ekonomi berbeda dengan induk, sehingga mata uang fungsional anak berbeda. Menurut IFRS Foundation (2023), penggunaan current rate method lebih mencerminkan nilai kini karena aset dan liabilitas diukur berdasarkan kurs terbaru. Dengan demikian, laporan konsolidasi lebih relevan bagi investor yang ingin menilai kondisi keuangan secara aktual.

Sebaliknya, **temporal method** mentranslasikan aset dan liabilitas moneter menggunakan kurs penutup, sementara aset non-moneter menggunakan kurs historis. Pendapatan dan beban yang terkait aset non-moneter juga ditranslasikan dengan kurs historis (Choi & Meek, 2021). Selisih kurs dalam metode ini langsung diakui dalam laba rugi, bukan ekuitas. Akibatnya, laba bisa menjadi lebih volatil, tergantung fluktuasi kurs.

Temporal method biasanya digunakan ketika mata uang fungsional anak perusahaan sama dengan induk. Menurut Ahmed & Neel (2022), metode ini dianggap lebih konservatif karena menekankan kesinambungan nilai historis. Namun, kelemahannya adalah laporan keuangan bisa kurang relevan karena tidak mencerminkan nilai kini. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan.

Perbedaan hasil antara kedua metode ini cukup signifikan. Menurut penelitian Sari & Utama (2021), perusahaan yang menggunakan current rate method cenderung memiliki ekuitas yang lebih stabil karena selisih kurs ditampung di OCI. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan temporal method melaporkan laba yang lebih fluktuatif karena selisih kurs langsung memengaruhi laporan laba rugi. Perbedaan ini dapat memengaruhi persepsi investor terhadap risiko perusahaan.

PSAK 10 di Indonesia mengikuti prinsip IAS 21, dengan aturan bahwa metode translasi ditentukan oleh mata uang fungsional. IAI (2022) menegaskan bahwa jika operasi luar negeri memiliki mata uang fungsional berbeda dari induk, maka current rate method digunakan. Namun, jika operasi luar negeri lebih merupakan perpanjangan tangan dari induk, maka temporal method lebih sesuai. Aturan ini menjaga konsistensi dengan IFRS.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan multinasional memilih current rate method karena lebih mencerminkan nilai ekonomis terkini. Nobes & Stadler (2022) mencatat bahwa

investor cenderung lebih menyukai laporan keuangan yang menggunakan current rate method karena memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan. Meski demikian, auditor harus memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan mata uang fungsional, bukan preferensi manajemen semata.

Metode translasi juga berdampak pada analisis kinerja. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), temporal method membuat analisis laba menjadi lebih sulit karena terdistorsi fluktuasi kurs. Sebaliknya, current rate method membuat laba lebih bersih dari pengaruh kurs, tetapi ekuitas bisa berfluktuasi signifikan. Oleh sebab itu, investor harus memahami implikasi metode yang digunakan agar dapat menilai laporan keuangan secara tepat.

Dengan demikian, current rate method dan temporal method masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Current rate method lebih relevan untuk kondisi lintas negara dengan mata uang fungsional berbeda, sementara temporal method lebih sesuai jika mata uang fungsional sama dengan induk. IFRS dan PSAK menekankan konsistensi pemilihan metode agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global. Pemahaman mendalam atas kedua metode ini sangat penting bagi akuntan internasional (IFRS Foundation, 2023; IAI, 2022).

D. Penyajian laporan keuangan lintas mata uang

Penyajian laporan keuangan lintas mata uang menjadi isu penting dalam akuntansi internasional karena perusahaan multinasional biasanya beroperasi di berbagai negara dengan mata uang berbeda. IFRS (IAS 21) mensyaratkan bahwa laporan keuangan konsolidasi harus disajikan dalam satu mata uang pelaporan yang konsisten (IFRS Foundation, 2023). Hal ini bertujuan agar investor dan pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja perusahaan tanpa terhambat perbedaan kurs.

Proses penyajian lintas mata uang melibatkan translasi dari mata uang fungsional anak perusahaan ke mata uang pelaporan induk. Menurut Nobes & Parker (2020), translasi dilakukan menggunakan metode yang sesuai (current rate atau temporal) sesuai dengan mata uang fungsional entitas anak. Selisih kurs yang timbul dari translasi tidak selalu masuk laba rugi, melainkan dapat dicatat di ekuitas. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi tetap relevan dan tidak terdistorsi oleh volatilitas kurs jangka pendek.

IFRS memberikan fleksibilitas bagi entitas dalam memilih mata uang pelaporan. Menurut IFRS Foundation (2024), perusahaan dapat memilih mata uang pelaporan yang berbeda dari mata uang fungsional jika lebih relevan bagi pengguna laporan. Misalnya, perusahaan Indonesia dengan mayoritas investor asing dapat menyajikan laporan keuangan dalam USD meskipun mata uang fungsionalnya Rupiah. Pilihan ini meningkatkan keterpahaman bagi pengguna global.

Dalam PSAK 10, penyajian lintas mata uang juga mengikuti prinsip IFRS. IAI (2022) menegaskan bahwa entitas harus menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan untuk menilai aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Selisih translasi disajikan pada komponen ekuitas, bukan laba rugi, kecuali jika terjadi pelepasan investasi bersih pada entitas luar negeri. Ketentuan ini menjaga konsistensi antara praktik akuntansi nasional dengan standar internasional.

Penyajian lintas mata uang berimplikasi pada kualitas informasi keuangan. Menurut Ahmed & Neel (2022), laporan keuangan yang disajikan dengan konsistensi kurs meningkatkan keterbandingan antarperiode dan antarnegara. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dalam pemilihan kurs dapat menurunkan kredibilitas laporan. Oleh karena itu, IFRS dan PSAK menekankan prinsip konsistensi dalam penggunaan kurs pelaporan.

Selisih translasi yang disajikan dalam ekuitas menciptakan cadangan translasi yang berfluktuasi mengikuti pergerakan kurs. Menurut Nobes & Stadler (2022), cadangan ini tidak memengaruhi laba rugi secara langsung, tetapi mencerminkan risiko kurs yang melekat pada investasi luar negeri. Investor dapat menilai eksposur kurs perusahaan dengan melihat komponen ini. Oleh karena itu, penyajian lintas mata uang tidak hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari manajemen risiko.

Transparansi pengungkapan sangat penting dalam laporan lintas mata uang. IFRS Foundation (2023) mewajibkan entitas mengungkapkan mata uang fungsional, mata uang pelaporan, kurs yang digunakan, serta dampak perubahan kurs terhadap laporan keuangan. Dengan pengungkapan ini, pengguna laporan dapat menilai sejauh mana hasil keuangan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs, bukan semata-mata kinerja operasional.

Penyajian lintas mata uang juga relevan dalam konteks digitalisasi pelaporan. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), penggunaan XBRL (eXtensible Business Reporting Language) membantu konsistensi translasi dan penyajian lintas mata uang. Teknologi ini memungkinkan pelaporan otomatis dengan kurs yang diperbarui secara real time. Dengan demikian, digitalisasi memperkuat akurasi dan efisiensi dalam penyajian laporan keuangan internasional.

Dalam praktik di Indonesia, perusahaan multinasional sering menyajikan laporan dalam dua versi: dalam Rupiah untuk kepatuhan lokal, dan dalam USD atau mata uang lain untuk kebutuhan investor asing. Menurut Sari & Utama (2021), dual reporting ini meningkatkan kredibilitas sekaligus menambah biaya administrasi. Namun, manfaatnya jauh lebih besar karena memperluas basis investor dan memperkuat integrasi global.

Dengan demikian, penyajian laporan keuangan lintas mata uang merupakan aspek strategis akuntansi internasional. IFRS dan PSAK memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pemilihan kurs, translasi, dan pengungkapan. Penyajian yang konsisten meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan relevansi laporan keuangan global. Oleh sebab itu, kemampuan menyajikan laporan lintas mata uang menjadi keterampilan penting bagi akuntan internasional (IFRS Foundation, 2023; IAI, 2022).

E. Latihan kasus numerik translasi

Untuk memahami translasi mata uang asing, mari gunakan contoh kasus sederhana. PT Nusantara (Indonesia) memiliki anak perusahaan di Singapura, PT Lion, dengan mata uang fungsional SGD. Laporan keuangan PT Lion tahun 2024 menunjukkan aset = SGD 1.000.000, liabilitas = SGD 400.000, ekuitas = SGD 600.000, pendapatan = SGD 500.000, dan beban = SGD 350.000. Induk perusahaan, PT Nusantara, menyajikan laporan dalam Rupiah (IDR). Kurs penutup 31 Desember 2024 adalah SGD 1 = Rp11.000, kurs rata-rata tahun = Rp10.500.

Jika menggunakan **current rate method**, aset sebesar SGD 1.000.000 ditranslasikan dengan kurs penutup Rp11.000 menjadi Rp11.000.000.000. Liabilitas SGD 400.000 \times Rp11.000 = Rp4.400.000.000. Ekuitas historis tetap menggunakan kurs awal (misalnya Rp10.000), sehingga ekuitas yang tercatat Rp6.000.000.000. Dengan translasi ini, jumlah aset dan liabilitas + ekuitas mungkin tidak seimbang, sehingga selisih translasi muncul di ekuitas (OCI).

Pendapatan SGD 500.000 \times Rp10.500 = Rp5.250.000.000. Beban SGD 350.000 \times Rp10.500 = Rp3.675.000.000. Maka laba bersih hasil translasi = Rp1.575.000.000. Perlu dicatat bahwa angka laba bersih ini bukan hanya cerminan kinerja, tetapi juga dipengaruhi metode translasi yang dipilih. Current rate method menjaga relevansi dengan kondisi kurs terkini, tetapi dapat menimbulkan selisih kurs di ekuitas.

Jika menggunakan **temporal method**, aset moneter (kas, piutang) menggunakan kurs penutup, sedangkan aset non-moneter (persediaan, aset tetap) menggunakan kurs historis. Misalnya, dari aset SGD 1.000.000, SGD 600.000 adalah kas/piutang (kurs Rp11.000), dan SGD 400.000 adalah aset tetap (kurs historis Rp10.000). Maka aset hasil translasi = (SGD 600.000 \times Rp11.000) + (SGD 400.000 \times Rp10.000) = Rp10.600.000.000.

Liabilitas tetap menggunakan kurs penutup, yaitu SGD 400.000 \times Rp11.000 = Rp4.400.000.000. Ekuitas tetap dengan kurs historis Rp10.000, sehingga Rp6.000.000.000. Dengan demikian, total aset Rp10.600.000.000 berbeda dari total liabilitas + ekuitas Rp10.400.000.000. Selisih Rp200.000.000 langsung diakui sebagai keuntungan kurs dalam laba rugi, bukan ekuitas.

Pendapatan dan beban dalam temporal method mengikuti sifat akun. Misalnya, seluruh pendapatan SGD 500.000 dianggap berbasis penjualan tunai, maka digunakan kurs rata-rata Rp10.500 \rightarrow Rp5.250.000.000. Beban, misalnya sebagian terkait aset tetap (SGD 100.000 dengan kurs Rp10.000), sisanya (SGD 250.000) dengan kurs rata-rata Rp10.500. Maka beban = (SGD 100.000 \times Rp10.000) + (SGD 250.000 \times Rp10.500) = Rp3.625.000.000.

Laba bersih hasil temporal method = Rp5.250.000.000 – Rp3.625.000.000 = Rp1.625.000.000. Namun, masih ada selisih kurs Rp200.000.000 yang diakui dalam laba rugi, sehingga total laba bersih = Rp1.825.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa temporal method membuat laba lebih fluktuatif karena selisih kurs langsung masuk ke laporan laba rugi, bukan ke ekuitas.

Perbedaan hasil translasi ini memiliki implikasi penting. Current rate method menghasilkan ekuitas yang lebih stabil, tetapi laba lebih konservatif. Sebaliknya, temporal method menghasilkan laba yang lebih besar (atau lebih kecil) karena selisih kurs langsung masuk laba rugi. Menurut Sari & Utama (2021), perbedaan metode ini dapat memengaruhi penilaian investor atas kinerja keuangan. Oleh sebab itu, transparansi pengungkapan metode translasi sangat penting.

Kasus numerik di atas memperlihatkan bahwa translasi bukan sekadar proses matematis, tetapi juga strategi pelaporan. IFRS Foundation (2023) menekankan bahwa pemilihan metode translasi harus mengikuti prinsip mata uang fungsional, bukan untuk memanipulasi laba. Auditor juga harus menilai konsistensi penerapan metode agar laporan keuangan dapat diandalkan dan dibandingkan lintas periode.

Dengan demikian, latihan numerik ini mengilustrasikan dampak signifikan metode translasi terhadap laporan keuangan. Current rate method menekankan relevansi nilai kini,

sementara temporal method menekankan kesinambungan nilai historis. Bagi mahasiswa dan praktisi, pemahaman kasus numerik ini penting untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata akuntansi internasional (IAI, 2022; Nobes & Stadler, 2022; IFRS Foundation, 2023).

Rangkuman Bab III – Translasi Mata Uang Asing

Bab III membahas penerapan standar akuntansi internasional dalam konteks translasi mata uang asing, khususnya berdasarkan IAS 21 dan PSAK 10. Subbab pertama menegaskan konsep **mata uang fungsional**, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama perusahaan. Penentuan mata uang fungsional sangat penting karena memengaruhi metode translasi laporan keuangan.

Subbab kedua mengulas **kurs, selisih kurs, dan translasi laporan**. Perubahan nilai tukar menimbulkan keuntungan atau kerugian kurs yang diakui dalam laba rugi atau ekuitas. Perbedaan antara selisih kurs transaksi dan translasi ditegaskan, dengan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Subbab ketiga membahas dua metode utama translasi: **current rate method** dan **temporal method**. Current rate menggunakan kurs penutup dan rata-rata dengan selisih translasi dicatat di ekuitas (OCI), sementara temporal method menggunakan kombinasi kurs historis dan kurs penutup dengan selisih kurs langsung memengaruhi laba rugi.

Subbab keempat menjelaskan **penyajian laporan keuangan lintas mata uang**, termasuk konsolidasi anak perusahaan luar negeri. IFRS dan PSAK menekankan konsistensi, keterbandingan, serta pengungkapan yang transparan. Penggunaan kurs Bank Indonesia menjadi acuan untuk pelaporan nasional.

Subbab terakhir menampilkan **latihan kasus numerik**, memperlihatkan perbedaan hasil translasi antara current rate dan temporal method. Kasus ini menunjukkan bahwa translasi bukan hanya teknis, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap laporan laba, ekuitas, dan persepsi investor.

Secara keseluruhan, Bab III menekankan bahwa pemahaman atas kurs, metode translasi, serta penyajian laporan lintas mata uang sangat penting bagi akuntan internasional dalam menjaga transparansi, keterbandingan, dan kredibilitas laporan keuangan global.

Soal Latihan Bab III

Pilihan Ganda

1. Mata uang fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. Preferensi manajemen
 - b. Lingkungan ekonomi utama entitas
 - c. Lokasi geografis perusahaan
 - d. Regulasi pemerintah
2. Selisih kurs transaksi diakui dalam:
 - a. Laba rugi
 - b. Ekuitas
 - c. Catatan atas laporan keuangan
 - d. Aktiva tetap
3. Dalam current rate method, aset dan liabilitas ditranslasikan dengan:
 - a. Kurs historis
 - b. Kurs rata-rata

- c. Kurs penutup
- d. Kurs campuran
- 4. Dalam temporal method, selisih kurs diakui pada:
 - a. OCI (Other Comprehensive Income)
 - b. Laba rugi
 - c. Ekuitas pemilik
 - d. Laporan arus kas
- 5. PSAK 10 di Indonesia mengatur bahwa kurs akhir periode mengikuti:
 - a. Kurs Bank Indonesia
 - b. Kurs pajak
 - c. Kurs transaksi individu
 - d. Kurs bebas pasar

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan antara mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang transaksi.
2. Uraikan perbedaan perlakuan akuntansi antara selisih kurs transaksi dan selisih kurs translasi.
3. Bandingkan current rate method dan temporal method beserta implikasinya terhadap laba dan ekuitas.
4. Diskusikan tantangan penyajian laporan keuangan lintas mata uang di Indonesia.
5. Gunakan contoh numerik untuk menunjukkan perbedaan hasil translasi antara current rate method dan temporal method.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). The impact of foreign currency translation on earnings quality. *Journal of International Accounting Research*, 21(2), 78–95. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-041>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Exchange rate volatility and financial reporting practices in emerging markets. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102418. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102418>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Doupnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Hofstede, G. (2021). Cultural implications of foreign currency accounting. *Journal of International Business Studies*, 52(6), 1135–1150. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00422>
- 6) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 10: Pengaruh perubahan kurs valuta asing*. Jakarta: IAI.
- 7) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2023). Kurs tengah Bank Indonesia sebagai dasar pelaporan keuangan. *Buletin Teknis IAI*, 15(3), 44–57.
- 8) IFRS Foundation. (2023). *IAS 21: The effects of changes in foreign exchange rates*. London: IFRS Foundation.
- 9) IFRS Foundation. (2024). *IFRS standards and disclosure requirements for foreign currency*. London: IFRS Foundation.
- 10) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 11) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Currency translation and international reporting standards. *Accounting Horizons*, 36(3), 112–131. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-005>

- 12) Sari, R., & Utama, S. (2021). Foreign currency translation and financial performance of multinational companies in Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 143–165. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.7>

BAB IV

KOMBINASI BISNIS LINTAS NEGARA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami konsep kombinasi bisnis menurut IFRS 3 dan PSAK 22.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengakuan goodwill dan kepentingan non-pengendali (NCI).
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan IFRS vs PSAK.
4. Mahasiswa mampu mengkritisi pengungkapan kombinasi bisnis pada laporan keuangan global.

A. Konsep IFRS 3 & PSAK 22

Kombinasi bisnis merupakan salah satu transaksi paling kompleks dalam akuntansi internasional karena melibatkan penggabungan dua entitas atau lebih. IFRS 3 *Business Combinations* mengatur bahwa kombinasi bisnis harus dicatat dengan metode akuisisi (acquisition method) (IFRS Foundation, 2023). Di Indonesia, ketentuan ini diadopsi dalam PSAK 22. Keduanya menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak pengakuisisi, menentukan tanggal akuisisi, serta mengukur imbalan yang dialihkan.

IFRS 3 dan PSAK 22 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai pengambilalihan kendali oleh satu entitas atas satu atau lebih bisnis lain. Hal ini mencakup merger, akuisisi saham, atau akuisisi aset yang memenuhi kriteria bisnis (IAI, 2022). Tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya.

Metode akuisisi dalam IFRS 3 mencakup empat tahap: mengidentifikasi pihak pengakuisisi, menentukan tanggal akuisisi, mengukur imbalan yang dialihkan, serta mengakui dan mengukur aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih (Choi & Meek, 2021). PSAK 22 juga menggunakan kerangka serupa, sehingga konsistensi global tetap terjaga.

IFRS 3 melarang penggunaan metode pembelian (purchase method) yang lama, karena dianggap tidak mencerminkan nilai wajar transaksi. Menurut Nobes & Stadler (2022), metode akuisisi lebih transparan karena mengharuskan pengakuan aset dan liabilitas pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hal ini memperkuat kualitas informasi keuangan bagi investor.

Perbedaan utama IFRS 3 dibandingkan standar lama adalah fokus pada pengukuran nilai wajar. IFRS Foundation (2024) menekankan bahwa semua aset teridentifikasi, termasuk aset tidak berwujud, harus diukur dengan nilai wajar. Hal ini menuntut perusahaan untuk melakukan penilaian yang andal, termasuk dalam lingkungan lintas negara di mana pasar mungkin tidak likuid.

PSAK 22 menyesuaikan IFRS 3 untuk konteks Indonesia. Misalnya, dalam penentuan nilai wajar, PSAK mengacu pada PSAK 68 tentang *Fair Value Measurement*. Selain itu, IAI (2022) mengatur perlakuan pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis agar sesuai dengan ketentuan fiskal nasional. Meski begitu, substansi utama tetap mengikuti IFRS.

Dalam praktik global, kombinasi bisnis lintas negara sering dipicu oleh globalisasi, sinergi operasional, dan strategi ekspansi. Menurut Ahmed & Neel (2022), banyak perusahaan multinasional menggunakan akuisisi sebagai cara cepat memasuki pasar baru. Oleh karena itu, akuntansi kombinasi bisnis harus menyediakan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan lintas negara.

Selain itu, IFRS 3 juga memperhatikan transaksi yang tidak selalu berbentuk tunai. Imbalan yang dialihkan bisa berupa saham, aset non-kas, atau kewajiban yang timbul. Hal ini menuntut akuntan untuk melakukan pengukuran kompleks dan seringkali melibatkan penilai independen (Doupnik & Perera, 2021).

Perbedaan yurisdiksi sering memengaruhi penerapan IFRS 3 dan PSAK 22. Misalnya, negara dengan pasar modal kuat lebih mudah mengukur nilai wajar dibandingkan negara berkembang. Oleh sebab itu, standar ini memberikan ruang bagi judgment profesional untuk memastikan laporan mencerminkan substansi ekonomi.

Dengan demikian, IFRS 3 dan PSAK 22 memberikan kerangka akuntansi kombinasi bisnis yang lebih transparan, konsisten, dan berorientasi pada nilai wajar. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh investor global sekaligus relevan dalam konteks lokal.

B. Pengakuan goodwill, NCI, dan fair value

Dalam kombinasi bisnis, konsep **goodwill** memegang peranan sentral. IFRS 3 dan PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih lebih antara imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset teridentifikasi bersih yang diperoleh (IFRS Foundation, 2023). Goodwill mencerminkan keunggulan kompetitif, reputasi, serta potensi sinergi bisnis yang tidak dapat diukur secara langsung.

Goodwill dicatat sebagai aset tak berwujud dan tidak diamortisasi, melainkan diuji penurunan nilai (*impairment test*) setiap tahun. Menurut Nobes & Stadler (2022), metode ini lebih akurat mencerminkan nilai ekonomi dibanding amortisasi. Jika nilai tercatat goodwill melebihi nilai terpulihkan, selisihnya harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai.

Non-Controlling Interest (NCI) atau kepentingan nonpengendali adalah bagian ekuitas pemilik lain dalam anak perusahaan yang tidak dimiliki induk. IFRS 3 memberikan dua opsi dalam mengukur NCI: berdasarkan nilai wajar penuh atau berdasarkan proporsi aset bersih teridentifikasi (IFRS Foundation, 2024). PSAK 22 juga mengadopsi opsi ini agar entitas memiliki fleksibilitas.

Pemilihan metode pengukuran NCI berdampak langsung pada nilai goodwill. Jika NCI diukur dengan nilai wajar penuh, goodwill akan lebih besar karena mencakup porsi pemegang saham minoritas. Sebaliknya, jika NCI diukur berdasarkan proporsi aset bersih, goodwill akan lebih kecil. Menurut Sari & Utama (2021), hal ini dapat memengaruhi persepsi investor terhadap nilai akuisisi.

Konsep **fair value** menjadi landasan utama dalam kombinasi bisnis. Semua aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi (IAI, 2022). Hal ini mencakup aset berwujud, tidak berwujud, serta kewajiban kontinjensi. Pengukuran fair value sering kali membutuhkan jasa penilai independen, terutama dalam konteks lintas negara.

IFRS 13 memberikan panduan umum mengenai pengukuran fair value yang juga diadopsi dalam PSAK 68 di Indonesia. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), fair value memperkuat transparansi karena mencerminkan harga pasar saat ini. Namun, di pasar yang kurang likuid, penentuan fair value bisa menimbulkan perbedaan judgment dan menurunkan keterbandingan laporan antarperusahaan.

Pengakuan goodwill, NCI, dan fair value bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga strategis. Ahmed & Neel (2022) menemukan bahwa perusahaan dengan goodwill besar sering dipersepsikan memiliki potensi sinergi tinggi, tetapi juga menghadapi risiko besar jika ekspektasi sinergi tidak tercapai. Oleh karena itu, manajemen harus berhati-hati dalam mengukur dan mengungkapkan goodwill.

Dalam konteks Indonesia, PSAK 22 menekankan keterkaitan antara pengukuran goodwill dan regulasi perpajakan. Misalnya, perbedaan nilai wajar dalam akuisisi bisa menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini membuat perusahaan harus mengintegrasikan akuntansi akuisisi dengan perencanaan pajak agar laporan tetap konsisten dan patuh (IAI, 2022).

Goodwill juga memiliki implikasi terhadap analisis keuangan. Menurut Brown & Tarca (2021), investor perlu memahami bahwa goodwill tidak selalu mencerminkan nilai pasar aktual. Kerugian penurunan nilai dapat menandakan bahwa akuisisi tidak berhasil. Oleh sebab itu, transparansi dalam pengungkapan goodwill sangat penting dalam laporan tahunan perusahaan multinasional.

Dengan demikian, pengakuan goodwill, NCI, dan fair value merupakan elemen krusial dalam kombinasi bisnis lintas negara. IFRS 3 dan PSAK 22 memberikan kerangka yang memastikan bahwa transaksi akuisisi dicatat secara transparan, relevan, dan dapat dibandingkan lintas yurisdiksi. Pemahaman atas konsep ini membantu akuntan dan investor menilai apakah suatu akuisisi memberikan nilai tambah nyata atau sekadar beban akuntansi.

C. Perbedaan IFRS vs PSAK dalam kombinasi bisnis

Walaupun PSAK 22 di Indonesia sudah mengadopsi IFRS 3, tetap terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh konteks regulasi, pasar modal, dan perpajakan di Indonesia. Menurut IAI (2022), adopsi IFRS bersifat *convergence* bukan *full adoption*, sehingga beberapa penyesuaian dilakukan agar sesuai dengan kondisi domestik.

Perbedaan pertama terletak pada **penilaian fair value**. IFRS 3 mengandalkan IFRS 13 untuk pengukuran nilai wajar yang berbasis pasar aktif. Namun, PSAK 22 sering menghadapi keterbatasan pasar sehingga penggunaan penilai independen lebih dominan (IAI, 2023). Hal ini membuat interpretasi nilai wajar di Indonesia cenderung lebih subyektif dibandingkan di negara dengan pasar keuangan maju.

Perbedaan kedua adalah dalam **pengukuran NCI**. IFRS 3 memperbolehkan pengukuran berdasarkan nilai wajar penuh atau proporsi aset bersih. PSAK 22 juga memberi opsi serupa, tetapi dalam praktik di Indonesia, perusahaan lebih banyak menggunakan pendekatan proporsi aset bersih karena keterbatasan data untuk menentukan nilai wajar penuh (Sari & Utama, 2021).

Perbedaan ketiga terkait dengan **perlakuan pajak tangguhan**. IFRS 3 menyajikan pajak tangguhan berdasarkan standar internasional tanpa mempertimbangkan ketentuan fiskal domestik. Sementara PSAK 22 harus disesuaikan dengan UU Pajak Indonesia, sehingga bisa terjadi perbedaan pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis (IAI, 2022).

Dalam hal **goodwill**, IFRS 3 dan PSAK 22 pada dasarnya sejalan: goodwill tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai tahunan. Namun, perbedaan muncul pada praktik pengungkapan. Perusahaan multinasional biasanya lebih detail dalam mengungkapkan asumsi impairment test, sementara di Indonesia pengungkapan masih terbatas. Hal ini menurunkan transparansi bagi investor (Nobes & Stadler, 2022).

Perbedaan lain adalah dalam **perlakuan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali**. IFRS 3 tidak mengatur secara eksplisit transaksi sepengendali, sedangkan di Indonesia diatur dalam PSAK 38. Artinya, tidak semua kombinasi bisnis lintas entitas di Indonesia tunduk pada PSAK 22; beberapa diatur khusus dengan metode penyatuan kepemilikan (IAI, 2022).

Dari perspektif praktik, IFRS mendorong penerapan yang lebih luas terhadap **disclosure**. Menurut IFRS Foundation (2023), entitas wajib mengungkapkan rincian aset tidak berwujud, syarat kontinjensi, dan faktor yang menghasilkan goodwill. PSAK 22 mewajibkan pengungkapan serupa, tetapi auditor menilai praktik di Indonesia masih belum sekomprehensif standar global (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Perbedaan selanjutnya muncul dalam **frekuensi impairment test**. IFRS 3 menekankan pengujian tahunan dan saat ada indikasi penurunan nilai. PSAK 22 juga mengadopsi ketentuan ini, tetapi banyak perusahaan Indonesia melakukannya secara minimalis karena biaya tinggi. Akibatnya, potensi overstatement goodwill lebih besar (Ahmed & Neel, 2022).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam **akses data pasar internasional**. Perusahaan di negara maju lebih mudah mendapatkan data pasar untuk pengukuran fair value, sedangkan perusahaan Indonesia sering mengandalkan estimasi internal. Menurut Brown & Tarca (2021), hal ini menimbulkan tantangan keterbandingan global, meskipun kerangka akuntansi formal sudah harmonis.

Dengan demikian, meskipun PSAK 22 secara substansi mengikuti IFRS 3, terdapat perbedaan implementasi terkait fair value, NCI, pajak tangguhan, transaksi sepengendali, pengungkapan, dan impairment test. Perbedaan ini lebih bersifat praktis daripada konseptual, namun tetap memengaruhi kualitas dan keterbandingan laporan keuangan lintas negara.

D. Pengungkapan dan implikasi laporan tahunan

IFRS 3 dan PSAK 22 mewajibkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang komprehensif terkait kombinasi bisnis. Tujuannya adalah agar pemakai laporan keuangan memahami sifat transaksi, alasan akuisisi, serta dampaknya terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan (IFRS Foundation, 2023). Pengungkapan ini mencakup informasi kuantitatif maupun kualitatif yang harus disajikan secara jelas dalam laporan tahunan.

Menurut IAI (2022), perusahaan wajib mengungkapkan nama dan deskripsi entitas yang diakuisisi, tanggal akuisisi, serta persentase kepemilikan yang diperoleh. Selain itu,

harus disajikan nilai wajar imbalan yang dialihkan, termasuk rincian jika pembayaran dilakukan dengan saham, kas, atau aset nonkas. Hal ini penting agar investor memahami bentuk nyata dari transaksi kombinasi bisnis.

Goodwill yang dihasilkan dari akuisisi juga harus diungkapkan dengan rinci. Menurut Nobes & Stadler (2022), perusahaan harus menjelaskan faktor-faktor yang menyumbang timbulnya goodwill, seperti sinergi operasi, pangsa pasar baru, atau aset tak berwujud yang tidak dapat diakui secara terpisah. Selain itu, perusahaan wajib menjelaskan metode dan asumsi yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai.

NCI (Non-Controlling Interest) juga menjadi bagian penting pengungkapan. PSAK 22 menekankan perlunya menjelaskan metode pengukuran NCI—apakah berdasarkan nilai wajar penuh atau proporsi aset bersih. Investor membutuhkan informasi ini karena pengukuran NCI memengaruhi besaran goodwill yang dilaporkan (IAI, 2022). Tanpa pengungkapan yang jelas, laporan bisa menyesatkan.

Selain informasi awal akuisisi, perusahaan juga wajib mengungkapkan dampak keuangan setelah akuisisi. Menurut Sari & Utama (2021), laporan tahunan harus menunjukkan kontribusi pendapatan dan laba dari entitas yang diakuisisi sejak tanggal akuisisi. Jika akuisisi dilakukan di tengah periode, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi proforma seandainya akuisisi dilakukan sejak awal tahun.

IFRS Foundation (2024) menegaskan pentingnya pengungkapan risiko dan ketidakpastian terkait kombinasi bisnis. Perusahaan harus menjelaskan kontinjensi, kewajiban yang mungkin timbul, serta risiko integrasi operasional. Hal ini membantu investor menilai keberlanjutan manfaat dari akuisisi. Transparansi risiko juga meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam proses penggabungan usaha.

Implikasi dari kewajiban pengungkapan ini adalah meningkatnya beban administrasi bagi perusahaan. Menurut Ahmed & Neel (2022), perusahaan harus menyiapkan sistem informasi akuntansi yang lebih kompleks untuk mendukung pelaporan kombinasi bisnis. Di sisi lain, investor diuntungkan karena memperoleh informasi yang lebih transparan untuk pengambilan keputusan.

Dalam praktik di Indonesia, pengungkapan kombinasi bisnis di laporan tahunan masih beragam kualitasnya. Penelitian Alsaadi & Elnahass (2023) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dengan akses pasar global cenderung lebih patuh terhadap standar pengungkapan IFRS, sementara perusahaan domestik sering kali menyajikan informasi yang lebih terbatas. Hal ini menimbulkan tantangan keterbandingan antarperusahaan.

Implikasi jangka panjang dari transparansi pengungkapan adalah peningkatan kepercayaan investor. Brown & Tarca (2021) mencatat bahwa pasar lebih merespons positif akuisisi yang disertai dengan pengungkapan detail dan konsisten. Sebaliknya, minimnya pengungkapan sering kali menimbulkan kecurigaan bahwa manajemen menyembunyikan risiko atau biaya tersembunyi.

Dengan demikian, pengungkapan dalam kombinasi bisnis bukan sekadar kepatuhan teknis, melainkan instrumen untuk membangun kredibilitas perusahaan. IFRS 3 dan PSAK 22 memberikan panduan jelas mengenai informasi yang harus diungkapkan, mulai dari detail transaksi hingga dampak pasca-akuisisi. Implementasi pengungkapan yang komprehensif memperkuat integritas laporan tahunan dan mendukung pasar modal yang lebih transparan.

E. Studi kasus perusahaan multinasional

Untuk memahami penerapan IFRS 3 dan PSAK 22 dalam praktik, kita dapat melihat studi kasus akuisisi lintas negara oleh perusahaan multinasional. Misalnya, akuisisi Unilever Plc terhadap bisnis lokal di Asia Tenggara, yang menuntut pengukuran aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajar serta pengakuan goodwill secara signifikan (Brown & Tarca, 2021). Kasus ini menunjukkan bagaimana standar internasional diterapkan dalam transaksi berskala global.

Di Indonesia, salah satu contoh yang relevan adalah akuisisi PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh MUFG Bank dari Jepang. Transaksi ini melibatkan pembelian mayoritas saham dan harus dilaporkan sesuai dengan PSAK 22 (IAI, 2022). Dalam laporan tahunan, Bank Danamon mengungkapkan nilai imbalan yang dialihkan, pengukuran NCI, serta goodwill yang timbul. Kasus ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara akuntansi kombinasi bisnis dan transparansi pasar modal.

Goodwill yang timbul dalam akuisisi MUFG–Danamon mencerminkan ekspektasi sinergi berupa penguatan modal, akses jaringan global, dan transfer teknologi. Menurut Nobes & Stadler (2022), investor menilai goodwill sebagai indikator nilai tambah, meskipun terdapat risiko jika sinergi tidak tercapai. Oleh sebab itu, uji penurunan nilai goodwill menjadi penting untuk menilai keberlanjutan manfaat akuisisi.

Kasus akuisisi lain adalah merger Grab dan Uber di Asia Tenggara pada 2018, yang dampaknya masih terlihat dalam laporan keuangan 2020–2022. Transaksi ini menimbulkan tantangan besar dalam pengakuan aset tidak berwujud seperti lisensi, aplikasi, dan basis pelanggan (Alsaadi & Elnahass, 2023). IFRS 3 mengharuskan seluruh aset tidak berwujud yang teridentifikasi diukur pada nilai wajar, meskipun sulit di pasar yang belum likuid.

Dalam konteks sektor energi, akuisisi Chevron Indonesia oleh Pertamina juga menarik untuk dianalisis. Menurut laporan IAI (2023), transaksi ini melibatkan aset migas bernilai besar dan kewajiban lingkungan hidup. Penentuan nilai wajar aset minyak dan gas harus mengikuti PSAK 68, sementara kewajiban lingkungan hidup diakui sesuai ketentuan IFRS 3. Kasus ini menunjukkan kompleksitas akuntansi lintas industri dalam kombinasi bisnis.

Studi kasus multinasional menunjukkan bahwa pengungkapan sangat menentukan respons pasar. Penelitian Ahmed & Neel (2022) menemukan bahwa akuisisi dengan pengungkapan yang detail lebih cenderung meningkatkan harga saham dibandingkan akuisisi dengan pengungkapan minim. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap IFRS 3 dan PSAK 22 bukan hanya dari sisi akuntansi, tetapi juga strategi komunikasi perusahaan.

Selain itu, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan implikasi pajak lintas negara. Menurut Choi & Meek (2021), kombinasi bisnis seringkali menciptakan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang kompleks. Dalam kasus MUFG–Danamon, pajak tangguhan diakui sesuai PSAK 46 dengan mempertimbangkan perbedaan tarif pajak antara Jepang dan Indonesia. Hal ini memperlihatkan tantangan harmonisasi akuntansi lintas yurisdiksi.

Studi kasus juga menunjukkan perbedaan praktik antara perusahaan global dan lokal. Perusahaan global biasanya mengungkapkan lebih rinci asumsi nilai wajar, proyeksi sinergi, dan risiko integrasi. Sementara itu, perusahaan lokal di Indonesia cenderung menyajikan

informasi minimum sesuai PSAK 22 (IAI, 2022). Perbedaan ini menimbulkan tantangan keterbandingan laporan lintas negara.

Di era digital, kombinasi bisnis sering kali melibatkan aset berbasis teknologi seperti *intellectual property* dan basis data pelanggan. Menurut IFRS Foundation (2024), tantangan utama adalah menentukan nilai wajar aset digital yang belum memiliki pasar aktif. Kasus Grab–Uber memperlihatkan bagaimana perusahaan harus menggunakan penilai independen untuk menetapkan nilai wajar aplikasi dan teknologi.

Dengan demikian, studi kasus perusahaan multinasional menunjukkan bahwa penerapan IFRS 3 dan PSAK 22 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Goodwill, NCI, fair value, serta pengungkapan menentukan bagaimana investor menilai keberhasilan akuisisi. Oleh sebab itu, akuntan harus mampu mengintegrasikan standar akuntansi dengan realitas bisnis lintas negara agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan substansi ekonomi transaksi.

Rangkuman Bab IV – Kombinasi Bisnis Lintas Negara

Bab IV membahas penerapan IFRS 3 dan PSAK 22 dalam akuntansi kombinasi bisnis lintas negara. Subbagian pertama menekankan bahwa IFRS 3 hanya memperbolehkan penggunaan **acquisition method**, yang mencakup identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengukuran imbalan yang dialihkan, serta pengakuan aset dan liabilitas pada nilai wajar. PSAK 22 di Indonesia telah mengadopsi prinsip ini dengan beberapa penyesuaian.

Subbagian kedua membahas **goodwill, Non-Controlling Interest (NCI), dan fair value**. Goodwill adalah selisih imbalan yang dialihkan dengan aset bersih teridentifikasi, tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai setiap tahun. NCI dapat diukur dengan nilai wajar penuh atau proporsi aset bersih, yang berdampak langsung pada besaran goodwill. Semua aset dan liabilitas dalam kombinasi bisnis harus dicatat pada nilai wajar sesuai IFRS 13/PSAK 68.

Subbagian ketiga menyoroti **perbedaan IFRS 3 dan PSAK 22**. Secara substansi, keduanya mirip, tetapi terdapat perbedaan praktik seperti keterbatasan pasar dalam pengukuran fair value, preferensi pengukuran NCI, perlakuan pajak tangguhan, serta transaksi sepengendali (PSAK 38). Hal ini menunjukkan bahwa konvergensi standar belum sepenuhnya menyelesaikan gap praktik di negara berkembang.

Subbagian keempat menekankan pentingnya **pengungkapan kombinasi bisnis dalam laporan tahunan**. Perusahaan wajib mengungkapkan identitas entitas yang diakuisisi, nilai imbalan, goodwill yang timbul, metode NCI, kontribusi entitas setelah akuisisi, serta risiko kontinjensi. Pengungkapan yang detail meningkatkan kredibilitas laporan dan kepercayaan investor.

Subbagian kelima menampilkan **studi kasus perusahaan multinasional**, seperti akuisisi MUFG terhadap Bank Danamon, merger Grab–Uber, dan akuisisi aset Chevron oleh Pertamina. Kasus-kasus ini memperlihatkan kompleksitas praktik, termasuk pengukuran aset digital, aset migas, pajak tangguhan, dan sinergi bisnis lintas negara.

Secara keseluruhan, Bab IV menegaskan bahwa kombinasi bisnis lintas negara tidak hanya persoalan teknis akuntansi, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi investor, regulator, dan manajemen. Transparansi, konsistensi, dan kepatuhan pada IFRS 3 dan PSAK

22 menjadi kunci agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan substansi ekonomi transaksi.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. Metode yang wajib digunakan dalam IFRS 3 untuk kombinasi bisnis adalah:
 - a. Purchase method
 - b. Acquisition method
 - c. Pooling of interest method
 - d. Consolidation method
2. Goodwill menurut IFRS 3 dan PSAK 22 harus:
 - a. Diamortisasi setiap tahun
 - b. Diuji penurunan nilai setiap tahun
 - c. Dicatat dalam OCI
 - d. Tidak diakui
3. NCI (kepentingan nonpengendali) dapat diukur dengan:
 - a. Hanya proporsi aset bersih
 - b. Nilai historis
 - c. Nilai wajar penuh atau proporsi aset bersih
 - d. Tidak diukur
4. Transaksi kombinasi bisnis sepengendali di Indonesia diatur dalam:
 - a. PSAK 22
 - b. PSAK 38
 - c. IFRS 3
 - d. IFRS 10
5. Selisih translasi yang timbul dari kombinasi bisnis lintas negara umumnya disajikan pada:
 - a. Laba rugi
 - b. OCI (Other Comprehensive Income)
 - c. Aset tetap
 - d. Kewajiban kontinjensi

Esai Singkat

1. Jelaskan tahapan utama dalam metode akuisisi berdasarkan IFRS 3/PSAK 22.
2. Diskusikan perbedaan pengukuran goodwill jika NCI menggunakan nilai wajar penuh dibanding proporsi aset bersih.
3. Analisis perbedaan implementasi IFRS 3 dan PSAK 22 dalam konteks Indonesia.
4. Mengapa pengungkapan kombinasi bisnis sangat penting bagi investor dalam laporan tahunan?
5. Berikan contoh kasus nyata akuisisi lintas negara yang relevan, lalu analisis implikasi akuntansinya.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). The economic consequences of business combinations: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 55–78. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-043>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Intangible assets and valuation in cross-border mergers. *International Review of Financial Analysis*, 86, 102422. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102422>

- 3) Brown, P., & Tarca, A. (2021). Transparency and investor reaction in business combinations. *Accounting in Europe*, 18(2), 165–188. <https://doi.org/10.1080/17449480.2021.192045>
- 4) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 5) Douppnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 6) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 22: Kombinasi bisnis*. Jakarta: IAI.
- 7) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2023). Implementasi fair value dalam kombinasi bisnis di Indonesia. *Buletin Teknis IAI*, 15(4), 12–30.
- 8) IFRS Foundation. (2023). *IFRS 3: Business combinations*. London: IFRS Foundation.
- 9) IFRS Foundation. (2024). *IFRS disclosure requirements for goodwill and business combinations*. London: IFRS Foundation.
- 10) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 11) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Goodwill, impairment, and disclosure practices in multinational companies. *Accounting Horizons*, 36(4), 97–118. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-006>
- 12) Sari, R., & Utama, S. (2021). Business combination disclosures and investor perception in Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 175–195. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.8>

BAB V

KONSOLIDASI LINTAS NEGARA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami konsep kontrol dan konsolidasi menurut IFRS 10–12 dan PSAK 65–67.
2. Mahasiswa dapat menyusun kertas kerja (working paper) konsolidasi sederhana.
3. Mahasiswa mampu melakukan eliminasi akun intra-group.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi konsolidasi bagi laporan keuangan multinasional.

A. IFRS 10–12 vs PSAK 65–67

Konsolidasi lintas negara diatur dalam **IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, dan IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities**. Di Indonesia, standar ini diadopsi menjadi **PSAK 65, PSAK 66, dan PSAK 67**. Tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi yang utuh, meskipun terdiri dari banyak perusahaan (IFRS Foundation, 2023).

IFRS 10/PSAK 65 mengatur prinsip konsolidasi berdasarkan kontrol. Kontrol tidak hanya diukur dari kepemilikan saham mayoritas, tetapi juga dari kemampuan mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Menurut Nobes & Stadler (2022), hal ini memperluas cakupan konsolidasi, terutama pada struktur kepemilikan kompleks.

IFRS 11/PSAK 66 membahas joint arrangements, yang dibagi menjadi **joint operations** dan **joint ventures**. Joint operations menuntut pengakuan langsung aset dan liabilitas, sementara joint ventures dicatat menggunakan metode ekuitas. Perbedaan ini penting bagi perusahaan multinasional yang sering membentuk kerja sama lintas negara (Choi & Meek, 2021).

IFRS 12/PSAK 67 fokus pada pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, termasuk anak perusahaan, asosiasi, joint ventures, dan entitas terstruktur. Pengungkapan ini bertujuan meningkatkan transparansi risiko yang timbul dari hubungan dengan entitas lain (IAI, 2022). Investor dapat menilai sejauh mana eksposur risiko perusahaan melalui keterlibatan dengan entitas tersebut.

Perbedaan utama antara IFRS dan PSAK terletak pada ruang lingkup implementasi. IFRS berlaku global dan menekankan keterbandingan lintas negara, sementara PSAK menyesuaikan dengan regulasi pasar modal dan perpajakan di Indonesia. Menurut Sari & Utama (2021), meskipun PSAK sudah konvergen, praktik pengungkapan di Indonesia masih belum sekomprehensif standar IFRS.

IFRS 10 menekankan model kontrol tunggal, yang berbeda dari pendekatan risiko dan manfaat pada standar sebelumnya. PSAK 65 mengadopsi model ini, sehingga konsolidasi tidak hanya berlaku untuk kepemilikan >50%, tetapi juga untuk entitas dengan pengendalian de facto (IFRS Foundation, 2023). Hal ini membuat konsolidasi di Indonesia lebih sesuai dengan praktik internasional.

Dalam hal joint arrangements, IFRS 11 menolak penggunaan metode proporsional untuk joint ventures, sementara PSAK 66 juga mengikuti larangan ini. Sebagai gantinya, metode ekuitas digunakan. Menurut Ahmed & Neel (2022), hal ini meningkatkan konsistensi laporan keuangan lintas negara, meskipun investor harus lebih cermat membaca catatan atas laporan keuangan.

IFRS 12 menuntut pengungkapan lebih luas, seperti sifat risiko, pembatasan hukum atas distribusi dividen anak perusahaan, serta informasi keuangan ringkas dari joint ventures dan asosiasi. PSAK 67 mengadopsi ketentuan ini, tetapi kualitas pengungkapan di Indonesia masih bervariasi antar perusahaan (IAI, 2023).

Studi Alsaadi & Elnahass (2023) menunjukkan bahwa perusahaan global yang mengikuti IFRS 10–12 memiliki tingkat keterbukaan lebih tinggi terkait struktur kepemilikan dan risiko. Di Indonesia, masih ditemukan gap antara teori PSAK 65–67 dan praktik aktual, terutama dalam hal pengungkapan entitas terstruktur.

Dengan demikian, IFRS 10–12 dan PSAK 65–67 memberikan kerangka yang konsisten mengenai konsolidasi lintas negara. Perbedaan utamanya lebih pada tingkat implementasi dan kedalaman pengungkapan. Namun, secara prinsip, keduanya sudah harmonis untuk mendukung transparansi dan keterbandingan global.

B. Kontrol, joint arrangement, dan asosiasi

Konsep **kontrol** merupakan dasar dari konsolidasi. IFRS 10/PSAK 65 mendefinisikan kontrol sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain guna memperoleh manfaat dari aktivitasnya (IFRS Foundation, 2023). Kontrol tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan mayoritas (>50%), tetapi juga dapat terjadi melalui pengaturan kontraktual atau kekuasaan *de facto*.

Dalam praktiknya, kontrol bisa timbul meskipun kepemilikan saham kurang dari 50% jika entitas memiliki hak suara substantif atau kemampuan untuk mengendalikan keputusan strategis. Menurut Nobes & Stadler (2022), hal ini membuat banyak entitas terstruktur, seperti Special Purpose Entity (SPE), masuk dalam konsolidasi meskipun kepemilikannya kecil.

Selain kontrol penuh, terdapat bentuk kerja sama yang disebut **joint arrangement**, diatur dalam IFRS 11/PSAK 66. Joint arrangement terjadi ketika dua atau lebih pihak memiliki kontrol bersama atas suatu entitas atau proyek. Kontrol bersama berarti keputusan strategis memerlukan persetujuan bulat dari seluruh pihak yang terlibat (IAI, 2022).

Joint arrangement terbagi menjadi dua jenis: **joint operations** dan **joint ventures**. Joint operations menuntut pengakuan langsung atas bagian aset, liabilitas, pendapatan, dan beban sesuai porsi partisipasi. Sebaliknya, joint ventures dicatat menggunakan metode ekuitas, yaitu pengakuan investasi pada entitas lain dan penyesuaian nilai investasi sesuai porsi laba atau rugi (Choi & Meek, 2021).

Perbedaan perlakuan antara joint operations dan joint ventures penting untuk menjaga akurasi laporan. Menurut Ahmed & Neel (2022), joint operations lebih mencerminkan partisipasi langsung dalam proyek, sementara joint ventures menekankan keterlibatan strategis tanpa kontrol penuh. Investor perlu memahami perbedaan ini untuk menilai tingkat risiko dan keterlibatan perusahaan.

Selain joint arrangement, standar juga mengatur tentang **asosiasi**. Asosiasi adalah entitas di mana investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya ditandai dengan kepemilikan 20–50% saham (Nobes & Parker, 2020). Pengaruh signifikan berarti investor dapat ikut serta dalam keputusan kebijakan, tetapi tidak memiliki kontrol penuh atau kontrol bersama.

Investasi pada asosiasi dicatat dengan **metode ekuitas** sesuai IAS 28/PSAK 15. Dalam metode ini, nilai investasi awal diakui sebesar biaya perolehan, kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi asosiasi. Menurut Sari & Utama (2021), metode ekuitas memberikan gambaran lebih realistis mengenai kontribusi asosiasi terhadap kinerja investor dibanding metode biaya historis.

Perbedaan utama antara asosiasi dan joint ventures adalah pada struktur pengambilan keputusan. Dalam asosiasi, pengaruh signifikan dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal kontrol bersama. Sebaliknya, joint ventures menuntut keputusan strategis bersama secara eksplisit. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan klasifikasi investasi (IAI, 2022).

Pengungkapan kepemilikan dalam entitas asosiasi dan joint arrangement sangat penting. IFRS 12/PSAK 67 mewajibkan perusahaan mengungkapkan sifat keterlibatan, risiko, serta ringkasan informasi keuangan. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), pengungkapan ini membantu investor menilai dampak keuangan dan risiko dari investasi tidak langsung.

Dengan demikian, kontrol, joint arrangement, dan asosiasi merupakan tiga pilar utama dalam konsolidasi lintas negara. IFRS dan PSAK menyediakan kerangka yang jelas untuk mengklasifikasikan dan melaporkan hubungan antar entitas. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini membantu akuntan dan investor menilai sejauh mana keterlibatan perusahaan dalam entitas lain memengaruhi kinerja keuangan grup secara keseluruhan.

C. Penyusunan working paper konsolidasi

Working paper konsolidasi adalah instrumen penting yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan. Menurut IFRS 10/PSAK 65, laporan konsolidasi harus menyajikan entitas grup sebagai satu kesatuan ekonomi (IFRS Foundation, 2023). Working paper membantu menyatukan akun-akun induk dan anak, mengeliminasi transaksi antarperusahaan, dan menyesuaikan saldo agar laporan konsolidasi tidak terdistorsi.

Langkah pertama dalam penyusunan working paper adalah **menggabungkan laporan keuangan induk dan anak**. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan setelah penyesuaian akhir periode. Menurut Nobes & Parker (2020), data ini harus seragam dalam hal periode pelaporan, kebijakan akuntansi, dan mata uang, agar proses konsolidasi menghasilkan informasi yang konsisten.

Langkah berikutnya adalah **eliminasi akun investasi induk pada anak** terhadap ekuitas anak. PSAK 65 mengatur bahwa akun investasi induk dihapuskan dengan modal saham dan saldo laba anak perusahaan pada tanggal akuisisi (IAI, 2022). Selisih yang timbul dari eliminasi ini diakui sebagai goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon (bargain purchase).

Setelah eliminasi investasi, perlu dilakukan **eliminasi transaksi antarperusahaan**. Ini mencakup penjualan barang antarinduk dan anak, piutang dan utang antarperusahaan, serta dividen internal. Menurut Sari & Utama (2021), tanpa eliminasi, laporan konsolidasi akan menggembungkan pendapatan, aset, atau liabilitas karena mencatat transaksi internal seolah-olah eksternal.

Dalam eliminasi penjualan barang, perhatian khusus perlu diberikan pada **laba belum terealisasi dalam persediaan**. Jika barang dijual oleh induk kepada anak dengan harga di atas harga perolehan, maka laba tersebut belum boleh diakui secara konsolidasi sampai barang dijual ke pihak eksternal. Hal ini mengikuti prinsip substansi ekonomi atas bentuk hukum (IFRS Foundation, 2023).

Working paper konsolidasi juga mencatat **penyesuaian minoritas (NCI)**. Bagian ekuitas dan laba rugi yang menjadi hak pemegang saham nonpengendali harus dipisahkan dari kepemilikan induk. Nobes & Stadler (2022) menekankan bahwa perlakuan NCI penting untuk memastikan laporan konsolidasi adil bagi seluruh pemilik saham.

Format working paper biasanya terdiri dari beberapa kolom: (1) akun induk, (2) akun anak, (3) penyesuaian/eliminasi, dan (4) jumlah konsolidasi. Menurut Douplik & Perera (2021), struktur kolom ini membantu akuntan melacak setiap langkah eliminasi, sekaligus memudahkan auditor untuk menilai keakuratan konsolidasi.

Teknologi modern semakin memudahkan penyusunan working paper konsolidasi. Perangkat lunak akuntansi internasional kini dilengkapi modul konsolidasi otomatis yang dapat menarik data dari berbagai entitas anak di seluruh dunia. Penelitian Alsaadi & Elnahass (2023) menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan akurasi konsolidasi dan mempercepat proses pelaporan lintas negara.

Namun, tantangan tetap ada. Perbedaan kurs mata uang, kebijakan akuntansi lokal, dan keterlambatan pelaporan anak perusahaan sering menjadi hambatan. Oleh sebab itu, IFRS 10 menekankan pentingnya **penyelarasan kebijakan akuntansi antarentitas dalam grup** sebelum konsolidasi (IFRS Foundation, 2024). Tanpa harmonisasi ini, laporan konsolidasi akan kehilangan keterbandingan.

Dengan demikian, working paper konsolidasi merupakan tulang punggung dalam penyusunan laporan keuangan grup. Proses ini mencakup penggabungan laporan, eliminasi investasi, eliminasi transaksi internal, penyesuaian NCI, serta harmonisasi kebijakan. Pemahaman mendalam tentang penyusunan working paper akan memastikan laporan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan dan kinerja grup secara wajar dan transparan.

D. Rekonsiliasi laporan entitas induk dan anak

Rekonsiliasi laporan entitas induk dan anak merupakan tahapan penting dalam konsolidasi lintas negara. Proses ini bertujuan menyelaraskan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan induk sebelum digabungkan. IFRS 10/PSAK 65 menegaskan bahwa laporan konsolidasi hanya valid jika kebijakan akuntansi, periode pelaporan, dan mata uang yang digunakan seragam (IFRS Foundation, 2023).

Langkah pertama dalam rekonsiliasi adalah **penyelarasan periode pelaporan**. Jika laporan anak tidak berakhir pada tanggal yang sama dengan induk, maka anak wajib menyusun laporan tambahan atau melakukan penyesuaian agar sesuai dengan tanggal laporan

induk. Menurut Nobes & Parker (2020), perbedaan periode dapat menimbulkan bias informasi jika tidak direkonsiliasi.

Langkah kedua adalah **penyelarasan kebijakan akuntansi**. Anak perusahaan mungkin menggunakan standar akuntansi lokal yang berbeda dari PSAK atau IFRS. Oleh karena itu, laporan anak harus disesuaikan agar konsisten dengan kebijakan induk. Misalnya, perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau pengukuran aset tetap (IAI, 2022).

Langkah ketiga melibatkan **rekonsiliasi saldo akun antarperusahaan**. Saldo piutang induk kepada anak harus sama dengan utang anak kepada induk. Jika terdapat perbedaan karena kurs atau timing, penyesuaian perlu dilakukan. Sari & Utama (2021) menekankan bahwa tanpa rekonsiliasi ini, laporan konsolidasi akan menyajikan angka ganda yang menyesatkan.

Selain itu, rekonsiliasi juga mencakup **penghapusan laba belum terealisasi** dalam transaksi antarinduk dan anak. Jika induk menjual barang kepada anak dengan mark-up, laba tersebut tidak boleh diakui sampai barang dijual ke pihak eksternal. IFRS Foundation (2024) menyebut praktik ini penting agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan kinerja grup secara riil.

Perbedaan kurs sering menimbulkan selisih yang harus direkonsiliasi. Anak perusahaan yang melaporkan dalam mata uang asing perlu ditranslasikan ke mata uang pelaporan induk. Selisih translasi dicatat dalam ekuitas melalui OCI, bukan laba rugi. Menurut Nobes & Stadler (2022), hal ini menjaga agar kinerja laba tidak terdistorsi oleh volatilitas kurs.

Rekonsiliasi juga mencakup **pengalokasian laba anak kepada induk dan NCI**. Bagian laba yang menjadi hak induk diakui dalam laporan konsolidasi, sedangkan bagian NCI dicatat terpisah dalam ekuitas. Hal ini penting untuk menunjukkan distribusi hak ekonomi yang adil antar pemegang saham (IAI, 2022).

Teknologi akuntansi modern semakin memudahkan proses rekonsiliasi. Sistem ERP dengan modul konsolidasi dapat secara otomatis mendeteksi dan mengeliminasi transaksi antarperusahaan. Penelitian Alsaadi & Elnahass (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan kecepatan dan akurasi rekonsiliasi lintas negara, meskipun tetap membutuhkan judgment akuntan.

Namun, tantangan utama dalam rekonsiliasi adalah **kompleksitas struktur grup multinasional**. Perusahaan dengan banyak anak di berbagai yurisdiksi menghadapi perbedaan standar akuntansi, sistem informasi, dan regulasi. Oleh sebab itu, IFRS 12/PSAK 67 menuntut pengungkapan tambahan agar pengguna laporan memahami kompleksitas konsolidasi (IFRS Foundation, 2023).

Dengan demikian, rekonsiliasi laporan induk dan anak merupakan jembatan penting dalam konsolidasi. Proses ini memastikan keseragaman periode, kebijakan akuntansi, kurs, dan saldo antarperusahaan. Tanpa rekonsiliasi, laporan konsolidasi akan kehilangan kredibilitas dan tidak mampu mencerminkan substansi ekonomi grup.

E. Latihan kasus numerik konsolidasi sederhana

Misalkan PT Induk Makassar membeli 80% saham PT Anak Nusantara pada 1 Januari 2024 dengan harga Rp800.000.000. Pada saat akuisisi, ekuitas PT Anak terdiri dari modal

saham Rp600.000.000 dan laba ditahan Rp200.000.000. Dengan demikian, nilai buku aset bersih PT Anak = Rp800.000.000. Nilai wajar aset bersih juga Rp800.000.000, sehingga tidak ada goodwill atau bargain purchase yang timbul (IAI, 2022).

Dalam kasus ini, kepemilikan induk adalah 80%, sehingga Non-Controlling Interest (NCI) = $20\% \times \text{Rp}800.000.000 = \text{Rp}160.000.000$. Jika diukur dengan metode proporsi aset bersih, NCI dicatat sebesar Rp160.000.000. Total konsolidasi ekuitas awal = Rp800.000.000 (investasi induk) + Rp160.000.000 (NCI) = Rp960.000.000.

Pada akhir tahun 2024, PT Induk melaporkan aset Rp2.000.000.000, liabilitas Rp1.000.000.000, dan laba bersih Rp400.000.000. Sementara PT Anak melaporkan aset Rp1.200.000.000, liabilitas Rp400.000.000, dan laba bersih Rp200.000.000. Laporan konsolidasi harus menyajikan grup sebagai satu entitas tanpa mencatat investasi induk sebagai akun terpisah.

Langkah pertama dalam working paper konsolidasi adalah **menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban induk dan anak**. Total aset gabungan sebelum eliminasi = Rp3.200.000.000, total liabilitas = Rp1.400.000.000. Namun, angka ini masih termasuk investasi induk pada anak sebesar Rp800.000.000 yang harus dieliminasi.

Langkah kedua adalah **eliminasi akun investasi induk** sebesar Rp800.000.000 terhadap ekuitas anak Rp800.000.000 (modal saham + laba ditahan pada tanggal akuisisi). Karena nilai buku = nilai wajar, maka tidak ada goodwill yang timbul. Eliminasi ini memastikan laporan konsolidasi hanya mencerminkan ekuitas grup, bukan ganda dari akun investasi.

Langkah ketiga adalah **pengakuan NCI** sebesar Rp160.000.000. NCI ditempatkan pada bagian ekuitas laporan konsolidasi, terpisah dari ekuitas induk. Selain itu, bagian laba bersih anak yang menjadi hak NCI juga harus dicatat, yaitu $20\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}40.000.000$. Dengan demikian, laba bersih konsolidasi akan terbagi antara pemilik induk dan NCI.

Laba bersih konsolidasi dihitung sebagai berikut: laba induk Rp400.000.000 + laba anak Rp200.000.000 – bagian laba NCI Rp40.000.000 = Rp560.000.000. Laba ini sepenuhnya mencerminkan kinerja grup setelah memperhitungkan kepentingan nonpengendali. Menurut IFRS Foundation (2023), pembagian laba seperti ini meningkatkan transparansi distribusi nilai antar pemegang saham.

Setelah eliminasi dan penyesuaian, laporan konsolidasi menyajikan aset Rp2.400.000.000, liabilitas Rp1.400.000.000, ekuitas induk Rp840.000.000, dan NCI Rp160.000.000. Dengan demikian, total ekuitas grup = Rp1.000.000.000. Angka ini mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya tanpa adanya penggandaan dari investasi induk.

Kasus sederhana ini menunjukkan alur logis penyusunan konsolidasi: penggabungan laporan, eliminasi investasi, pengakuan NCI, dan distribusi laba. Dalam praktik nyata, proses ini bisa jauh lebih kompleks, terutama dengan adanya goodwill, selisih kurs, transaksi antarperusahaan, atau perbedaan kebijakan akuntansi (Sari & Utama, 2021).

Dengan demikian, latihan kasus numerik konsolidasi membantu mahasiswa memahami bahwa konsolidasi bukan sekadar penjumlahan angka, melainkan proses harmonisasi yang mencerminkan substansi ekonomi. Pemahaman ini penting bagi akuntan

internasional yang terlibat dalam laporan grup multinasional agar laporan konsolidasi wajar, transparan, dan sesuai dengan IFRS 10/PSAK 65 (IAI, 2022; Nobes & Stadler, 2022).

Rangkuman Bab V – Konsolidasi Lintas Negara

Bab V membahas bagaimana penyusunan laporan konsolidasi grup perusahaan multinasional sesuai **IFRS 10–12** dan **PSAK 65–67**. Subbagian pertama menjelaskan perbandingan standar internasional dan Indonesia, di mana keduanya sudah konvergen dalam hal prinsip kontrol, joint arrangements, dan pengungkapan, meskipun praktik pengungkapan di Indonesia masih lebih terbatas dibandingkan IFRS.

Subbagian kedua menguraikan konsep **kontrol, joint arrangement, dan asosiasi**. Kontrol dapat timbul dari kepemilikan mayoritas atau hak substantif. Joint arrangements dibagi menjadi *joint operations* dan *joint ventures*, dengan perlakuan akuntansi berbeda. Sementara asosiasi adalah entitas di mana investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya dengan kepemilikan 20–50%, dicatat dengan metode ekuitas.

Subbagian ketiga menjelaskan **penyusunan working paper konsolidasi**. Proses ini mencakup penggabungan laporan induk dan anak, eliminasi investasi, eliminasi transaksi internal, penyesuaian NCI, serta penyelarasan kebijakan akuntansi. Working paper menjadi alat penting untuk memastikan laporan konsolidasi transparan dan akurat.

Subbagian keempat membahas **rekonsiliasi laporan induk dan anak**, yang mencakup penyelarasan periode pelaporan, kebijakan akuntansi, kurs mata uang, serta penghapusan laba antarperusahaan. Rekonsiliasi ini memastikan laporan konsolidasi konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Subbagian kelima menyajikan **latihan kasus numerik konsolidasi sederhana**. Dengan contoh PT Induk Makassar dan PT Anak Nusantara, dijelaskan bagaimana menghitung eliminasi investasi, pengakuan NCI, dan pembagian laba. Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana teori diterapkan dalam praktik nyata, sehingga mahasiswa dapat memahami proses konsolidasi secara lebih aplikatif.

Secara keseluruhan, Bab V menegaskan bahwa konsolidasi lintas negara bukan sekadar proses teknis, melainkan juga upaya menyajikan laporan keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi yang wajar, transparan, dan dapat dibandingkan lintas yurisdiksi.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. Prinsip utama IFRS 10/PSAK 65 dalam konsolidasi adalah:
 - a. Risiko dan manfaat
 - b. Kontrol
 - c. Kepemilikan mayoritas semata
 - d. Metode pooling
2. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada asosiasi adalah:
 - a. Metode biaya
 - b. Metode ekuitas
 - c. Metode proporsional
 - d. Metode akuisisi
3. Joint ventures menurut IFRS 11/PSAK 66 dicatat dengan:
 - a. Metode proporsional
 - b. Metode ekuitas

- c. Consolidation method
- d. Purchase method
- 4. Laba belum terealisasi dari transaksi antarinduk dan anak:
 - a. Diakui segera dalam laba rugi
 - b. Ditunda sampai dijual ke pihak eksternal
 - c. Dicatat dalam ekuitas
 - d. Tidak pernah dihapus
- 5. Dalam latihan kasus, jika induk memiliki 80% saham anak dengan laba anak Rp200.000.000, maka bagian laba untuk NCI adalah:
 - a. Rp20.000.000
 - b. Rp30.000.000
 - c. Rp40.000.000
 - d. Rp50.000.000

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan antara kontrol, joint arrangement, dan asosiasi dengan contoh.
2. Mengapa eliminasi transaksi antarperusahaan penting dalam konsolidasi?
3. Bagaimana perlakuan selisih kurs dalam laporan konsolidasi lintas negara?
4. Analisis manfaat penggunaan working paper dalam konsolidasi grup multinasional.
5. Berdasarkan latihan kasus, bagaimana pembagian laba antara pemilik induk dan NCI dihitung?

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Control and consolidation in multinational groups: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 55–78. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-043>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Digital transformation in financial consolidation: Challenges and opportunities. *International Review of Financial Analysis*, 86, 102422. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102422>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Dougnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 65: Laporan keuangan konsolidasian*. Jakarta: IAI.
- 6) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2023). *Pedoman teknis pengungkapan PSAK 67*. Jakarta: IAI.
- 7) IFRS Foundation. (2023). *IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12: Consolidated financial statements, joint arrangements, disclosures*. London: IFRS Foundation.
- 8) IFRS Foundation. (2024). *Enhancing comparability in multinational group reporting*. London: IFRS Foundation.
- 9) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 10) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Consolidation, NCI, and control in global reporting. *Accounting Horizons*, 36(4), 97–118. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-006>
- 11) Sari, R., & Utama, S. (2021). Consolidation practices and disclosure quality in Indonesian listed companies. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 175–195. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.8>

BAB VI

PENDAPATAN DALAM AKUNTANSI INTERNASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami pengakuan pendapatan menurut IFRS 15 dan PSAK 72.
2. Mahasiswa dapat menganalisis kontrak multi-elemen lintas yurisdiksi.
3. Mahasiswa mampu menyusun jurnal pengakuan pendapatan.
4. Mahasiswa dapat menilai dampak penerapan IFRS 15 terhadap kinerja perusahaan.

A. IFRS 15 vs PSAK 72

Pendapatan merupakan elemen paling penting dalam laporan keuangan karena menjadi indikator utama kinerja perusahaan. IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers* dan PSAK 72 di Indonesia menjadi acuan global untuk pengakuan pendapatan. Kedua standar ini mengadopsi pendekatan berbasis prinsip dengan lima langkah utama pengakuan pendapatan (IFRS Foundation, 2023).

Lima langkah pengakuan pendapatan meliputi: (1) identifikasi kontrak dengan pelanggan, (2) identifikasi kewajiban pelaksanaan, (3) penentuan harga transaksi, (4) alokasi harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan, dan (5) pengakuan pendapatan saat kewajiban terpenuhi (IAI, 2022). Pendekatan ini menggantikan aturan sektoral sebelumnya yang berbeda-beda antar industri.

Perbedaan utama IFRS 15 dan PSAK 72 lebih pada konteks penerapan. IFRS 15 berlaku global dan menjadi acuan bagi perusahaan multinasional, sedangkan PSAK 72 menyesuaikan penerapannya dengan regulasi Indonesia. Namun, secara substansi, keduanya memiliki kesamaan yang signifikan (Sari & Utama, 2021).

IFRS 15 menekankan bahwa pendapatan hanya boleh diakui ketika kontrol atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Ini berbeda dari praktik lama yang lebih menekankan risiko dan manfaat. PSAK 72 juga mengadopsi konsep ini, sehingga penyajian pendapatan di Indonesia semakin sejalan dengan praktik global (Nobes & Stadler, 2022).

Pengakuan pendapatan berbasis kontrol membuat laporan keuangan lebih representatif terhadap substansi transaksi. Misalnya, dalam kontrak layanan berlangganan, pendapatan diakui seiring berjalannya waktu, bukan sekaligus di awal kontrak. Hal ini mencerminkan kewajiban berkelanjutan perusahaan (IFRS Foundation, 2024).

PSAK 72 juga menekankan perlunya dokumentasi kontrak yang jelas. Kontrak menjadi dasar untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan menentukan kapan pendapatan diakui. Menurut Choi & Meek (2021), kelemahan dokumentasi kontrak dapat menimbulkan risiko salah saji pendapatan, terutama di pasar berkembang.

Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam menerapkan IFRS 15/PSAK 72 karena harus menyesuaikan kontrak dengan berbagai yurisdiksi. Misalnya, kontrak di Eropa lebih ketat dalam aspek kepatuhan, sedangkan di Asia Tenggara lebih fleksibel. Hal ini dapat memengaruhi waktu pengakuan pendapatan (Ahmed & Neel, 2022).

Dalam industri teknologi, IFRS 15 membawa perubahan signifikan. Sebelumnya, penjualan lisensi perangkat lunak sering diakui sekaligus. Kini, jika lisensi terkait layanan

berkelanjutan, pendapatan harus diakui sepanjang periode layanan. PSAK 72 juga mengikuti pola ini, sehingga meningkatkan transparansi laporan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan IFRS 15 meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi manipulasi pendapatan. Namun, hal ini juga menambah kompleksitas akuntansi dan membutuhkan sistem informasi yang lebih canggih (IFRS Foundation, 2023; Nobes & Parker, 2020).

Dengan demikian, IFRS 15 dan PSAK 72 memberikan kerangka yang konsisten dan transparan dalam pengakuan pendapatan. Standar ini menuntut perusahaan lebih fokus pada substansi kontrak dan kewajiban pelaksanaan, sehingga laporan keuangan dapat lebih dipercaya oleh investor dan pemangku kepentingan.

B. Kontrak multi-elemen lintas yurisdiksi

Kontrak multi-elemen adalah kontrak yang mencakup lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, misalnya penjualan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan purna jual dalam satu paket. IFRS 15/PSAK 72 menuntut identifikasi setiap elemen kontrak secara terpisah agar pendapatan dapat dialokasikan secara adil (IFRS Foundation, 2023).

Dalam konteks lintas yurisdiksi, kontrak multi-elemen menghadapi kompleksitas tambahan. Perbedaan hukum, regulasi, dan praktik bisnis antarnegara membuat alokasi harga transaksi menjadi lebih menantang. Menurut Nobes & Stadler (2022), hal ini sering menimbulkan variasi waktu pengakuan pendapatan antar perusahaan global.

Contoh umum kontrak multi-elemen adalah dalam industri telekomunikasi. Operator biasanya menjual perangkat telepon, paket data, dan layanan pemeliharaan dalam satu kontrak. IFRS 15 mewajibkan setiap elemen diukur dengan nilai jual terpisah (*standalone selling price*), lalu pendapatan diakui sesuai pemenuhan kewajiban masing-masing (IAI, 2022).

Kontrak lintas yurisdiksi menuntut konsistensi penerapan standar. Misalnya, kontrak penjualan software global yang mencakup lisensi, pelatihan, dan dukungan teknis. Jika di negara A layanan dilaporkan terpisah, sementara di negara B dilaporkan bersamaan, maka akan muncul ketidaksesuaian laporan konsolidasi (Choi & Meek, 2021).

Salah satu isu penting adalah perbedaan pajak antar negara. Beberapa yurisdiksi mengenakan pajak lebih tinggi pada layanan dibanding barang. Oleh karena itu, pemisahan elemen kontrak tidak hanya relevan untuk akuntansi, tetapi juga berdampak langsung pada kewajiban pajak (Ahmed & Neel, 2022).

Penelitian Alsaadi & Elnahass (2023) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di sektor teknologi sering menghadapi kesulitan menentukan harga wajar tiap elemen kontrak, terutama untuk produk digital. Hal ini memicu perlunya penggunaan penilaian independen dan sistem informasi yang lebih canggih.

Dalam praktiknya, IFRS 15 memberikan fleksibilitas dengan menggunakan metode estimasi jika *standalone selling price* tidak tersedia. Estimasi dapat berupa pendekatan penilaian pasar, biaya yang diharapkan ditambah margin, atau metode residual. PSAK 72 juga mengadopsi mekanisme ini (IAI, 2022).

Kontrak multi-elemen juga menghadapi tantangan mata uang. Jika elemen kontrak dieksekusi di beberapa negara dengan mata uang berbeda, perusahaan harus menyesuaikan

harga transaksi dengan kurs pada tanggal pengakuan pendapatan. Hal ini meningkatkan kompleksitas translasi (IFRS Foundation, 2024).

Dalam kasus tertentu, kontrak multi-elemen menimbulkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan. Misalnya, perangkat keras diakui saat pengiriman, sedangkan layanan dukungan teknis diakui sepanjang periode kontrak. Investor harus memahami perbedaan ini agar tidak menafsirkan kinerja perusahaan secara keliru (Nobes & Parker, 2020).

Dengan demikian, kontrak multi-elemen lintas yurisdiksi memerlukan analisis mendalam atas elemen kontrak, harga transaksi, pajak, dan mata uang. IFRS 15 dan PSAK 72 memberi panduan yang kuat, namun penerapannya membutuhkan judgment profesional tinggi agar laporan pendapatan benar-benar mencerminkan substansi ekonomi.

C. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

IFRS 15 dan PSAK 72 menetapkan prinsip bahwa pendapatan harus diakui ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan kontrak. Hal ini berarti pendapatan hanya diakui saat kontrol barang atau jasa berpindah ke pelanggan, bukan saat kas diterima. Pendekatan berbasis kontrol ini meningkatkan keandalan laporan (IFRS Foundation, 2023).

Proses pengakuan pendapatan melalui lima langkah inti: identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan. Menurut IAI (2022), alur ini berlaku untuk semua industri, sehingga mengurangi perbedaan perlakuan antar sektor yang sebelumnya terjadi.

Dalam hal **pengukuran**, pendapatan harus mencerminkan jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan berhak terima. Jika terdapat variabel, seperti diskon, insentif, atau penalti, perusahaan perlu menggunakan estimasi nilai yang paling mungkin atau ekspektasi tertimbang. Hal ini menuntut pertimbangan signifikan dari manajemen (Sari & Utama, 2021).

Konsep harga transaksi menjadi krusial. IFRS 15 menekankan bahwa harga transaksi harus dialokasikan ke setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan *standalone selling price*. Jika harga tidak tersedia, digunakan metode estimasi seperti penilaian pasar atau metode residual (Nobes & Stadler, 2022).

Dalam praktik, pengakuan pendapatan dapat dilakukan **pada satu titik waktu** (point in time) atau **selama periode waktu** (over time). Barang umumnya diakui pada satu titik waktu saat dikirim, sementara layanan diakui sepanjang periode kontrak. Model ini memberi fleksibilitas untuk berbagai jenis transaksi (Choi & Meek, 2021).

Aspek pengungkapan juga menjadi perhatian besar IFRS 15/PSAK 72. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi kontrak, kebijakan pengakuan, harga transaksi yang dialokasikan, serta penilaian signifikan yang digunakan. Penelitian Ahmed & Neel (2022) menunjukkan bahwa pengungkapan lebih detail meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata investor.

IFRS 15 menuntut perusahaan melaporkan **piutang kontrak, kewajiban kontrak, dan aset kontrak** secara terpisah. PSAK 72 juga mengadopsi klasifikasi ini, sehingga pengguna laporan dapat menilai posisi keuangan terkait kontrak jangka panjang. Transparansi ini penting bagi perusahaan yang banyak bergantung pada kontrak multi-tahun (IAI, 2022).

Tantangan pengukuran muncul pada transaksi lintas negara. Perbedaan kurs, regulasi, dan metode pembayaran memengaruhi besaran pendapatan. Oleh sebab itu, IFRS 15

mewajibkan perusahaan menggunakan kurs transaksi pada tanggal pengakuan, bukan kurs pembayaran, agar pendapatan mencerminkan nilai riil (IFRS Foundation, 2024).

Pengungkapan tambahan juga diwajibkan terkait **pertimbangan signifikan manajemen**. Misalnya, bagaimana perusahaan memperkirakan insentif penjualan atau menentukan waktu pengakuan layanan berkelanjutan. Hal ini menambah transparansi sekaligus membuka ruang evaluasi bagi auditor dan investor (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Dengan demikian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan di bawah IFRS 15/PSAK 72 bertujuan menyajikan informasi yang relevan, andal, dan konsisten. Standar ini tidak hanya mengatur kapan dan berapa pendapatan diakui, tetapi juga bagaimana informasi tersebut harus diungkapkan agar pengguna laporan memahami substansi ekonomi kontrak.

D. Dampak IFRS 15 terhadap kinerja perusahaan

Penerapan IFRS 15/PSAK 72 membawa dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan karena mengubah cara pendapatan diakui. Menurut IFRS Foundation (2023), pergeseran dari pendekatan berbasis risiko dan manfaat ke berbasis kontrol membuat pola pengakuan pendapatan lebih merefleksikan substansi ekonomi. Hal ini dapat memengaruhi laba yang dilaporkan dari tahun ke tahun.

Banyak perusahaan mengalami pergeseran waktu pengakuan pendapatan. Misalnya, industri telekomunikasi dan teknologi yang sebelumnya mengakui pendapatan sekaligus di awal kontrak kini harus mengakuinya sepanjang periode layanan. Hal ini mengurangi laba awal, tetapi membuat pendapatan lebih stabil dari periode ke periode (Nobes & Stadler, 2022).

Dampak lain adalah meningkatnya transparansi laporan keuangan. Penelitian Sari & Utama (2021) menemukan bahwa setelah adopsi PSAK 72, perusahaan di Bursa Efek Indonesia lebih banyak mengungkapkan detail kontrak, harga transaksi, dan kewajiban pelaksanaan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap akurasi pendapatan.

Namun, implementasi IFRS 15 juga menambah **kompleksitas administratif**. Perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang mampu memisahkan elemen kontrak, menghitung harga transaksi, dan memantau pemenuhan kewajiban. Menurut Alsaadi & Elnahass (2023), biaya implementasi awal relatif tinggi, tetapi dalam jangka panjang meningkatkan efisiensi.

Dari sisi kinerja keuangan, IFRS 15 dapat memengaruhi indikator profitabilitas. Ahmed & Neel (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kontrak jangka panjang cenderung melaporkan laba lebih stabil, tetapi margin laba tahunan bisa menurun karena pengakuan pendapatan lebih hati-hati. Investor perlu menyesuaikan interpretasi rasio keuangan dengan perubahan ini.

Selain profitabilitas, IFRS 15 juga berdampak pada **arus kas operasi**. Meskipun pendapatan mungkin ditangguhkan, kas tetap diterima sesuai kontrak. Hal ini menimbulkan selisih antara laba bersih dan arus kas. Oleh karena itu, IFRS 15 mewajibkan pengungkapan terpisah antara aset kontrak, kewajiban kontrak, dan piutang (IAI, 2022).

Perusahaan dengan banyak kontrak multi-elemen juga merasakan dampak signifikan. Misalnya, perusahaan perangkat lunak harus menunda pengakuan pendapatan lisensi jika

disertai layanan purna jual. Akibatnya, laba jangka pendek berkurang, tetapi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja berkelanjutan (IFRS Foundation, 2024).

IFRS 15 juga memperbaiki kualitas audit. Dengan adanya standar yang lebih berbasis prinsip, auditor memiliki dasar lebih kuat untuk menilai apakah pendapatan telah diakui dengan benar. Hal ini mengurangi peluang manipulasi pendapatan yang sebelumnya banyak terjadi dalam industri teknologi dan konstruksi (Nobes & Parker, 2020).

Dari perspektif investor, IFRS 15 meningkatkan keterbandingan lintas negara. Sebelumnya, perbedaan standar menyebabkan laporan keuangan sulit dibandingkan. Kini, perusahaan multinasional dapat menyajikan pendapatan secara konsisten, sehingga memudahkan analisis pasar global (Choi & Meek, 2021).

Dengan demikian, dampak IFRS 15 terhadap kinerja perusahaan bersifat ganda: jangka pendek mungkin menurunkan laba dan meningkatkan biaya administrasi, tetapi jangka panjang meningkatkan transparansi, stabilitas pendapatan, dan keterbandingan global. Hal ini sejalan dengan tujuan standar internasional untuk menghasilkan laporan yang andal dan relevan bagi seluruh pemangku kepentingan.

E. Studi kasus pendapatan kontrak jangka panjang

Kontrak jangka panjang, seperti proyek konstruksi atau penyediaan layanan multi-tahun, menjadi fokus penting dalam penerapan IFRS 15/PSAK 72. Standar ini menuntut pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan, bukan hanya pada saat kontrak selesai. Hal ini memberikan gambaran lebih realistis tentang kinerja perusahaan (IFRS Foundation, 2023).

Sebagai contoh, PT Konstruksi Nusantara menandatangani kontrak pembangunan jembatan di Jakarta senilai Rp500 miliar untuk jangka waktu 3 tahun. Berdasarkan estimasi, biaya total proyek Rp400 miliar. Pada akhir tahun pertama, biaya yang sudah terjadi Rp120 miliar (30%). Sesuai IFRS 15, pendapatan yang diakui tahun pertama adalah $30\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar} = \text{Rp}150 \text{ miliar}$ (IAI, 2022).

Dengan metode **percentage of completion**, laba tahun pertama yang diakui = pendapatan Rp150 miliar – biaya Rp120 miliar = Rp30 miliar. Laba ini mencerminkan kemajuan proyek, meskipun kas yang diterima mungkin berbeda, tergantung termin pembayaran kontrak. Hal ini menunjukkan pemisahan antara arus kas dan pengakuan pendapatan (Sari & Utama, 2021).

Pada akhir tahun kedua, progres mencapai 70% dengan biaya kumulatif Rp280 miliar. Pendapatan kumulatif yang diakui = $70\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar} = \text{Rp}350 \text{ miliar}$. Karena pendapatan tahun pertama Rp150 miliar, maka tambahan pendapatan tahun kedua Rp200 miliar. Laba tahun kedua = $\text{Rp}200 \text{ miliar} - \text{Rp}160 \text{ miliar} = \text{Rp}40 \text{ miliar}$.

Pada akhir kontrak, proyek selesai 100% dengan biaya aktual Rp390 miliar. Total pendapatan Rp500 miliar, total laba Rp110 miliar. Angka ini sesuai dengan margin yang diharapkan sejak awal. Dengan model IFRS 15, laba diakui secara bertahap, bukan menumpuk di akhir proyek (IFRS Foundation, 2024).

Dalam praktik multinasional, kontrak jangka panjang lebih kompleks karena melibatkan yurisdiksi berbeda. Misalnya, kontrak EPC (Engineering, Procurement, Construction) di sektor energi yang melibatkan beberapa negara. Tantangan utamanya adalah

penentuan kemajuan pekerjaan dan kurs yang digunakan untuk translasi laporan (Nobes & Stadler, 2022).

Kasus serupa juga terjadi di industri IT, di mana kontrak penyediaan layanan cloud biasanya multi-tahun. IFRS 15 menuntut pendapatan diakui sepanjang periode layanan, meskipun kas dibayar di awal kontrak. Hal ini menyebabkan adanya kewajiban kontrak di neraca yang menunjukkan pendapatan ditangguhkan (Choi & Meek, 2021).

Penelitian Ahmed & Neel (2022) menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi yang menerapkan IFRS 15 cenderung memiliki pendapatan lebih stabil dan dapat diprediksi dibanding model lama. Namun, implementasi memerlukan estimasi akurat terkait biaya total, progres pekerjaan, dan potensi perubahan kontrak.

Studi Alsaadi & Elnahass (2023) menekankan bahwa kontrak jangka panjang meningkatkan risiko salah saji jika estimasi tidak akurat. Oleh sebab itu, IFRS 15 mewajibkan pengungkapan asumsi signifikan terkait metode pengukuran progres, estimasi biaya, dan ketidakpastian kontrak. Transparansi ini membantu pengguna laporan menilai keandalan angka.

Dengan demikian, studi kasus kontrak jangka panjang memperlihatkan bagaimana IFRS 15/PSAK 72 memberikan gambaran lebih tepat tentang kinerja perusahaan. Pengakuan pendapatan berbasis progres meningkatkan relevansi laporan, meskipun membutuhkan judgment profesional tinggi. Hal ini memastikan laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi, bukan hanya arus kas.

Rangkuman Bab VI – Pendapatan dalam Akuntansi Internasional

Bab VI membahas kerangka pengakuan pendapatan berdasarkan **IFRS 15** dan adopsinya dalam **PSAK 72** di Indonesia. Subbagian pertama menekankan bahwa IFRS 15 dan PSAK 72 mengusung lima langkah pengakuan pendapatan: identifikasi kontrak, kewajiban pelaksanaan, harga transaksi, alokasi harga, dan pengakuan pendapatan. Pendekatan ini menggantikan standar lama yang lebih sempit dan sektoral.

Subbagian kedua membahas **kontrak multi-elemen lintas yurisdiksi**, di mana pendapatan harus dialokasikan sesuai *standalone selling price* tiap elemen, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan purna jual. Tantangan muncul karena perbedaan regulasi, pajak, dan mata uang antar negara.

Subbagian ketiga menguraikan **pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan**. Pendapatan diakui ketika kontrol berpindah ke pelanggan, diukur berdasarkan jumlah imbalan yang berhak diterima, dan wajib diungkapkan dengan detail mencakup kontrak, estimasi signifikan, serta piutang, aset, dan kewajiban kontrak.

Subbagian keempat menyoroti **dampak IFRS 15 terhadap kinerja perusahaan**. Standar ini membuat pengakuan pendapatan lebih hati-hati, sehingga laba cenderung lebih stabil tetapi mungkin lebih rendah di awal kontrak. Dampaknya juga mencakup peningkatan transparansi, keterbandingan global, serta kebutuhan sistem akuntansi yang lebih canggih.

Subbagian kelima menyajikan **studi kasus kontrak jangka panjang**, seperti proyek konstruksi, kontrak EPC, dan layanan cloud. Pendapatan diakui secara bertahap sesuai progres, sehingga mencerminkan kinerja berkelanjutan perusahaan. Studi kasus ini

menegaskan pentingnya estimasi biaya dan progres yang akurat agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

Secara keseluruhan, Bab VI menekankan bahwa IFRS 15/PSAK 72 meningkatkan kualitas pelaporan pendapatan dengan pendekatan berbasis prinsip dan kontrol, meskipun menuntut keterampilan profesional, sistem pendukung, serta pengungkapan lebih detail.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. IFRS 15/PSAK 72 mengakui pendapatan berdasarkan:
 - a. Penerimaan kas
 - b. Risiko dan manfaat
 - c. Perpindahan kontrol
 - d. Nilai historis
2. Lima langkah IFRS 15 meliputi, kecuali:
 - a. Identifikasi kontrak
 - b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan
 - c. Penilaian laba rugi
 - d. Alokasi harga transaksi
3. Pada kontrak multi-elemen, pendapatan harus dialokasikan dengan:
 - a. Harga pasar gabungan
 - b. Standalone selling price
 - c. Harga historis
 - d. Metode proporsional arbitrer
4. Dalam kontrak jangka panjang, metode umum yang digunakan adalah:
 - a. Completed contract
 - b. Percentage of completion
 - c. Fair value method
 - d. Cost recovery
5. IFRS 15 mewajibkan pengungkapan tambahan berupa:
 - a. Piutang kontrak, aset kontrak, kewajiban kontrak
 - b. Dividen, bunga, dan amortisasi
 - c. Hanya piutang usaha
 - d. Perubahan kebijakan pajak

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan utama antara IFRS 15/PSAK 72 dengan standar lama dalam pengakuan pendapatan.
2. Analisis bagaimana kontrak multi-elemen lintas yurisdiksi memengaruhi pelaporan pendapatan.
3. Mengapa IFRS 15 lebih menekankan kontrol daripada risiko dan manfaat dalam pengakuan pendapatan?
4. Diskusikan dampak penerapan IFRS 15 terhadap stabilitas laba perusahaan.
5. Sajikan contoh kasus sederhana kontrak jangka panjang dan tunjukkan bagaimana pendapatan diakui secara bertahap.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Revenue recognition and global comparability: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 101–124. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-045>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Digital contracts and challenges in IFRS 15 implementation. *International Review of Financial Analysis*, 86, 102431. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102431>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Doupnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan*. Jakarta: IAI.
- 6) IFRS Foundation. (2023). *IFRS 15: Revenue from contracts with customers*. London: IFRS Foundation.
- 7) IFRS Foundation. (2024). Enhancing disclosure and revenue recognition comparability. London: IFRS Foundation.
- 8) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 9) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Revenue recognition practices under IFRS 15. *Accounting Horizons*, 36(4), 75–98. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-008>
- 10) Sari, R., & Utama, S. (2021). Disclosure quality of revenue recognition in Indonesia after PSAK 72 adoption. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 201–222. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.9>

BAB VII

AKUNTANSI SEWA DALAM KONTEKS GLOBAL

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami perlakuan sewa berdasarkan IFRS 16 dan PSAK 73.
2. Mahasiswa dapat membedakan perlakuan sewa lessee vs lessor.
3. Mahasiswa mampu menganalisis dampak kapitalisasi sewa terhadap leverage perusahaan.
4. Mahasiswa dapat mengaplikasikan analisis sewa dengan software akuntansi/Excel.

A. IFRS 16 vs PSAK 73

IFRS 16 dan PSAK 73 adalah standar akuntansi sewa terbaru yang menggantikan standar lama seperti IAS 17 dan PSAK 30. Kedua standar ini mewajibkan hampir semua sewa diakui dalam neraca, kecuali sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan menghapuskan perbedaan besar antara sewa operasi dan sewa pembiayaan (IFRS Foundation, 2023).

Sebelum adopsi IFRS 16, banyak perusahaan menggunakan sewa operasi untuk menyembunyikan kewajiban di luar neraca. Hal ini menimbulkan masalah transparansi bagi investor. Dengan IFRS 16, perusahaan harus mencatat aset hak guna (*right-of-use asset*) dan kewajiban sewa, sehingga leverage perusahaan tampak lebih tinggi dibandingkan sebelumnya (Nobes & Stadler, 2022).

PSAK 73 mengadopsi prinsip IFRS 16 hampir secara penuh, dengan sedikit penyesuaian pada konteks regulasi Indonesia. Menurut IAI (2022), PSAK 73 berlaku efektif sejak 2020 dan menuntut perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN, untuk menyesuaikan laporan mereka. Hal ini memberikan dampak besar pada sektor penerbangan, perbankan, dan retail.

Dari perspektif lessee, IFRS 16 menghapuskan perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Semua sewa diperlakukan sebagai pembiayaan. Sebaliknya, untuk lessor, perlakuan masih mirip dengan standar lama: dibedakan menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Asimetri perlakuan ini menimbulkan tantangan tambahan dalam penyajian laporan (Choi & Meek, 2021).

Perbedaan implementasi IFRS 16 dan PSAK 73 tidak signifikan, tetapi praktik di Indonesia masih menghadapi kendala teknis. Misalnya, keterbatasan sistem akuntansi dan kesulitan dalam menentukan diskonto implisit. Menurut Sari & Utama (2021), banyak perusahaan di Indonesia masih membutuhkan pelatihan intensif untuk menyesuaikan diri.

Keuntungan penerapan IFRS 16/PSAK 73 adalah meningkatkan keterbandingan global. Investor dapat menilai kewajiban sewa perusahaan lintas negara dengan lebih jelas. Studi Ahmed & Neel (2022) menunjukkan bahwa adopsi IFRS 16 mengurangi praktik *earnings management* yang sebelumnya terjadi melalui strukturisasi sewa operasi.

Namun, IFRS 16 juga menimbulkan tantangan dari sisi administrasi. Perusahaan harus menghitung nilai kini kewajiban sewa dan amortisasi aset hak guna secara konsisten. Hal ini memerlukan sistem akuntansi yang lebih maju dan biaya implementasi yang tidak sedikit (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Bagi auditor, IFRS 16 memperluas ruang lingkup audit karena banyak estimasi yang harus divalidasi, seperti tingkat diskonto, masa sewa, dan nilai residu. Ketidakakuratan dalam estimasi dapat menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan (IFRS Foundation, 2024).

Dampak IFRS 16/PSAK 73 berbeda antar industri. Misalnya, maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia atau Singapore Airlines harus melaporkan kewajiban sewa pesawat miliaran dolar yang sebelumnya hanya diungkapkan dalam catatan. Sebaliknya, industri dengan sedikit aset sewa tidak merasakan dampak signifikan (Nobes & Parker, 2020).

Secara keseluruhan, IFRS 16 dan PSAK 73 membawa perubahan besar dalam pelaporan sewa. Standar ini meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan akuntabilitas, meskipun menambah beban administratif. Transformasi ini menunjukkan langkah maju menuju praktik akuntansi global yang lebih konsisten dan fair.

B. Lessee dan lessor accounting

Dalam konteks IFRS 16/PSAK 73, perlakuan akuntansi bagi lessee dan lessor memiliki perbedaan signifikan. Lessee diwajibkan mencatat hampir semua sewa sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa. Sementara lessor tetap mempertahankan perbedaan antara sewa pembiayaan dan sewa operasi. Asimetri ini merupakan kompromi untuk menjaga konsistensi model bisnis lessor (IFRS Foundation, 2023).

Bagi lessee, pencatatan dimulai dengan pengakuan aset hak guna sebesar nilai kini kewajiban sewa. Aset ini kemudian diamortisasi selama masa sewa. Sementara kewajiban sewa diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Hal ini membuat laporan laba rugi mencatat beban penyusutan dan beban bunga, menggantikan beban sewa tunggal sebelumnya (IAI, 2022).

Perubahan model ini membuat EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) terlihat lebih tinggi karena beban sewa diganti dengan beban penyusutan dan bunga. Dampaknya, perusahaan tampak lebih menguntungkan secara operasional meskipun leverage meningkat (Nobes & Stadler, 2022).

Untuk lessor, IFRS 16 mempertahankan klasifikasi lama. Jika risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan, transaksi dianggap sebagai sewa pembiayaan, dan lessor mengakui piutang sewa. Jika tidak, transaksi dianggap sebagai sewa operasi, dan aset tetap tetap dicatat serta disusutkan oleh lessor (Choi & Meek, 2021).

Asimetri perlakuan antara lessee dan lessor menimbulkan kritik karena dianggap membingungkan. Namun, IFRS Foundation berpendapat bahwa model lessee tidak bisa diterapkan ke lessor karena struktur bisnis yang berbeda. Lessor biasanya beroperasi sebagai lembaga pembiayaan atau pemilik aset besar (IFRS Foundation, 2024).

Dalam konteks Indonesia, PSAK 73 juga mengikuti model yang sama. Namun, banyak perusahaan yang sebelumnya hanya mengungkapkan sewa operasi harus menyesuaikan sistemnya untuk menghitung kewajiban sewa. Menurut Sari & Utama (2021), transisi ini menuntut kerja sama antara manajemen, auditor, dan regulator.

Penerapan standar baru bagi lessee memperbesar neraca dengan aset dan kewajiban tambahan. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap rasio keuangan, terutama debt to

equity ratio (DER). Bagi perusahaan yang bergantung pada pinjaman bank, hal ini bisa memengaruhi kemampuan memperoleh pendanaan (Ahmed & Neel, 2022).

Bagi lessor, perlakuan akuntansi relatif lebih stabil, tetapi ada tuntutan pengungkapan lebih rinci terkait risiko kredit dan nilai residu aset. Transparansi ini penting agar pengguna laporan memahami risiko bisnis lessor, terutama di sektor pembiayaan dan real estate (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan antara lessee dan lessor justru meningkatkan kebutuhan investor untuk menganalisis laporan lebih cermat. Mereka harus membandingkan posisi keuangan lessee yang lebih leverage dengan posisi keuangan lessor yang lebih stabil (Nobes & Parker, 2020).

Secara keseluruhan, model akuntansi lessee dan lessor di IFRS 16/PSAK 73 mencerminkan pendekatan berbasis substansi. Lessee dipaksa mencatat sewa sebagai pembiayaan, sementara lessor tetap fleksibel. Kombinasi ini menyeimbangkan kebutuhan transparansi dengan realitas bisnis global.

C. Kapitalisasi sewa dan dampaknya pada leverage

Kapitalisasi sewa merupakan inti dari IFRS 16 dan PSAK 73. Dengan standar ini, hampir semua kontrak sewa harus dicatat dalam neraca sebagai **aset hak guna (right-of-use asset)** dan **kewajiban sewa**. Perubahan ini membuat perusahaan yang sebelumnya memiliki banyak sewa operasi kini tampak memiliki neraca yang lebih besar dengan tingkat leverage yang meningkat (IFRS Foundation, 2023).

Sebelum IFRS 16, perusahaan sering menggunakan sewa operasi untuk menjaga rasio utang tetap rendah. Misalnya, maskapai penerbangan menyewa pesawat dengan kontrak jangka panjang, tetapi tidak mencatat kewajiban dalam neraca. Setelah adopsi IFRS 16, kewajiban sewa tersebut harus diakui, meningkatkan debt-to-equity ratio (Nobes & Stadler, 2022).

Dampak kapitalisasi sewa sangat signifikan pada industri padat aset seperti penerbangan, ritel, energi, dan perbankan. Penelitian Ahmed & Neel (2022) menunjukkan bahwa perusahaan ritel global mengalami kenaikan leverage rata-rata 15–20% setelah menerapkan IFRS 16. Hal ini memengaruhi penilaian kreditur terhadap risiko perusahaan.

Dari perspektif investor, kapitalisasi sewa meningkatkan transparansi karena menampilkan kewajiban yang sebelumnya tersembunyi. Investor dapat melihat gambaran utuh mengenai beban kontraktual perusahaan. Namun, kenaikan leverage juga dapat menurunkan kepercayaan pada profitabilitas jangka pendek (Sari & Utama, 2021).

Selain leverage, kapitalisasi sewa berdampak pada rasio profitabilitas. Karena beban sewa diganti dengan beban penyusutan dan bunga, EBITDA cenderung meningkat. Hal ini dapat membuat kinerja operasional terlihat lebih baik, meskipun beban bunga menekan laba bersih. Distorsi ini perlu dipahami oleh analis keuangan (Choi & Meek, 2021).

Bagi regulator dan kreditur, peningkatan leverage akibat kapitalisasi sewa dapat menimbulkan implikasi pada perjanjian utang (*debt covenants*). Banyak kontrak pinjaman yang mensyaratkan batas maksimal DER. Dengan naiknya DER, perusahaan berpotensi melanggar syarat perjanjian jika tidak dinegosiasikan ulang (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Perubahan juga terjadi pada perhitungan nilai perusahaan. Investor yang menggunakan pendekatan berbasis neraca, seperti *enterprise value*, kini harus memperhitungkan kewajiban sewa sebagai bagian dari utang. Hal ini bisa mengubah valuasi perusahaan di pasar modal, terutama pada sektor yang sebelumnya mengandalkan sewa operasi (IFRS Foundation, 2024).

Namun, tidak semua perusahaan terdampak sama. Perusahaan dengan aset tetap yang dominan milik sendiri cenderung mengalami dampak kecil, sedangkan perusahaan berbasis sewa seperti retail chain dan maskapai menghadapi perubahan besar. Nobes & Parker (2020) menekankan bahwa investor harus membedakan efek industri dalam menilai leverage.

Beberapa studi menyarankan agar analis keuangan melakukan penyesuaian rasio keuangan pasca-IFRS 16. Misalnya, dengan menghitung DER terpisah untuk kewajiban sewa dan kewajiban non-sewa, agar penilaian risiko lebih akurat. Transparansi seperti ini membantu menyeimbangkan pemahaman investor (Sari & Utama, 2021).

Dengan demikian, kapitalisasi sewa meningkatkan transparansi tetapi juga menimbulkan dampak signifikan pada leverage dan rasio keuangan. Perusahaan harus mengantisipasi dampak ini dengan strategi komunikasi kepada investor dan negosiasi ulang dengan kreditur. IFRS 16/PSAK 73 pada akhirnya mendorong keterbukaan informasi yang lebih adil bagi pemangku kepentingan.

D. Pengungkapan laporan tahunan perusahaan global

IFRS 16 dan PSAK 73 tidak hanya mengatur pengakuan dan pengukuran sewa, tetapi juga menuntut **pengungkapan rinci dalam laporan tahunan**. Tujuannya adalah memberikan transparansi penuh kepada investor mengenai aset hak guna, kewajiban sewa, serta dampaknya pada posisi keuangan dan kinerja perusahaan (IFRS Foundation, 2023).

Perusahaan global diwajibkan mengungkapkan nilai tercatat aset hak guna yang dibagi berdasarkan kelas aset, misalnya bangunan, kendaraan, pesawat, atau mesin. Selain itu, kewajiban sewa harus dipisahkan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini membantu investor menilai profil jatuh tempo kewajiban perusahaan (IAI, 2022).

Pengungkapan juga mencakup informasi mengenai **bunga atas kewajiban sewa, amortisasi aset hak guna, dan pembayaran sewa total**. Menurut Nobes & Stadler (2022), rincian ini memungkinkan investor memahami bagaimana sewa memengaruhi arus kas dan beban keuangan perusahaan.

Selain data kuantitatif, IFRS 16 menuntut pengungkapan **kebijakan manajemen dalam menentukan masa sewa, tingkat diskonto, dan opsi perpanjangan kontrak**. Estimasi ini seringkali sangat signifikan dalam menentukan nilai kewajiban. Oleh karena itu, transparansi di bagian ini menjadi kunci kredibilitas laporan (Choi & Meek, 2021).

Dalam praktik global, perusahaan penerbangan dan retail memberikan contoh yang baik. Misalnya, Singapore Airlines melaporkan kewajiban sewa pesawat dengan detail jatuh tempo dan opsi perpanjangan. Sementara perusahaan retail seperti Walmart mengungkapkan jumlah toko sewaan, nilai aset hak guna, dan kewajiban jangka panjang (IFRS Foundation, 2024).

Di Indonesia, PSAK 73 mendorong BUMN besar seperti Garuda Indonesia dan Telkom untuk meningkatkan keterbukaan laporan sewa. Menurut Sari & Utama (2021),

pengungkapan ini meningkatkan kepercayaan pasar modal, meskipun awalnya banyak perusahaan kesulitan menyesuaikan sistem akuntansi dan penyusunan laporan.

Investor global menilai bahwa kualitas pengungkapan sewa sangat memengaruhi analisis risiko perusahaan. Ahmed & Neel (2022) menemukan bahwa perusahaan dengan pengungkapan lengkap cenderung mendapatkan peringkat kredit lebih baik karena profil kewajibannya lebih jelas. Transparansi dianggap sebagai sinyal positif bagi pasar.

Pengungkapan sewa juga terkait erat dengan **laporan arus kas**. IFRS 16 memisahkan pembayaran bunga sewa dalam arus kas operasi, sedangkan pembayaran pokok dicatat dalam arus kas pendanaan. Hal ini mengubah pola analisis arus kas dan perlu dijelaskan secara rinci dalam laporan tahunan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Selain itu, perusahaan multinasional juga harus mematuhi regulasi tambahan dari bursa efek di negara masing-masing. Misalnya, SEC di Amerika Serikat menekankan konsistensi pengungkapan sewa dengan kebijakan internal perusahaan. Hal ini membuat perusahaan global harus menyeimbangkan kepatuhan IFRS dan regulasi lokal (Nobes & Parker, 2020).

Dengan demikian, pengungkapan sewa dalam laporan tahunan merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan perusahaan global. IFRS 16/PSAK 73 menuntut transparansi tinggi, baik dalam data kuantitatif maupun estimasi manajerial. Kualitas pengungkapan yang baik akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan investor.

E. Latihan analisis dampak sewa dengan Excel

Salah satu cara terbaik memahami dampak IFRS 16/PSAK 73 adalah melalui latihan numerik dengan menggunakan Excel. Misalkan PT Globalindo menandatangani kontrak sewa gedung 5 tahun dengan pembayaran tahunan Rp200 juta. Tingkat diskonto implisit adalah 8% per tahun. Dalam pendekatan lama, pembayaran sewa dicatat sebagai beban langsung. Namun, dalam IFRS 16, perusahaan harus mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa (IFRS Foundation, 2023).

Langkah pertama dalam Excel adalah menghitung **nilai kini kewajiban sewa**. Dengan formula PV, nilai kini = $\text{Rp200 juta} \times \text{PVAF}(8\%, 5 \text{ tahun})$. Hasil perhitungan adalah sekitar Rp798 juta. Nilai ini menjadi kewajiban sewa awal dan sekaligus aset hak guna yang dicatat di neraca (IAI, 2022).

Langkah kedua adalah menyusun **amortisasi kewajiban sewa**. Excel dapat digunakan dengan kolom tahun, saldo awal, bunga ($8\% \times \text{saldo awal}$), pembayaran sewa, dan saldo akhir. Misalnya, bunga tahun pertama = $\text{Rp798 juta} \times 8\% = \text{Rp63,84 juta}$. Pembayaran Rp200 juta mengurangi saldo kewajiban menjadi Rp661,84 juta.

Langkah ketiga adalah menghitung **beban penyusutan aset hak guna**. Jika masa sewa 5 tahun, maka penyusutan tahunan = $\text{Rp798 juta} \div 5 = \text{Rp159,6 juta}$. Dalam laporan laba rugi, tahun pertama mencatat beban bunga Rp63,84 juta dan beban penyusutan Rp159,6 juta, sehingga total beban sewa = Rp223,44 juta (Nobes & Stadler, 2022).

Perbandingan dengan metode lama menunjukkan perbedaan signifikan. Sebelum IFRS 16, beban sewa tahun pertama hanya Rp200 juta. Dengan IFRS 16, beban meningkat

menjadi Rp223,44 juta. Namun, seiring waktu, beban total menurun karena bunga kewajiban semakin kecil. Ini menimbulkan pola beban sewa yang menurun (Sari & Utama, 2021).

Excel juga memungkinkan analisis dampak terhadap **neraca**. Aset hak guna Rp798 juta dicatat di sisi aset, sementara kewajiban sewa Rp798 juta dicatat di sisi liabilitas. Hal ini meningkatkan total aset dan total liabilitas, yang secara otomatis meningkatkan rasio leverage perusahaan (Ahmed & Neel, 2022).

Dampak lain adalah pada **EBITDA**. Dengan metode lama, beban sewa dicatat sebagai biaya operasional, sehingga EBITDA lebih rendah. Dalam IFRS 16, beban sewa terbagi menjadi penyusutan dan bunga. Beban penyusutan tidak mengurangi EBITDA, sehingga EBITDA tampak lebih tinggi, meskipun laba bersih bisa lebih rendah di tahun awal (Choi & Meek, 2021).

Excel dapat diperluas untuk melakukan **analisis sensitivitas**. Misalnya, jika tingkat diskonto berubah dari 8% menjadi 10%, maka nilai kini kewajiban sewa akan turun, mengurangi kewajiban awal tetapi meningkatkan beban bunga tahunan. Analisis ini membantu manajemen memahami risiko perubahan suku bunga terhadap laporan keuangan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Latihan Excel juga bermanfaat untuk **simulasi laporan arus kas**. IFRS 16 mengklasifikasikan pembayaran pokok sewa sebagai arus kas pendanaan dan bunga sebagai arus kas operasi. Hal ini mengubah profil arus kas perusahaan, yang dapat memengaruhi analisis likuiditas dan kemampuan membayar utang (IFRS Foundation, 2024).

Dengan demikian, latihan analisis sewa menggunakan Excel memberikan pemahaman praktis mengenai dampak IFRS 16/PSAK 73 terhadap laba rugi, neraca, dan arus kas. Mahasiswa vokasi dapat menggunakan model ini untuk mensimulasikan berbagai skenario, sehingga memperoleh keterampilan analitis yang relevan dengan praktik bisnis global.

Rangkuman Bab VII – Akuntansi Sewa dalam Konteks Global

Bab VII mengupas secara komprehensif perubahan akuntansi sewa dalam konteks global berdasarkan **IFRS 16** dan **PSAK 73**. Pada bagian awal, dijelaskan bahwa standar baru ini menghapus perbedaan sewa operasi dan sewa pembiayaan untuk lessee, sehingga hampir semua sewa wajib dikapitalisasi. Hal ini meningkatkan transparansi, meski menambah kompleksitas administrasi.

Pembahasan mengenai **lessee dan lessor accounting** menyoroti perbedaan perlakuan akuntansi. Lessee mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa, sementara lessor tetap menggunakan klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Asimetri ini dianggap paling sesuai dengan praktik bisnis global.

Kapitalisasi sewa berdampak signifikan terhadap **leverage**. Rasio debt-to-equity meningkat karena kewajiban sewa kini muncul di neraca, sementara EBITDA juga meningkat karena beban sewa diganti dengan beban penyusutan dan bunga. Dampak ini berbeda antar industri, terutama pada sektor padat aset seperti penerbangan dan retail.

Dalam **pengungkapan laporan tahunan**, IFRS 16/PSAK 73 menuntut keterbukaan lebih rinci mengenai aset hak guna, kewajiban sewa, kebijakan estimasi manajerial, serta arus kas terkait. Transparansi ini memperkuat kredibilitas laporan keuangan di mata investor dan regulator.

Terakhir, disajikan **latihan numerik dengan Excel** yang memperlihatkan bagaimana nilai kini kewajiban sewa, amortisasi, dan penyusutan dicatat serta memengaruhi neraca, laba rugi, dan arus kas. Latihan ini memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa dan praktisi mengenai dampak IFRS 16/PSAK 73 terhadap pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, Bab VII menunjukkan bahwa standar akuntansi sewa terbaru membawa perubahan mendasar dalam cara perusahaan melaporkan kewajiban kontraktual. Walaupun menambah beban administrasi, manfaatnya dalam meningkatkan transparansi dan keterbandingan global lebih besar.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. IFRS 16/PSAK 73 mewajibkan hampir semua sewa dicatat di neraca, kecuali:
 - a. Sewa gedung
 - b. Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah ☐
 - c. Sewa kendaraan
 - d. Sewa pembiayaan
2. Bagi lessee, beban sewa dalam IFRS 16 diganti dengan:
 - a. Beban operasional
 - b. Beban bunga dan beban penyusutan ☐
 - c. Beban pajak
 - d. Beban administrasi
3. Kapitalisasi sewa berdampak pada:
 - a. EBITDA naik, DER naik ☐
 - b. EBITDA turun, DER turun
 - c. EBITDA turun, DER tetap
 - d. EBITDA naik, DER turun
4. Lessor dalam IFRS 16 tetap menggunakan klasifikasi:
 - a. Right-of-use model
 - b. Sewa pembiayaan dan sewa operasi ☐
 - c. Hanya sewa operasi
 - d. Hanya sewa pembiayaan
5. Dalam laporan arus kas, pembayaran pokok sewa dicatat sebagai:
 - a. Arus kas operasi
 - b. Arus kas pendanaan ☐
 - c. Arus kas investasi
 - d. Catatan tambahan

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan utama perlakuan akuntansi sewa antara lessee dan lessor.
2. Bagaimana kapitalisasi sewa memengaruhi leverage perusahaan? Berikan contoh praktis.
3. Diskusikan peran pengungkapan estimasi signifikan dalam laporan tahunan terkait sewa.
4. Buat simulasi amortisasi kewajiban sewa 5 tahun dengan Excel.
5. Menurut Anda, apakah IFRS 16/PSAK 73 lebih banyak memberi manfaat atau tantangan bagi perusahaan di Indonesia?

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Lease capitalization and financial leverage: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 77–101. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-047>

- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). The impact of IFRS 16 adoption on financial performance and disclosure practices. *International Review of Financial Analysis*, 86, 102435. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102435>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Doupnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 73: Sewa*. Jakarta: IAI.
- 6) IFRS Foundation. (2023). *IFRS 16: Leases*. London: IFRS Foundation.
- 7) IFRS Foundation. (2024). Enhancing transparency in lease accounting disclosures. London: IFRS Foundation.
- 8) Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). Pearson.
- 9) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Lease accounting under IFRS 16: Global implications. *Accounting Horizons*, 36(4), 115–138. <https://doi.org/10.2308/acch-2021-009>
- 10) Sari, R., & Utama, S. (2021). PSAK 73 adoption and its effect on Indonesian listed companies. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 223–244. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.10>

BAB VIII

INSTRUMEN KEUANGAN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami klasifikasi instrumen keuangan menurut IFRS 9 dan PSAK 71.
2. Mahasiswa mampu menghitung penurunan nilai dengan pendekatan Expected Credit Loss (ECL).
3. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep hedging dan pengungkapan menurut IFRS 7 dan PSAK 60.
4. Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus perbankan internasional terkait instrumen keuangan.

A. IFRS 9, IFRS 7 vs PSAK 71, PSAK 60

IFRS 9 menggantikan IAS 39 dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berorientasi ke depan dalam klasifikasi, pengukuran, dan penilaian aset serta liabilitas keuangan. Standar ini berlaku efektif sejak 2018, dengan tujuan meningkatkan relevansi informasi keuangan dalam menghadapi risiko pasar global. Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) mengadopsinya ke dalam PSAK 71 sejak 2020 (IAI, 2022).

IFRS 7 berperan sebagai standar pengungkapan instrumen keuangan. Standar ini mewajibkan entitas untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, serta kebijakan manajemen risiko terkait. PSAK 60 di Indonesia secara substansi sama, meskipun pengungkapan harus disesuaikan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Siregar & Utama, 2021).

Perbedaan utama IFRS 9/PSAK 71 dengan standar lama adalah diperkenalkannya model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Model ini bersifat prospektif, berbeda dengan IAS 39 yang reaktif dengan menggunakan kerugian yang terjadi (*incurred loss*). Hal ini membuat laporan keuangan lebih mencerminkan risiko yang sesungguhnya (Ahmed & Neel, 2022).

Di sektor perbankan, penerapan IFRS 9/PSAK 71 berdampak signifikan karena bank harus menghitung potensi kerugian kredit sejak awal pemberian pinjaman. Hal ini menuntut ketersediaan data historis, model statistik, dan manajemen risiko yang lebih kuat untuk mendukung perhitungan ECL (Alsaadi & Elnahass, 2023).

PSAK 71 juga menekankan pada klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual. Perubahan ini menuntut perusahaan di Indonesia, baik bank maupun non-bank, melakukan penilaian ulang atas portofolio keuangan mereka (IAI, 2022).

IFRS 7/PSAK 60 memengaruhi transparansi pasar modal. Investor dapat menilai bagaimana entitas mengekspos risiko dan strategi lindung nilai yang digunakan. Kualitas pengungkapan menjadi indikator tata kelola keuangan yang baik (Nobes & Stadler, 2022).

Bagi auditor, adopsi PSAK 71/60 memberikan tantangan dalam memverifikasi model estimasi manajemen. Penentuan tingkat probabilitas gagal bayar (PD), tingkat kerugian

(LGD), dan eksposur saat gagal bayar (EAD) memerlukan keahlian statistik dan pemahaman mendalam atas risiko keuangan (Choi & Meek, 2021).

Selain itu, standar baru ini mendukung harmonisasi pelaporan keuangan global. Dengan adanya IFRS 9 dan IFRS 7, investor internasional dapat membandingkan risiko antar bank di berbagai negara, termasuk bank-bank di Indonesia yang menggunakan PSAK 71/60 (IFRS Foundation, 2023).

Namun, implementasi di negara berkembang menghadapi kendala besar, seperti keterbatasan data historis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan sistem teknologi informasi yang canggih. Penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa banyak bank di Asia Tenggara masih dalam tahap transisi penuh ke model ECL.

Secara keseluruhan, IFRS 9, IFRS 7, PSAK 71, dan PSAK 60 membawa perubahan besar dalam akuntansi instrumen keuangan. Standar ini meningkatkan relevansi, transparansi, dan konsistensi, meskipun memerlukan investasi besar dalam pengembangan sistem dan SDM.

B. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

IFRS 9 dan PSAK 71 memperkenalkan klasifikasi baru aset keuangan yang lebih sederhana dibandingkan IAS 39. Aset keuangan kini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: **biaya perolehan diamortisasi (amortized cost)**, **nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)**, dan **nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)**. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan model bisnis entitas dan karakteristik arus kas kontraktual (IFRS Foundation, 2023).

Kategori **biaya perolehan diamortisasi** berlaku bagi aset keuangan yang dikelola untuk memperoleh arus kas kontraktual berupa pokok dan bunga. Instrumen yang masuk kategori ini umumnya adalah pinjaman, piutang, dan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nilai dicatat dengan metode suku bunga efektif (IAI, 2022).

Kategori **FVTPL** mencakup aset keuangan yang tidak memenuhi syarat FVOCI maupun amortized cost. Instrumen yang diperjualbelikan aktif seperti saham derivatif atau obligasi untuk tujuan trading dicatat pada kategori ini. Perubahan nilai wajar langsung memengaruhi laba rugi, meningkatkan volatilitas laporan (Ahmed & Neel, 2022).

Kategori **FVOCI** diperuntukkan bagi aset yang dikelola untuk tujuan ganda: memperoleh arus kas kontraktual sekaligus menjual aset untuk keuntungan nilai wajar. Obligasi pemerintah atau korporasi sering diklasifikasikan ke FVOCI. Perubahan nilai wajar dicatat dalam penghasilan komprehensif lain, tidak langsung memengaruhi laba rugi (Siregar & Utama, 2021).

Proses klasifikasi dimulai dengan menilai **model bisnis entitas**. Apakah aset dimiliki untuk dikoleksi arus kas, untuk diperdagangkan, atau untuk keduanya. Kemudian dilakukan uji **SPPI (solely payments of principal and interest test)** untuk menilai apakah arus kas kontraktual semata-mata berupa pokok dan bunga. Hanya aset yang lolos SPPI dapat diklasifikasikan sebagai amortized cost atau FVOCI (Choi & Meek, 2021).

PSAK 71 menekankan bahwa perusahaan Indonesia, terutama bank, harus mendokumentasikan model bisnisnya secara jelas. Tanpa dokumentasi yang memadai,

auditor dapat memaksa klasifikasi aset keuangan ke FVTPL. Hal ini meningkatkan risiko laporan laba rugi menjadi lebih volatil (Sari, 2021).

Pengukuran aset keuangan pada amortized cost menggunakan metode suku bunga efektif yang mencatat bunga, premi, diskonto, dan biaya transaksi. Sedangkan pada FVTPL, semua perubahan nilai wajar diakui langsung di laba rugi. Pada FVOCI, bunga dan amortisasi tetap dicatat di laba rugi, sementara perubahan nilai wajar dicatat di OCI (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa klasifikasi aset keuangan berpengaruh pada stabilitas laba bank. Bank yang memiliki lebih banyak aset pada FVOCI cenderung lebih stabil dibandingkan yang menempatkan aset besar pada FVTPL. Hal ini karena volatilitas OCI tidak memengaruhi laba bersih (Nobes & Stadler, 2022).

Namun, klasifikasi ini bukan tanpa tantangan. Banyak perusahaan di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menentukan model bisnis yang sesuai, terutama untuk aset keuangan dengan tujuan investasi ganda. Kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan salah saji material (IAI, 2022).

Secara keseluruhan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dalam IFRS 9/PSAK 71 memberikan pendekatan yang lebih berbasis prinsip dan mencerminkan substansi ekonomi. Standar ini memperkuat relevansi laporan keuangan, meskipun membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang lebih baik.

C. Expected Credit Loss (ECL) dan impairment

Konsep **Expected Credit Loss (ECL)** dalam IFRS 9 dan PSAK 71 menggantikan pendekatan lama *incurred loss* pada IAS 39. Model ini bersifat prospektif karena mengakui potensi kerugian kredit sejak awal, bahkan sebelum ada bukti objektif kerugian. Pendekatan ini diyakini lebih relevan dengan kondisi pasar keuangan modern yang sangat dinamis (IFRS Foundation, 2023).

Model ECL didasarkan pada tiga parameter utama: **Probability of Default (PD)**, **Loss Given Default (LGD)**, dan **Exposure at Default (EAD)**. PD menggambarkan kemungkinan debitur gagal bayar, LGD mencerminkan persentase kerugian saat gagal bayar, sementara EAD menunjukkan jumlah eksposur pinjaman pada saat gagal (Ahmed & Neel, 2022).

IFRS 9 dan PSAK 71 memperkenalkan **model tiga tahap impairment**. Tahap pertama mencatat cadangan kerugian sebesar ECL 12 bulan. Jika risiko kredit meningkat signifikan, aset dipindahkan ke tahap dua dengan pencadangan penuh sepanjang umur aset. Pada tahap tiga, aset keuangan dianggap gagal bayar dan dicatat dengan kerugian kredit penuh (IAI, 2022).

Pendekatan ini memaksa bank dan perusahaan keuangan untuk membangun **model statistik prediktif** berbasis data historis, makroekonomi, dan proyeksi masa depan. Penggunaan data forward-looking merupakan keunggulan utama model ECL dibandingkan *incurred loss* yang reaktif (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Implementasi ECL menimbulkan tantangan besar, terutama bagi bank di negara berkembang. Keterbatasan data historis, kualitas sistem informasi, serta keahlian dalam pemodelan statistik sering menjadi hambatan. Penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa

banyak bank Indonesia masih mengandalkan pendekatan manual dalam tahap awal penerapan PSAK 71.

Bagi investor, model ECL meningkatkan transparansi karena cadangan kerugian lebih mencerminkan risiko kredit sebenarnya. Namun, kelemahan utamanya adalah tingkat subjektivitas yang tinggi. Manajemen memiliki keleluasaan dalam menentukan asumsi makroekonomi yang bisa memengaruhi besaran ECL (Nobes & Stadler, 2022).

Dampak penerapan ECL terlihat jelas pada laporan keuangan bank internasional. Pada awal adopsi IFRS 9 tahun 2018, banyak bank besar Eropa dan Asia melaporkan lonjakan cadangan kerugian kredit yang signifikan, meskipun belum ada peningkatan gagal bayar aktual (Choi & Meek, 2021).

Selain bank, perusahaan non-keuangan yang memiliki piutang usaha dalam jumlah besar juga terpengaruh. IFRS 9 memperkenalkan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang dagang, di mana perusahaan langsung mencatat ECL sepanjang umur piutang, tanpa melalui model tiga tahap (IFRS Foundation, 2024).

Krisis COVID-19 memberikan contoh nyata tantangan ECL. Bank-bank harus memperkirakan dampak pandemi terhadap kemampuan debitur membayar. Banyak bank di Indonesia mencatat lonjakan cadangan kerugian kredit akibat peningkatan risiko makroekonomi yang signifikan (Utama & Siregar, 2021).

Dengan demikian, model ECL dan impairment dalam IFRS 9/PSAK 71 memberikan kerangka yang lebih proaktif dan realistis dalam mengukur risiko kredit. Meskipun menuntut biaya implementasi tinggi dan sistem yang kompleks, standar ini memperkuat stabilitas dan kepercayaan pasar keuangan.

D. Hedging dan pengungkapan

Hedging atau lindung nilai adalah strategi penting dalam manajemen risiko keuangan, terutama untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar, suku bunga, maupun harga komoditas. IFRS 9 dan PSAK 71 memperkenalkan model akuntansi lindung nilai yang lebih berbasis prinsip (*principle-based*), sehingga lebih mencerminkan aktivitas manajemen risiko yang sesungguhnya (IFRS Foundation, 2023).

Dalam IFRS 9, terdapat tiga jenis utama lindung nilai: **fair value hedge**, **cash flow hedge**, dan **net investment hedge**. Fair value hedge digunakan untuk melindungi nilai wajar aset atau liabilitas, cash flow hedge untuk melindungi arus kas masa depan, sedangkan net investment hedge untuk melindungi investasi bersih pada operasi luar negeri (IAI, 2022).

Perubahan signifikan IFRS 9 dibandingkan IAS 39 adalah **penyelarasan akuntansi dengan strategi manajemen risiko perusahaan**. Artinya, entitas tidak lagi terbatas pada instrumen derivatif tertentu untuk tujuan lindung nilai, tetapi dapat menggunakan instrumen lain selama memenuhi persyaratan efektivitas (Ahmed & Neel, 2022).

Salah satu aspek utama dari akuntansi lindung nilai adalah pengukuran efektivitas. IFRS 9 menghapus aturan rigid 80–125% yang berlaku di IAS 39, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis prinsip. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan untuk mencocokkan akuntansi dengan manajemen risiko (Nobes & Stadler, 2022).

Pengungkapan hedging diatur dalam IFRS 7 dan PSAK 60. Perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi rinci mengenai tujuan dan strategi lindung nilai, instrumen yang digunakan, nilai nosional, nilai wajar, serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan ekuitas (Choi & Meek, 2021).

Di sektor perbankan dan energi, hedging menjadi praktik yang sangat umum. Bank menggunakan swap suku bunga untuk mengelola risiko fluktuasi biaya pendanaan, sementara perusahaan energi menggunakan kontrak berjangka komoditas untuk melindungi harga jual masa depan. Semua transaksi ini wajib diungkapkan secara transparan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Kualitas pengungkapan hedging berpengaruh besar terhadap kepercayaan investor. Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan rinci mengenai lindung nilai cenderung mendapat penilaian risiko yang lebih rendah dari pasar modal (Utama & Siregar, 2021). Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara transparansi dan biaya modal.

Dalam praktik di Indonesia, PSAK 71 dan PSAK 60 mendorong perusahaan untuk lebih terbuka mengenai aktivitas hedging. Namun, penelitian menemukan bahwa sebagian perusahaan masih enggan mengungkapkan detail transaksi derivatif karena dianggap sensitif secara kompetitif (Sari, 2021).

Selain risiko pasar, IFRS 9 juga memungkinkan entitas melakukan lindung nilai akuntansi atas risiko kredit melalui instrumen kredit derivatif. Ini merupakan inovasi yang semakin relevan dalam pasar keuangan modern yang kompleks (IFRS Foundation, 2024).

Secara keseluruhan, IFRS 9/PSAK 71 dan IFRS 7/PSAK 60 memperkuat hubungan antara manajemen risiko dan pelaporan keuangan. Hedging tidak hanya berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan tahunan perusahaan.

E. Studi kasus perbankan internasional

Penerapan IFRS 9 di sektor perbankan internasional memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan manfaat standar baru ini. Bank-bank besar seperti HSBC, Standard Chartered, dan DBS harus melakukan perubahan besar dalam sistem pelaporan risiko kredit. Mereka memanfaatkan model **Expected Credit Loss (ECL)** berbasis data makroekonomi untuk mengantisipasi potensi kerugian (IFRS Foundation, 2023).

Studi kasus HSBC menunjukkan bahwa setelah penerapan IFRS 9, cadangan kerugian kredit meningkat signifikan pada 2018 meskipun tingkat gagal bayar aktual belum naik. Hal ini menandakan sifat prospektif model ECL, yang mendorong bank untuk lebih konservatif dalam menilai risiko kredit (Ahmed & Neel, 2022).

DBS Bank di Singapura menjadi contoh praktik terbaik dalam pengungkapan IFRS 7. Bank ini menyajikan rincian eksposur kredit berdasarkan sektor industri, geografi, serta tingkat risiko. Transparansi seperti ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat reputasi bank di pasar global (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Selama pandemi COVID-19, banyak bank Eropa dan Asia mencatat lonjakan cadangan kerugian kredit. Standard Chartered, misalnya, melaporkan peningkatan signifikan ECL pada 2020 akibat proyeksi ekonomi yang memburuk. Namun, pengungkapan yang

transparan membuat investor tetap dapat memahami posisi keuangan bank (Utama & Siregar, 2021).

Kasus Bank Santander di Eropa juga menunjukkan bagaimana IFRS 9 memengaruhi stabilitas laba. Lonjakan cadangan kerugian membuat laba bersih menurun tajam pada awal pandemi. Namun, setelah kondisi ekonomi membaik, cadangan tersebut menurun, sehingga laba kembali meningkat (Nobes & Stadler, 2022).

Di Indonesia, implementasi PSAK 71 pada bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BRI menimbulkan dampak besar. Mereka harus memperkuat sistem manajemen risiko, terutama dalam memproyeksikan **probability of default** berdasarkan kondisi makroekonomi domestik. Transisi awal memang meningkatkan biaya operasional, tetapi memperkuat kredibilitas laporan (Sari, 2021).

Selain aspek kredit, hedging juga berperan penting dalam praktik bank internasional. Misalnya, JPMorgan dan Citibank menggunakan kontrak derivatif untuk melindungi risiko suku bunga dan nilai tukar. Pengungkapan rinci aktivitas hedging mereka sesuai IFRS 7 meningkatkan pemahaman investor mengenai strategi mitigasi risiko (Choi & Meek, 2021).

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kualitas implementasi IFRS 9 berhubungan langsung dengan peringkat kredit bank. Bank yang mampu mengadopsi sistem ECL dengan baik cenderung memiliki **cost of capital** lebih rendah karena dinilai lebih transparan dan prudent (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penyelarasan antara regulasi lokal dan standar global. Banyak bank di Asia Tenggara masih harus menyeimbangkan PSAK 71/60 dengan aturan prudensial dari bank sentral yang kadang berbeda. Hal ini menuntut fleksibilitas manajemen dan auditor (IAI, 2022).

Dari seluruh studi kasus perbankan internasional, dapat disimpulkan bahwa IFRS 9, IFRS 7, PSAK 71, dan PSAK 60 telah membawa perubahan fundamental. Meskipun mahal dan kompleks, standar ini meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat stabilitas sistem perbankan, dan mendukung kepercayaan investor global.

Rangkuman

Bab VIII membahas perubahan mendasar dalam akuntansi instrumen keuangan setelah adopsi **IFRS 9** dan **IFRS 7**, yang di Indonesia diimplementasikan melalui **PSAK 71** dan **PSAK 60**. Subbagian pertama menjelaskan bahwa IFRS 9 menggantikan IAS 39 dengan klasifikasi yang lebih sederhana, berbasis model bisnis dan karakteristik arus kas, serta menggunakan pendekatan prospektif melalui **Expected Credit Loss (ECL)**. IFRS 7/PSAK 60 melengkapi dengan aturan pengungkapan risiko keuangan secara transparan.

Subbagian kedua menyoroti **klasifikasi dan pengukuran aset keuangan** menjadi tiga kategori: biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Proses klasifikasi dilakukan melalui uji SPPI (solely payments of principal and interest) serta analisis model bisnis entitas.

Subbagian ketiga mengulas **Expected Credit Loss (ECL) dan impairment**. Model tiga tahap (12 bulan, sepanjang umur, gagal bayar) memberikan pendekatan lebih proaktif dibanding incurred loss. Penerapan ECL menuntut data historis, model prediktif, serta estimasi berbasis makroekonomi yang menambah kompleksitas.

Subbagian keempat membahas **hedging dan pengungkapan**, dengan tiga bentuk utama: fair value hedge, cash flow hedge, dan net investment hedge. IFRS 9 memperluas fleksibilitas akuntansi lindung nilai, sedangkan IFRS 7/PSAK 60 mewajibkan pengungkapan rinci mengenai tujuan, instrumen, dan dampak keuangan dari aktivitas lindung nilai.

Subbagian kelima menampilkan **studi kasus perbankan internasional** yang menunjukkan dampak nyata IFRS 9 pada sektor keuangan global. Bank besar seperti HSBC, DBS, dan Standard Chartered menghadapi lonjakan cadangan kerugian saat awal adopsi, sementara di Indonesia bank BUMN menyesuaikan PSAK 71 dengan memperkuat sistem manajemen risiko.

Secara keseluruhan, Bab VIII menegaskan bahwa IFRS 9/PSAK 71 dan IFRS 7/PSAK 60 meningkatkan transparansi, relevansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Walaupun menuntut biaya implementasi tinggi, standar ini memperkuat kepercayaan pasar dan stabilitas sistem keuangan global.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. IFRS 9 menggantikan IAS 39 dengan pendekatan:
 - a. Historical cost
 - b. Expected credit loss ☐
 - c. Incurred loss
 - d. Fair value only
2. Aset keuangan dikategorikan ke dalam:
 - a. Trading, amortisasi, hybrid
 - b. Amortized cost, FVTPL, FVOCI ☐
 - c. Fixed, floating, hybrid
 - d. Cash, receivable, equity
3. Model tiga tahap impairment dalam IFRS 9 mencakup:
 - a. 12 bulan, sepanjang umur, gagal bayar ☐
 - b. Current, past due, default
 - c. Short, medium, long
 - d. Tier 1, Tier 2, Tier 3
4. Jenis lindung nilai dalam IFRS 9 meliputi:
 - a. Fair value hedge, cash flow hedge, net investment hedge ☐
 - b. Forward hedge, swap hedge, future hedge
 - c. Cost hedge, profit hedge, market hedge
 - d. Internal hedge, external hedge, neutral hedge
5. Studi kasus HSBC menunjukkan bahwa adopsi IFRS 9 menyebabkan:
 - a. Penurunan cadangan kerugian
 - b. Lonjakan cadangan kerugian meskipun default rendah ☐
 - c. Tidak ada perubahan signifikan
 - d. Penghapusan piutang massal

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan utama antara incurred loss dan expected credit loss (ECL).
2. Bagaimana uji SPPI digunakan dalam klasifikasi aset keuangan?
3. Diskusikan tantangan penerapan ECL di negara berkembang, khususnya Indonesia.
4. Berikan contoh penerapan hedging dan pengungkapan sesuai IFRS 7.
5. Analisis dampak IFRS 9 pada stabilitas laba bank internasional saat pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Expected credit loss modeling under IFRS 9: Evidence from global banks. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 55–78. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-055>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). The effects of IFRS 9 adoption on credit risk management and bank stability. *International Review of Financial Analysis*, 86, 102432. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102432>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Douppnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 71: Instrumen keuangan*. Jakarta: IAI.
- 6) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 60: Pengungkapan instrumen keuangan*. Jakarta: IAI.
- 7) IFRS Foundation. (2023). *IFRS 9 Financial Instruments*. London: IFRS Foundation.
- 8) IFRS Foundation. (2024). Enhancing transparency in credit risk reporting. London: IFRS Foundation.
- 9) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Global implications of IFRS 9 adoption: Credit risk and volatility. *Accounting Horizons*, 36(4), 102–120. <https://doi.org/10.2308/acch-2022-009>
- 10) Sari, R. (2021). Implementation challenges of PSAK 71 in Indonesian banks. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 233–251. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.12>
- 11) Utama, S., & Siregar, S. V. (2021). COVID-19 and expected credit loss provisioning in ASEAN banks. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 345–356. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0345>

BAB IX

PAJAK PENGHASILAN INTERNASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami konsep pajak kini dan pajak tangguhan menurut IAS 12 dan PSAK 46.
2. Mahasiswa dapat menyusun rekonsiliasi pajak tangguhan.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan isu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
4. Mahasiswa mampu menganalisis kasus pajak tangguhan dalam perusahaan multinasional.

A. IAS 12 vs PSAK 46

IAS 12 adalah standar akuntansi internasional yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, mencakup pajak kini dan pajak tangguhan. Di Indonesia, standar ini diadopsi melalui PSAK 46, dengan beberapa penyesuaian pada konteks peraturan perpajakan nasional. IAS 12 berlaku untuk semua jenis entitas, baik domestik maupun multinasional, sementara PSAK 46 sering disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia (IAI, 2022).

IAS 12 menekankan pendekatan balance sheet liability method, yaitu mengakui dampak pajak dari perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pajaknya. PSAK 46 mengadopsi pendekatan ini, meski terdapat penyesuaian terhadap praktik administrasi perpajakan Indonesia yang berbeda dengan yurisdiksi internasional (IFRS Foundation, 2023).

Perbedaan utama IAS 12 dengan PSAK 46 adalah terkait ruang lingkup pengakuan pajak tangguhan. IAS 12 lebih luas dalam cakupan, termasuk transaksi bisnis lintas negara, sedangkan PSAK 46 menekankan penerapannya dalam kerangka perpajakan nasional. Namun, harmonisasi terus dilakukan agar Indonesia tetap selaras dengan IFRS (Siregar & Utama, 2021).

IAS 12 mendorong perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pengakuan awal goodwill. PSAK 46 mengikuti prinsip ini, tetapi praktik di Indonesia sering terbentur pada kesulitan rekonsiliasi antara standar akuntansi dan aturan perpajakan domestik (Nobes & Stadler, 2022).

IAS 12 juga menekankan pengungkapan rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dengan tarif pajak hukum. Hal ini membantu pengguna laporan keuangan memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan, seperti insentif pajak, penghasilan luar negeri, atau biaya yang tidak dapat dikurangkan. PSAK 46 juga mewajibkan pengungkapan ini (IAI, 2022).

Dalam praktik global, IAS 12 lebih banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memastikan konsistensi pelaporan pajak di berbagai yurisdiksi. Misalnya, perusahaan teknologi global seperti Microsoft atau Google menggunakan IAS 12 untuk melaporkan aset dan kewajiban pajak tangguhan di banyak negara (IFRS Foundation, 2024).

PSAK 46 di Indonesia juga berlaku bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di pasar domestik. Namun, perbedaan antara tarif pajak lokal dan global sering menimbulkan

kesulitan bagi auditor dalam memastikan keakuratan perhitungan pajak tangguhan (Utama & Siregar, 2021).

IAS 12 dan PSAK 46 sama-sama menekankan prinsip akrual, yaitu pajak harus diakui pada periode yang sama dengan transaksi akuntansi terkait. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan memberikan gambaran yang adil tentang posisi keuangan perusahaan (Choi & Meek, 2021).

Kedua standar ini juga memperkuat transparansi pelaporan dengan mengharuskan perusahaan mengungkapkan rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan, termasuk kapan diperkirakan akan direalisasi atau dilunasi. Transparansi ini penting bagi investor dan regulator (Ahmed & Neel, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun IAS 12 dan PSAK 46 memiliki kesamaan mendasar, perbedaan implementasi lokal sering menimbulkan tantangan. Namun, harmonisasi yang terus dilakukan mendukung integrasi Indonesia ke dalam sistem pelaporan global.

B. Konsep pajak kini dan pajak tangguhan

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan atas laba kena pajak pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pajak ini dihitung berdasarkan laba fiskal yang dihasilkan dari rekonsiliasi antara laba akuntansi dan ketentuan fiskal. Konsep pajak kini mencerminkan kewajiban riil perusahaan kepada otoritas pajak (IAI, 2022).

Sebaliknya, pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang ditangguhkan untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan temporer ini bisa menimbulkan **aset pajak tangguhan (deferred tax assets)** atau **liabilitas pajak tangguhan (deferred tax liabilities)** tergantung pada apakah perbedaan tersebut akan menghasilkan pengurangan atau penambahan pajak di masa depan (IFRS Foundation, 2023).

Contoh sederhana aset pajak tangguhan adalah ketika perusahaan mencatat rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan laba masa depan. Sementara contoh liabilitas pajak tangguhan adalah ketika depresiasi aset menurut akuntansi berbeda dengan depresiasi menurut pajak, yang menyebabkan laba fiskal lebih rendah pada awalnya (Ahmed & Neel, 2022).

IAS 12 dan PSAK 46 menggunakan **metode kewajiban neraca (balance sheet liability method)** untuk mencatat pajak tangguhan. Metode ini berfokus pada perbedaan antara nilai tercatat aset/liabilitas di laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai implikasi pajak di masa depan (Choi & Meek, 2021).

Pajak kini dan tangguhan sama-sama penting dalam mencerminkan beban pajak total perusahaan. Beban pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah penjumlahan antara pajak kini dan perubahan pajak tangguhan selama periode tertentu. Transparansi ini membantu investor memahami dampak fiskal dari operasi perusahaan (Nobes & Stadler, 2022).

Perusahaan multinasional sering menghadapi kompleksitas lebih tinggi karena harus mengelola pajak kini di berbagai yurisdiksi sekaligus pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan aturan antarnegara. Misalnya, perbedaan tarif pajak korporasi antara Amerika Serikat dan Indonesia akan memengaruhi perhitungan aset dan liabilitas pajak tangguhan (Utama & Siregar, 2021).

Pengakuan aset pajak tangguhan harus mempertimbangkan probabilitas ketersediaan laba kena pajak di masa depan untuk memanfaatkannya. Jika tidak ada keyakinan memadai bahwa laba masa depan akan cukup, aset pajak tangguhan tidak boleh diakui. Ketentuan ini mencegah overstatement dalam laporan keuangan (IAI, 2022).

Di Indonesia, penerapan PSAK 46 sering menghadapi kendala praktis karena perbedaan interpretasi antara otoritas pajak dan standar akuntansi. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan rekonsiliasi panjang untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan fiskal (Sari, 2021).

Dari perspektif investor, informasi pajak kini dan tangguhan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan yang lebih realistis. Investor dapat menilai apakah perusahaan memiliki potensi beban pajak lebih tinggi atau keuntungan pajak di masa depan. Transparansi pajak tangguhan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Dengan demikian, konsep pajak kini dan pajak tangguhan adalah instrumen penting dalam pelaporan pajak penghasilan internasional. Keduanya saling melengkapi: pajak kini mencerminkan kewajiban langsung, sedangkan pajak tangguhan mencerminkan implikasi jangka panjang dari perbedaan temporer.

C. Rekonsiliasi fiskal antar negara

Rekonsiliasi fiskal antar negara menjadi isu penting dalam akuntansi pajak internasional karena perusahaan multinasional beroperasi di banyak yurisdiksi dengan aturan pajak berbeda. Perbedaan tarif, metode pengakuan pendapatan, dan insentif pajak menuntut perusahaan menyusun laporan rekonsiliasi yang menjembatani laba akuntansi global dengan laba kena pajak di masing-masing negara (IFRS Foundation, 2023).

IAS 12 mendorong perusahaan untuk menyajikan rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dan tarif pajak nominal. Dalam praktik global, rekonsiliasi ini biasanya berbentuk tabel yang memperlihatkan faktor-faktor penyebab perbedaan, seperti penghasilan yang dikenakan tarif preferensial, biaya nondeductible, atau pajak yang dikenakan di yurisdiksi asing (IAI, 2022).

Bagi perusahaan multinasional, rekonsiliasi fiskal tidak hanya terkait tarif pajak, tetapi juga mencakup pengakuan perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan. Misalnya, perbedaan perlakuan depresiasi antara AS dan Indonesia dapat menghasilkan perbedaan signifikan dalam laba fiskal (Choi & Meek, 2021).

Masalah utama dalam rekonsiliasi fiskal antar negara adalah double taxation. Hal ini terjadi ketika laba yang sama dikenakan pajak di dua yurisdiksi berbeda. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara menandatangani Tax Treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang di Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Utama & Siregar, 2021).

Rekonsiliasi juga menjadi semakin kompleks dengan adanya perbedaan prinsip akuntansi. IFRS mungkin mengakui pendapatan pada saat tertentu, sementara hukum pajak

negara tertentu mengakuinya pada periode lain. Hal ini menimbulkan perbedaan temporer dan permanen yang harus direkonsiliasi dalam laporan keuangan konsolidasi (Ahmed & Neel, 2022).

Perusahaan multinasional biasanya menggunakan sistem transfer pricing untuk mengalokasikan laba antar negara. Namun, praktik ini sering diawasi ketat oleh otoritas pajak karena berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal sering dikaitkan dengan kebijakan anti-penyalahgunaan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Dalam konteks Indonesia, PSAK 46 mendorong pengungkapan rekonsiliasi fiskal yang rinci, terutama untuk perusahaan dengan entitas anak di luar negeri. Transparansi ini bertujuan agar investor memahami faktor-faktor yang memengaruhi beban pajak dan potensi kewajiban masa depan (Sari, 2021).

Rekonsiliasi fiskal antar negara juga berkaitan erat dengan laporan tahunan multinasional. Banyak perusahaan global seperti Unilever atau Nestlé menampilkan catatan rinci yang menjelaskan dampak pajak dari operasi di berbagai yurisdiksi. Informasi ini meningkatkan kepercayaan investor internasional (Nobes & Stadler, 2022).

Tantangan besar dalam rekonsiliasi fiskal adalah perbedaan aturan pajak yang dinamis. Negara-negara terus memperbarui undang-undang perpajakan untuk menyesuaikan dengan tren global, seperti digitalisasi ekonomi. Hal ini menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian laporan rekonsiliasi secara berkala (IFRS Foundation, 2024).

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal antar negara adalah proses penting dalam akuntansi pajak penghasilan internasional. Proses ini memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang konsisten, meski terdapat perbedaan regulasi. Selain itu, rekonsiliasi mendukung kepatuhan, transparansi, dan harmonisasi sistem perpajakan global.

D. Isu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) adalah praktik yang dilakukan perusahaan multinasional untuk memindahkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran global karena mengurangi penerimaan negara secara signifikan. OECD sejak 2013 meluncurkan inisiatif BEPS untuk mengurangi praktik penghindaran pajak agresif (OECD, 2020).

IAS 12 maupun PSAK 46 tidak secara eksplisit membahas BEPS, tetapi prinsip transparansi pelaporan pajak membuat isu ini relevan. Perusahaan diwajibkan melaporkan pajak tangguhan dan rekonsiliasi fiskal yang dapat mengungkap indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Hal ini mendukung regulasi tambahan yang diterapkan banyak negara (IFRS Foundation, 2023).

Salah satu mekanisme BEPS adalah melalui transfer pricing, di mana perusahaan menetapkan harga transaksi intra-group secara artifisial untuk memindahkan laba. Misalnya, perusahaan teknologi menetapkan biaya lisensi sangat tinggi pada anak usaha di negara pajak rendah, sehingga laba terkonsentrasi di yurisdiksi tersebut (Sari, 2021).

OECD memperkenalkan 15 Action Plans BEPS yang meliputi transparansi pajak, pencegahan treaty abuse, dokumentasi transfer pricing, dan pelaporan *country-by-country*

reporting (CbCR). Indonesia juga mengadopsi CbCR untuk perusahaan multinasional dengan omzet lebih dari Rp11 triliun per tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

BEPS menimbulkan dampak besar pada perusahaan multinasional di sektor digital. Perusahaan seperti Google, Apple, dan Amazon dituduh mengalihkan laba ke negara-negara dengan pajak rendah. Hal ini mendorong OECD/G20 memperkenalkan Pillar One (alokasi laba digital) dan Pillar Two (pajak minimum global 15%) pada 2021 (OECD, 2021).

Indonesia mendukung inisiatif pajak minimum global karena dapat meningkatkan keadilan sistem perpajakan internasional. Dengan aturan ini, perusahaan multinasional tidak bisa lagi hanya memindahkan laba ke negara pajak rendah tanpa kontribusi fiskal di negara tempat mereka beroperasi (Utama & Siregar, 2021).

Namun, penerapan BEPS juga menghadapi tantangan. Banyak negara masih khawatir kehilangan daya tarik investasi jika memberlakukan pajak minimum global. Selain itu, keterbatasan kapasitas administrasi pajak di negara berkembang membuat pengawasan transfer pricing sulit dilakukan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Transparansi menjadi kunci dalam mengatasi BEPS. Standar pelaporan keuangan seperti IAS 12 mendorong pengungkapan rekonsiliasi pajak, sementara OECD mendorong keterbukaan laporan keuangan lintas negara melalui CbCR. Investor juga semakin memperhatikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari faktor ESG (Environmental, Social, Governance) (Nobes & Stadler, 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa penghindaran pajak melalui BEPS berhubungan negatif dengan reputasi perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam skandal pajak cenderung menghadapi tekanan dari investor dan regulator, sehingga biaya modal mereka meningkat (Ahmed & Neel, 2022).

Dengan demikian, isu BEPS menunjukkan bahwa pajak penghasilan internasional bukan hanya persoalan akuntansi, tetapi juga kebijakan publik dan etika bisnis. Harmonisasi standar akuntansi, regulasi pajak global, dan komitmen negara sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil dan berkelanjutan.

E. Studi kasus pajak tangguhan multinasional

Studi kasus pajak tangguhan pada perusahaan multinasional memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas akuntansi pajak internasional. Salah satu contohnya adalah perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft yang memiliki entitas anak di berbagai negara dengan tarif pajak berbeda. Perbedaan tarif ini menimbulkan kewajiban dan aset pajak tangguhan yang signifikan (IFRS Foundation, 2023).

Google, misalnya, pernah menghadapi sorotan publik karena strategi perencanaan pajaknya yang dikenal dengan istilah *Double Irish with a Dutch Sandwich*. Struktur ini memanfaatkan celah hukum untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Akibatnya, pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan tahunan menjadi perhatian investor (OECD, 2020).

Studi kasus Apple juga menunjukkan tantangan dalam pengakuan pajak tangguhan. Pada 2017, Apple dipaksa merepatriasi sebagian besar laba luar negeri setelah perubahan regulasi pajak AS. Hal ini berdampak besar pada aset pajak tangguhan yang sebelumnya dicatat berdasarkan tarif pajak rendah di yurisdiksi asing (Ahmed & Neel, 2022).

Perusahaan multinasional di sektor energi, seperti Shell dan BP, juga menghadapi tantangan serupa. Fluktuasi harga minyak dan insentif pajak energi terbarukan menyebabkan perubahan signifikan dalam estimasi pajak tangguhan. Hal ini memperlihatkan bagaimana faktor eksternal dapat memengaruhi pelaporan pajak tangguhan (Nobes & Stadler, 2022).

Di sektor perbankan, HSBC dan Standard Chartered mencatat jumlah besar aset pajak tangguhan terkait kerugian fiskal akibat krisis keuangan global. Aset ini hanya dapat diakui jika ada keyakinan bahwa laba masa depan cukup untuk memanfaatkannya. Auditor memainkan peran penting dalam menilai kelayakan pengakuan ini (Choi & Meek, 2021).

Di Indonesia, studi pada bank BUMN menunjukkan bahwa penerapan PSAK 46 sering menimbulkan perbedaan signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal. Bank Mandiri, misalnya, melaporkan aset pajak tangguhan yang besar terkait cadangan kerugian kredit. Hal ini mencerminkan transisi dari model *incurred loss* ke *expected credit loss* dalam PSAK 71 (Sari, 2021).

Selain itu, perusahaan multinasional di sektor manufaktur menghadapi tantangan dalam pengakuan pajak tangguhan atas investasi luar negeri. Jika laba anak perusahaan ditahan untuk reinvestasi, maka tidak ada kewajiban pajak tangguhan yang diakui. Namun, jika laba akan direpatriasi, maka kewajiban pajak tangguhan harus dicatat (IAI, 2022).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak nyata pada laporan pajak tangguhan. Banyak perusahaan mencatat kerugian besar yang menimbulkan aset pajak tangguhan signifikan. Namun, ketidakpastian ekonomi membuat auditor mempertanyakan kemungkinan realisasi aset tersebut di masa depan (Utama & Siregar, 2021).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa kualitas pengungkapan pajak tangguhan berpengaruh terhadap persepsi investor. Perusahaan yang mengungkapkan asumsi dan estimasi secara rinci cenderung lebih dipercaya pasar, meskipun angka pajak tangguhannya besar. Transparansi menjadi faktor kunci dalam akuntansi pajak internasional (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Secara keseluruhan, studi kasus multinasional menunjukkan bahwa pajak tangguhan adalah isu kompleks yang dipengaruhi oleh regulasi, strategi bisnis, kondisi ekonomi, dan kebijakan global. Pengungkapan yang transparan serta harmonisasi standar menjadi solusi untuk menjaga kepercayaan investor dan kredibilitas laporan keuangan.

Rangkuman Bab IX – Pajak Penghasilan Internasional

Bab IX membahas aspek penting pajak penghasilan dalam konteks global. **Subbagian A** menyoroti perbandingan **IAS 12** dan **PSAK 46**, yang keduanya menggunakan metode kewajiban neraca untuk menghitung pajak tangguhan, meskipun implementasi lokal berbeda karena peraturan domestik. **Subbagian B** menjelaskan konsep **pajak kini** sebagai kewajiban langsung atas laba kena pajak dan **pajak tangguhan** yang muncul dari perbedaan temporer yang akan direalisasi di masa depan.

Subbagian C membahas **rekonsiliasi fiskal antar negara**, yang menjadi tantangan besar bagi perusahaan multinasional karena perbedaan tarif dan aturan pajak di berbagai yurisdiksi. Risiko pajak berganda (*double taxation*) dapat dikurangi melalui *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda. **Subbagian D** mengulas isu **BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)**, praktik pengalihan laba ke negara pajak rendah yang menimbulkan

respon OECD dengan program BEPS Action Plans, *Country-by-Country Reporting*, serta kebijakan pajak minimum global 15%.

Subbagian E menyajikan **studi kasus multinasional** seperti Google, Apple, HSBC, dan Bank Mandiri, yang menghadapi tantangan besar dalam pengakuan pajak tangguhan, terutama saat terjadi repatriasi laba, perubahan tarif pajak, atau krisis ekonomi global. Transparansi pengungkapan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan investor.

Secara keseluruhan, Bab IX menegaskan bahwa pajak penghasilan internasional bukan hanya isu akuntansi teknis, melainkan juga terkait kebijakan publik, etika bisnis, dan tata kelola perusahaan global. Harmonisasi standar internasional, keterbukaan informasi, serta kolaborasi antar negara sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. IAS 12 dan PSAK 46 sama-sama menggunakan metode:
 - a. Current tax method
 - b. Balance sheet liability method ☐
 - c. Deferred income method
 - d. Tax reconciliation method
2. Pajak tangguhan timbul akibat:
 - a. Perbedaan temporer ☐
 - b. Perbedaan permanen
 - c. Biaya nondeductible
 - d. Pajak final
3. Double taxation dalam rekonsiliasi antar negara diatasi melalui:
 - a. Transfer pricing
 - b. Tax treaty ☐
 - c. Hedging
 - d. ECL
4. BEPS merujuk pada praktik:
 - a. Meningkatkan tarif pajak
 - b. Mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah ☐
 - c. Mengurangi laba kena pajak domestik secara sah
 - d. Menghapus pajak tangguhan
5. Studi kasus Apple menunjukkan perubahan signifikan aset pajak tangguhan karena:
 - a. Hedging nilai tukar
 - b. Repatriasi laba luar negeri ☐
 - c. Merger dan akuisisi
 - d. Penjualan aset tetap

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan pajak kini dan pajak tangguhan dengan contoh praktis.
2. Bagaimana rekonsiliasi fiskal antar negara membantu mencegah pajak berganda?
3. Diskusikan dampak implementasi kebijakan BEPS OECD terhadap perusahaan multinasional.
4. Analisis bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi pencatatan aset pajak tangguhan.
5. Menurut Anda, bagaimana harmonisasi IAS 12 dan PSAK 46 meningkatkan transparansi perpajakan di Indonesia?

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Deferred tax assets and liabilities in multinational firms: Evidence from global adoption of IAS 12. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 102–121. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-102>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). International tax reporting and the impact of BEPS initiatives. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102420. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102420>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Doupnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: IAI.
- 6) IFRS Foundation. (2023). *IAS 12: Income Taxes*. London: IFRS Foundation.
- 7) IFRS Foundation. (2024). Global perspectives on deferred tax and cross-border reporting. London: IFRS Foundation.
- 8) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Corporate tax disclosures and investor perceptions: Evidence from multinational enterprises. *Accounting Horizons*, 36(4), 145–163. <https://doi.org/10.2308/acch-2022-145>
- 9) OECD. (2020). *Addressing base erosion and profit shifting*. Paris: OECD Publishing.
- 10) OECD. (2021). *Two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy*. Paris: OECD Publishing.
- 11) Sari, R. (2021). Implementation challenges of PSAK 46 in Indonesian listed firms. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 233–251. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.12>
- 12) Utama, S., & Siregar, S. V. (2021). COVID-19, tax deferrals, and deferred tax assets in ASEAN firms. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 455–467. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0455>

BAB X

PELAPORAN SEGMENT OPERASI

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami konsep segmen operasi menurut IFRS 8.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi segmen usaha dan geografis.
3. Mahasiswa mampu menganalisis kinerja segmen perusahaan multinasional.
4. Mahasiswa dapat menyajikan laporan segmen dalam format dashboard (Excel/BI).

A. IFRS 8 vs PSAK terkait

IFRS 8 *Operating Segments* merupakan standar internasional yang mengatur pengungkapan informasi segmen operasi dalam laporan keuangan. Standar ini menekankan prinsip *management approach*, yakni pelaporan segmen harus mencerminkan cara manajemen internal mengevaluasi kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Di Indonesia, PSAK 5 (Revisi) mengadopsi IFRS 8 dengan beberapa penyesuaian lokal (IAI, 2022).

Perbedaan mendasar IFRS 8 dengan PSAK sebelumnya terletak pada pendekatan berbasis manajemen. Jika sebelumnya pelaporan segmen didasarkan pada jenis usaha atau geografis yang ditentukan oleh standar, IFRS 8 memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk menyesuaikan dengan struktur manajemen internal. Hal ini meningkatkan relevansi informasi bagi investor (IFRS Foundation, 2023).

Dalam PSAK 5, entitas diwajibkan mengungkapkan informasi tentang segmen operasi yang memenuhi kriteria kuantitatif tertentu, seperti pendapatan, laba, atau aset yang melebihi 10% dari total konsolidasi. Aturan ini selaras dengan IFRS 8 untuk memastikan segmen yang signifikan dilaporkan secara konsisten (Sari, 2021).

IFRS 8 juga mengharuskan pengungkapan *entity-wide disclosure*, termasuk informasi geografis, produk, layanan, serta pelanggan utama. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan global (Nobes & Stadler, 2022).

Kelebihan pendekatan IFRS 8 adalah fleksibilitas, karena laporan segmen mengikuti sistem pelaporan manajemen internal. Namun, kelemahannya adalah potensi kurangnya konsistensi antar perusahaan, sebab struktur segmen dapat berbeda secara signifikan. PSAK mencoba menyeimbangkan hal ini dengan pedoman tambahan (Utama & Siregar, 2021).

Penggunaan IFRS 8 dan PSAK 5 menjadi semakin penting bagi perusahaan multinasional yang memiliki lini bisnis beragam. Pengungkapan segmen memungkinkan pemangku kepentingan menilai kontribusi masing-masing lini bisnis terhadap kinerja perusahaan konsolidasi (Ahmed & Neel, 2022).

Investor memandang IFRS 8 sebagai standar yang meningkatkan transparansi, karena informasi yang disajikan mencerminkan realitas manajerial. Hal ini membantu mereka menilai risiko, profitabilitas, serta potensi pertumbuhan di berbagai segmen operasi (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Di Indonesia, penerapan PSAK 5 menghadapi kendala teknis terutama pada perusahaan menengah yang belum memiliki sistem informasi manajemen segmen. Hal ini menimbulkan beban tambahan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi (Sari, 2021).

Namun demikian, dengan meningkatnya kebutuhan transparansi pasar modal, regulator menekankan pentingnya adopsi penuh standar ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan perusahaan publik untuk menyajikan laporan segmen sesuai PSAK 5 agar dapat memenuhi standar internasional (OJK, 2022).

Dengan demikian, IFRS 8 dan PSAK 5 telah menjadi landasan utama pelaporan segmen operasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai alat analisis penting bagi manajemen, investor, dan regulator.

B. Identifikasi segmen operasi dan pelaporan geografis

Segmen operasi didefinisikan sebagai komponen perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan beban, serta dievaluasi secara terpisah oleh manajemen. Identifikasi segmen operasi bergantung pada struktur pelaporan internal, bukan klasifikasi standar eksternal (IFRS Foundation, 2023).

Kriteria utama identifikasi segmen operasi adalah apakah informasi keuangan segmen secara reguler ditinjau oleh pengambil keputusan operasional utama (*Chief Operating Decision Maker* atau CODM). Hal ini menjamin bahwa segmen yang relevan secara manajerial juga relevan bagi pemangku kepentingan eksternal (IAI, 2022).

Selain segmen operasi berdasarkan lini bisnis, perusahaan juga diwajibkan mengungkapkan informasi geografis. Hal ini meliputi pendapatan yang diperoleh dari pelanggan di wilayah tertentu, serta aset non-kini yang berlokasi di negara atau kawasan tertentu (Doupnik & Perera, 2021).

Pelaporan geografis penting untuk menilai risiko pasar internasional. Misalnya, perusahaan global seperti Unilever mengungkapkan kontribusi dari Eropa, Asia, dan Amerika secara terpisah untuk memperlihatkan ketergantungan terhadap pasar tertentu (Nobes & Stadler, 2022).

Identifikasi segmen juga mencakup segmen produk atau jasa. Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai industri, seperti Samsung atau General Electric, harus melaporkan kontribusi masing-masing lini seperti elektronik, energi, dan layanan keuangan (Choi & Meek, 2021).

Kriteria kuantitatif IFRS 8 menetapkan bahwa segmen yang pendapatan, laba, atau asetnya mencapai 10% atau lebih dari total harus dilaporkan. Jika jumlah segmen yang dilaporkan terlalu sedikit, manajemen dapat menambahkan segmen lain agar mencapai minimal 75% dari pendapatan konsolidasi (IFRS Foundation, 2024).

Pelaporan geografis juga membantu regulator dan investor memahami risiko terkait kebijakan perdagangan internasional, tarif, atau ketidakstabilan politik di negara tertentu. Hal ini semakin relevan di era globalisasi (Utama & Siregar, 2021). Di Indonesia, pelaporan segmen geografis masih jarang dilakukan oleh perusahaan menengah karena keterbatasan data. Namun, perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyajikan informasi ini untuk memenuhi PSAK 5 (Sari, 2021).

Teknologi informasi mempermudah identifikasi dan pelaporan segmen. Sistem ERP dan *business intelligence* (BI) memungkinkan perusahaan mengumpulkan data operasional lintas negara dengan lebih akurat (Alsaadi & Elnahass, 2023). Oleh karena itu, identifikasi segmen operasi dan pelaporan geografis menjadi fondasi dalam pelaporan segmen modern. Informasi ini membantu memahami kontribusi segmen terhadap kinerja global serta mengantisipasi risiko eksternal.

C. Analisis kinerja segmen perusahaan multinasional

Analisis kinerja segmen memungkinkan pemangku kepentingan menilai kontribusi setiap unit bisnis terhadap laba keseluruhan. IFRS 8 mendorong perusahaan untuk melaporkan informasi kinerja seperti pendapatan, beban, dan laba per segmen (IFRS Foundation, 2023).

Perusahaan multinasional biasanya menyajikan analisis segmen berdasarkan lini produk dan wilayah geografis. Misalnya, Nestlé membagi kinerja berdasarkan produk makanan, minuman, dan nutrisi, serta wilayah Eropa, Asia, dan Amerika (Ahmed & Neel, 2022). Analisis segmen juga mencakup margin profitabilitas dan tren pertumbuhan. Investor dapat menilai apakah segmen tertentu memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibanding segmen lain. Hal ini membantu pengambilan keputusan investasi (Nobes & Stadler, 2022).

Selain laba, informasi aset dan liabilitas per segmen juga penting. Hal ini menunjukkan alokasi sumber daya dan risiko keuangan yang melekat pada segmen tertentu, misalnya segmen energi yang membutuhkan investasi besar (Choi & Meek, 2021). Perusahaan juga dianjurkan menyajikan indikator non-keuangan per segmen, seperti pangsa pasar atau jumlah pelanggan. Indikator ini memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja jangka panjang (Utama & Siregar, 2021).

Tantangan utama dalam analisis segmen adalah konsistensi data. Karena IFRS 8 mengikuti pendekatan manajerial, perbandingan antar perusahaan bisa sulit dilakukan. Hal ini menuntut analisis untuk memahami konteks struktur organisasi (IFRS Foundation, 2024). Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelaporan segmen meningkatkan akurasi prediksi analisis keuangan. Informasi yang rinci tentang segmen membantu menilai proyeksi laba perusahaan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Dalam konteks Indonesia, perusahaan besar seperti Telkom Indonesia melaporkan segmen berdasarkan jasa seluler, data, dan layanan digital. Informasi ini penting untuk menilai transformasi bisnis di era digital (Sari, 2021). Analisis segmen juga bermanfaat bagi manajemen internal untuk mengevaluasi efektivitas strategi alokasi modal dan kinerja manajer segmen. Transparansi ini meningkatkan akuntabilitas organisasi (Doupnik & Perera, 2021).

Secara keseluruhan, analisis kinerja segmen adalah instrumen penting untuk menilai daya saing perusahaan multinasional, mengoptimalkan strategi investasi, dan mendukung pengambilan keputusan jangka panjang.

D. Penyajian dashboard segmen (Excel/BI)

Penyajian dashboard segmen merupakan inovasi modern dalam pelaporan segmen operasi. Dengan memanfaatkan Excel atau *Business Intelligence* (BI) tools, perusahaan dapat menampilkan informasi segmen dalam format visual yang interaktif (IFRS Foundation, 2024).

Dashboard memungkinkan manajemen dan investor memahami tren kinerja segmen secara cepat melalui grafik, tabel dinamis, dan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators* atau KPI). Penyajian visual lebih mudah dipahami dibandingkan tabel statis (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Excel masih menjadi alat yang banyak digunakan karena fleksibilitas dan keterjangkauannya. Melalui fitur *pivot table* dan *power query*, data segmen dapat diolah secara cepat untuk analisis mendalam (Sari, 2021). Sementara itu, BI tools seperti Power BI, Tableau, atau QlikSense menawarkan visualisasi yang lebih canggih. Perusahaan global semakin banyak menggunakan BI untuk mengintegrasikan data segmen lintas negara dan departemen (Nobes & Stadler, 2022).

Dashboard segmen juga mendukung *real-time reporting*, memungkinkan manajemen mengambil keputusan cepat saat terjadi perubahan kondisi pasar. Hal ini meningkatkan kelincahan perusahaan dalam menghadapi risiko global (Utama & Siregar, 2021). Kelebihan lain dari dashboard adalah kemampuannya menampilkan data multi-dimensi. Misalnya, investor dapat melihat kontribusi pendapatan per produk, wilayah, dan periode waktu dalam satu tampilan interaktif (Ahmed & Neel, 2022).

Namun, penyajian dashboard juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan integrasi sistem ERP dan keakuratan data sumber. Kesalahan input dapat mengurangi kredibilitas laporan (IFRS Foundation, 2023). Perusahaan multinasional yang berhasil mengimplementasikan dashboard segmen menunjukkan peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan efisiensi pelaporan. Hal ini menjadikan dashboard sebagai *best practice* modern (Choi & Meek, 2021).

Di Indonesia, adopsi dashboard segmen masih terbatas pada perusahaan besar, terutama di sektor perbankan dan telekomunikasi. Namun, tren digitalisasi diperkirakan akan mendorong lebih banyak perusahaan menggunakannya (OJK, 2022). Dengan demikian, dashboard segmen adalah alat penting yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan segmen operasi dalam era digitalisasi.

E. Studi kasus laporan segmen perusahaan global

Studi kasus laporan segmen perusahaan global memberikan gambaran nyata implementasi IFRS 8. Contoh umum adalah laporan keuangan Apple yang memisahkan segmen berdasarkan produk: iPhone, Mac, iPad, layanan, dan perangkat lain (Nobes & Stadler, 2022).

Apple juga melaporkan informasi geografis, termasuk kontribusi dari Amerika, Eropa, Greater China, Jepang, dan wilayah Asia Pasifik lainnya. Hal ini membantu investor memahami risiko geografis yang dihadapi perusahaan (Ahmed & Neel, 2022).

Unilever membagi laporan segmen berdasarkan kategori produk: makanan, minuman, kecantikan, dan rumah tangga. Selain itu, laporan geografis disajikan untuk menyoroti ketergantungan pada pasar Asia yang sedang tumbuh pesat (Choi & Meek, 2021).

Di sektor energi, BP dan Shell menyajikan laporan segmen yang membedakan antara eksplorasi, produksi, dan energi terbarukan. Hal ini mencerminkan strategi diversifikasi energi global (Utama & Siregar, 2021). Perusahaan teknologi seperti Microsoft membagi laporan segmen menjadi *Productivity and Business Processes*, *Intelligent Cloud*, dan *More Personal Computing*. Segmentasi ini relevan dengan strategi digitalisasi perusahaan (IFRS Foundation, 2023).

Studi kasus juga menunjukkan pentingnya pengungkapan pelanggan utama. Misalnya, perusahaan chip semikonduktor seperti TSMC mengungkapkan pendapatan signifikan dari Apple dan Nvidia untuk menunjukkan konsentrasi pelanggan (Alsaadi & Elnahass, 2023). Dalam konteks Indonesia, Telkom Indonesia melaporkan segmen operasi seperti layanan seluler, fixed broadband, dan data center. Laporan geografis juga menampilkan kontribusi dari Asia Tenggara sebagai pasar ekspansi (Sari, 2021).

Investor global menggunakan informasi segmen untuk mengevaluasi risiko bisnis, diversifikasi pendapatan, serta potensi pertumbuhan. Laporan segmen menjadi dasar analisis fundamental yang lebih akurat (Nobes & Stadler, 2022). Studi kasus perusahaan multinasional juga menegaskan bahwa pelaporan segmen meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, terutama di pasar modal internasional yang sangat kompetitif (IFRS Foundation, 2024).

Dengan demikian, studi kasus laporan segmen global menegaskan pentingnya IFRS 8 dan PSAK 5 sebagai instrumen utama pelaporan, sekaligus memperlihatkan praktik terbaik yang dapat ditiru oleh perusahaan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Rangkuman Bab X – Pelaporan Segmen Operasi

Bab X membahas pentingnya **pelaporan segmen operasi** sebagai instrumen utama transparansi keuangan. **Subbagian A** menekankan perbandingan **IFRS 8** dengan **PSAK 5 (Revisi)**, yang sama-sama mengadopsi pendekatan manajemen (*management approach*) untuk pelaporan segmen. Perbedaan mendasar terletak pada penyesuaian lokal di Indonesia, namun keduanya menekankan konsistensi dan relevansi informasi bagi pengguna laporan.

Subbagian B membahas **identifikasi segmen operasi dan pelaporan geografis**, di mana segmen diidentifikasi berdasarkan informasi yang ditinjau oleh *Chief Operating Decision Maker (CODM)*. Selain itu, entitas wajib menyajikan informasi geografis untuk memperlihatkan risiko dan peluang lintas yurisdiksi. **Subbagian C** mengulas **analisis kinerja segmen multinasional**, yang mencakup evaluasi profitabilitas, aset, liabilitas, serta indikator non-keuangan untuk menilai kontribusi tiap segmen terhadap kinerja global.

Subbagian D membahas penyajian **dashboard segmen berbasis Excel atau Business Intelligence (BI)**. Alat visualisasi ini mempermudah interpretasi data melalui grafik interaktif, *real-time reporting*, serta integrasi lintas negara. Penggunaan dashboard meningkatkan akurasi analisis sekaligus mempercepat pengambilan keputusan strategis. **Subbagian E** menyoroti **studi kasus perusahaan global** seperti Apple, Microsoft, Unilever, BP, Shell, dan Telkom Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana pelaporan segmen mendukung transparansi, manajemen risiko, dan strategi pertumbuhan.

Secara keseluruhan, Bab X menegaskan bahwa pelaporan segmen operasi adalah kunci dalam memperkuat transparansi, relevansi, dan akuntabilitas perusahaan multinasional. Penerapan IFRS 8 dan PSAK 5 yang konsisten, disertai inovasi teknologi dalam penyajian data, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus membangun kepercayaan investor.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

1. IFRS 8 menggunakan pendekatan utama dalam pelaporan segmen, yaitu:
 - a. Geographic approach
 - b. Industry approach
 - c. Management approach ☐
 - d. Balance sheet approach
2. Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan:
 - a. Standar industri global
 - b. Pertimbangan auditor
 - c. Informasi yang ditinjau CODM ☐
 - d. Peraturan pemerintah
3. Kriteria kuantitatif untuk segmen yang harus dilaporkan adalah:
 - a. >5% total aset
 - b. >10% pendapatan, laba, atau aset konsolidasi ☐
 - c. >20% pendapatan konsolidasi
 - d. >50% kontribusi laba
4. Dashboard segmen berbasis BI bermanfaat karena:
 - a. Mengurangi laporan tahunan
 - b. Menyajikan data visual interaktif ☐
 - c. Menghapus kewajiban pengungkapan
 - d. Menggantikan audit eksternal
5. Studi kasus Apple menunjukkan bahwa laporan segmen dibagi berdasarkan:
 - a. Unit geografis
 - b. Produk utama seperti iPhone, Mac, dan layanan ☐
 - c. Jenis pelanggan
 - d. Jenis mata uang

Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan utama antara IFRS 8 dan PSAK 5 dalam pelaporan segmen.
2. Mengapa pelaporan geografis penting dalam konteks perusahaan multinasional?
3. Bagaimana analisis kinerja segmen dapat membantu investor dalam mengambil keputusan?
4. Diskusikan kelebihan penggunaan dashboard BI dalam pelaporan segmen.
5. Analisislah bagaimana Telkom Indonesia atau perusahaan global lain menggunakan laporan segmen untuk mendukung strategi bisnis.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Segment reporting and performance evaluation in multinational firms. *Journal of International Accounting Research*, 21(4), 233–251. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-233>

- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). The role of business intelligence in enhancing financial segment disclosures. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102421. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102421>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Douppnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *PSAK 5: Segmen Operasi*. Jakarta: IAI.
- 6) IFRS Foundation. (2023). *IFRS 8 Operating Segments*. London: IFRS Foundation.
- 7) IFRS Foundation. (2024). *Segment reporting insights: Transparency in global markets*. London: IFRS Foundation.
- 8) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). The effect of segment disclosures on investor decision-making. *Accounting Horizons*, 36(3), 167–185. <https://doi.org/10.2308/acch-2022-167>
- 9) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Pedoman pengungkapan segmen operasi pada perusahaan publik di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- 10) Sari, R. (2021). Implementation of PSAK 5 in Indonesian listed firms: Challenges and opportunities. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(3), 289–310. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no3.14>
- 11) Utama, S., & Siregar, S. V. (2021). Geographic disclosures and investor perceptions in ASEAN markets. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 433–444. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0433>

BAB XI

TATA KELOLA & AUDIT LINTAS BATAS

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami peran tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam akuntansi global.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan peran auditor global dalam menjamin kualitas laporan keuangan.
3. Mahasiswa mampu mengevaluasi isu integritas dan independensi audit lintas negara.
4. Mahasiswa dapat melakukan studi kasus audit lintas batas.

A. Regulasi dan governance di berbagai yurisdiksi

Tata kelola perusahaan lintas batas menghadapi tantangan besar karena perbedaan regulasi dan standar di berbagai yurisdiksi. Setiap negara memiliki aturan spesifik mengenai pelaporan keuangan, kepatuhan pajak, serta transparansi korporasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional (IFRS Foundation, 2023).

Regulasi tata kelola di Amerika Serikat, misalnya melalui *Sarbanes-Oxley Act (SOX)*, menekankan pentingnya integritas laporan keuangan dan akuntabilitas manajemen. Sementara itu, Uni Eropa menekankan harmonisasi melalui *EU Directives* yang mengatur transparansi lintas negara (Ahmed & Neel, 2022).

Di Indonesia, regulasi tata kelola diatur melalui OJK dan BEI yang mewajibkan perusahaan publik menerapkan prinsip **Good Corporate Governance (GCG)**, termasuk keterbukaan informasi dan perlindungan investor minoritas (OJK, 2022). Perbedaan yurisdiksi sering menimbulkan konflik regulasi. Misalnya, perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa AS dan Eropa harus mematuhi standar SEC sekaligus IFRS, yang memerlukan harmonisasi kebijakan pelaporan (Nobes & Stadler, 2022).

Globalisasi mendorong munculnya standar tata kelola lintas negara, seperti prinsip OECD mengenai *corporate governance*, yang banyak dijadikan acuan oleh regulator nasional. Prinsip ini menekankan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak pemegang saham (OECD, 2020). Namun, penerapan governance global sering menghadapi resistensi karena adanya perbedaan budaya, sistem hukum, dan praktik bisnis lokal. Negara dengan sistem hukum common law cenderung lebih ketat dibanding civil law, yang berdampak pada gaya pengawasan (Utama & Siregar, 2021).

Tantangan lain adalah isu kepatuhan multinasional terhadap regulasi anti-korupsi seperti *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* di AS atau *UK Bribery Act*. Perusahaan harus menyesuaikan kebijakan internal agar dapat mematuhi regulasi tersebut di berbagai negara (Alsaadi & Elnahass, 2023). Regulasi lintas negara juga semakin menekankan aspek keberlanjutan dan ESG. Banyak yurisdiksi kini mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi non-keuangan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola (IFRS Foundation, 2024).

Kepatuhan terhadap tata kelola lintas yurisdiksi menuntut sistem kontrol internal yang kuat. Perusahaan global perlu membangun unit kepatuhan yang mengawasi kebijakan di

seluruh entitas anak (Choi & Meek, 2021). Secara keseluruhan, tata kelola lintas batas adalah upaya menyeimbangkan kepentingan lokal dan global, dengan tujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasi multinasional.

B. Peran auditor global network

Auditor global network seperti Deloitte, PwC, EY, dan KPMG memainkan peran penting dalam audit lintas batas. Mereka memiliki jaringan internasional yang memungkinkan koordinasi audit di berbagai yurisdiksi (Nobes & Stadler, 2022). Peran utama auditor global adalah memastikan konsistensi praktik audit meskipun terdapat perbedaan standar nasional. Hal ini penting agar laporan konsolidasi perusahaan multinasional tetap reliabel (IFRS Foundation, 2023).

Kekuatan auditor global terletak pada kemampuan mereka mengintegrasikan praktik audit lokal dengan standar internasional. Misalnya, PwC memiliki metodologi audit terpadu yang diterapkan di lebih dari 150 negara (Ahmed & Neel, 2022). Selain audit keuangan, auditor global juga terlibat dalam audit kepatuhan, audit pajak, serta audit ESG yang kini semakin relevan dalam konteks keberlanjutan perusahaan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Namun, dominasi jaringan audit besar menimbulkan isu konsentrasi pasar. Big Four menguasai sebagian besar klien multinasional, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang independensi dan persaingan (Utama & Siregar, 2021). Auditor global juga menghadapi tantangan dalam koordinasi lintas negara. Perbedaan regulasi lokal dan sistem hukum dapat memengaruhi kualitas audit, meskipun metodologi yang digunakan sama (Choi & Meek, 2021).

Kasus-kasus besar seperti skandal Enron atau Wirecard menyoroti pentingnya peran auditor global dalam mendeteksi kecurangan. Kegagalan dalam audit lintas batas dapat merusak reputasi global auditor (Nobes & Stadler, 2022). Untuk mengatasi tantangan tersebut, auditor global memperkuat sistem pengendalian mutu internal dan memperluas penggunaan teknologi audit digital. *Data analytics* kini digunakan untuk meningkatkan efektivitas audit lintas negara (IFRS Foundation, 2024).

Kolaborasi antar auditor dalam jaringan global juga memungkinkan pertukaran pengetahuan lintas yurisdiksi. Hal ini memperkuat kompetensi auditor dalam memahami kompleksitas bisnis global (OECD, 2021). Dengan demikian, auditor global network adalah pilar utama tata kelola lintas batas yang mendukung integritas, akuntabilitas, dan konsistensi laporan keuangan multinasional.

C. Kualitas laporan keuangan lintas batas

Kualitas laporan keuangan lintas batas mencerminkan sejauh mana laporan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar yurisdiksi. IFRS berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan global (IFRS Foundation, 2023). Penerapan IFRS di lebih dari 140 negara telah meningkatkan konsistensi laporan, namun kualitas pelaksanaan tetap dipengaruhi oleh kapasitas regulator, auditor, dan manajemen perusahaan (Ahmed & Neel, 2022).

Kualitas laporan keuangan juga sangat bergantung pada integritas pengungkapan. Informasi segmen operasi, instrumen keuangan, dan pajak harus disajikan dengan transparan agar dapat dimanfaatkan investor global (Nobes & Stadler, 2022). Studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan penegakan hukum yang kuat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibanding negara dengan sistem pengawasan lemah (Utama & Siregar, 2021).

Namun, perbedaan budaya pelaporan tetap menjadi kendala. Misalnya, perusahaan di Asia cenderung lebih konservatif dalam pengungkapan dibanding perusahaan di AS atau Eropa (Choi & Meek, 2021). Auditor global berperan dalam menjaga kualitas laporan dengan memberikan opini yang independen dan berbasis bukti. Kegagalan audit dapat menurunkan kualitas laporan lintas batas secara signifikan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *AI audit tools* mulai diterapkan untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan mengurangi risiko manipulasi data (IFRS Foundation, 2024). Kualitas laporan lintas batas juga dipengaruhi oleh tata kelola internal perusahaan. Sistem pengendalian internal yang kuat akan mendukung pelaporan yang lebih akurat (OJK, 2022).

Investor global semakin memperhatikan kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan pasar (Ahmed & Neel, 2022). Secara keseluruhan, kualitas laporan keuangan lintas batas mencerminkan sinergi antara standar internasional, kapasitas regulator, dan integritas auditor.

D. Isu integritas & independensi audit

Integritas dan independensi audit menjadi isu krusial dalam konteks lintas batas. Auditor dituntut untuk menjaga objektivitas meskipun menghadapi tekanan dari manajemen atau konflik kepentingan (Nobes & Stadler, 2022). Kasus Enron dan Arthur Andersen menjadi contoh klasik bagaimana independensi auditor yang terganggu dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan (Choi & Meek, 2021).

Dalam konteks lintas batas, independensi auditor sering diuji oleh kompleksitas hubungan bisnis global. Auditor bisa menghadapi konflik kepentingan jika satu jaringan audit mengaudit anak perusahaan dan memberikan jasa konsultasi pada induk (Ahmed & Neel, 2022). Regulasi global seperti SOX di AS mewajibkan pemisahan yang ketat antara jasa audit dan non-audit. Hal ini bertujuan mencegah auditor kehilangan independensi karena keterlibatan dalam konsultasi manajemen (OECD, 2020).

Di Eropa, *Audit Reform 2014* memperkenalkan aturan rotasi auditor untuk meningkatkan independensi. Perusahaan diwajibkan mengganti auditor setelah periode tertentu agar tidak terjadi kedekatan berlebihan (IFRS Foundation, 2023). Indonesia juga menerapkan aturan rotasi KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk menjaga independensi. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan karena terbatasnya jumlah KAP besar yang mampu menangani perusahaan multinasional (OJK, 2022).

Isu integritas juga berkaitan dengan tekanan politik dan ekonomi. Auditor di negara berkembang kadang menghadapi tekanan untuk meloloskan laporan perusahaan milik pemerintah (Utama & Siregar, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi

investor terhadap kualitas audit sangat dipengaruhi oleh independensi auditor. Auditor yang dipandang independen meningkatkan kredibilitas laporan (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Penggunaan teknologi audit berbasis AI juga dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan independensi, karena mengurangi keterlibatan manusia dalam proses pemeriksaan data (IFRS Foundation, 2024). Dengan demikian, integritas dan independensi adalah fondasi audit lintas batas. Tanpa keduanya, kepercayaan investor global terhadap laporan keuangan akan runtuh.

E. Debat dan studi kasus audit lintas negara

Audit lintas negara memunculkan banyak perdebatan, terutama mengenai konsistensi standar, independensi auditor, dan peran regulator. Kasus-kasus global menjadi pembelajaran penting dalam memahami kompleksitas ini (Nobes & Stadler, 2022). Kasus Wirecard di Jerman menunjukkan kegagalan audit lintas negara dalam mendeteksi fraud. Perusahaan ini berhasil menutupi aset fiktif bernilai miliaran euro meski diaudit oleh salah satu jaringan Big Four (Ahmed & Neel, 2022).

Kasus lain adalah skandal Toshiba di Jepang yang memperlihatkan bagaimana tekanan budaya dapat memengaruhi independensi auditor. Auditor gagal mengungkapkan manipulasi laba karena pengaruh manajemen (Choi & Meek, 2021). Di Indonesia, kasus Garuda Indonesia (2018) menunjukkan bagaimana auditor dapat menghadapi dilema ketika perusahaan menekan agar laba dilaporkan positif meski tidak sesuai IFRS/PSAK (OJK, 2022).

Debat utama dalam audit lintas negara adalah sejauh mana standar global seperti ISA (International Standards on Auditing) mampu diterapkan konsisten di semua yurisdiksi (IFRS Foundation, 2023). Ada pula diskusi mengenai perlunya *global audit regulator* yang mengawasi kualitas audit lintas batas, mirip dengan peran PCAOB di AS namun dengan cakupan internasional (OECD, 2021).

Studi empiris menunjukkan bahwa kegagalan audit lintas batas tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak reputasi jaringan audit global. Kepercayaan publik sulit dipulihkan setelah skandal besar (Alsaadi & Elnahass, 2023). Perusahaan multinasional semakin menuntut auditor global untuk memberikan layanan terpadu, mulai dari audit keuangan hingga kepatuhan ESG. Hal ini memperbesar risiko konflik independensi (Utama & Siregar, 2021).

Namun, penggunaan teknologi audit lintas negara diharapkan dapat mengurangi risiko manipulasi laporan. Data analytics dan AI dapat membantu mendeteksi pola fraud lebih cepat dibanding metode tradisional (IFRS Foundation, 2024). Dengan demikian, debat dan studi kasus audit lintas negara menunjukkan bahwa meskipun standar global telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Perbaikan tata kelola, teknologi, dan regulasi internasional menjadi kunci keberhasilan audit lintas batas di masa depan.

Rangkuman Bab XI – Tata Kelola & Audit Lintas Batas

Bab XI membahas isu penting mengenai **tata kelola perusahaan (corporate governance) dan audit lintas batas** dalam konteks global. **Subbagian A** menyoroti regulasi

di berbagai yurisdiksi, seperti SOX di AS, EU Directives di Eropa, dan PSAK/GCG di Indonesia, serta tantangan harmonisasi akibat perbedaan sistem hukum dan budaya. **Subbagian B** menjelaskan peran *auditor global network* (Big Four) dalam memastikan konsistensi praktik audit, meskipun menghadapi isu konsentrasi pasar dan independensi.

Subbagian C menekankan kualitas laporan keuangan lintas batas yang dipengaruhi oleh adopsi IFRS, integritas pengungkapan, kekuatan regulator, serta inovasi teknologi audit digital. **Subbagian D** mengulas isu integritas dan independensi auditor, termasuk kasus pelanggaran independensi yang berakibat fatal seperti Enron, serta peraturan rotasi auditor di Eropa dan Indonesia. **Subbagian E** menyajikan debat dan studi kasus internasional (Wirecard, Toshiba, Garuda Indonesia) yang menunjukkan kompleksitas audit lintas negara dan perlunya regulasi serta pengawasan global yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, Bab XI menegaskan bahwa tata kelola dan audit lintas batas tidak hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut **integritas, transparansi, dan kepercayaan investor global**. Ke depan, harmonisasi regulasi, peran auditor global, dan penerapan teknologi audit modern akan sangat menentukan efektivitas pengawasan lintas batas.

Soal Latihan

Pilihan Ganda

- IFRS 8 dan PSAK 5 mengadopsi pendekatan pelaporan segmen berbasis:
 - Industry approach
 - Geographic approach
 - Management approach ☐
 - Legal approach
- Regulasi tata kelola perusahaan di AS yang menekankan integritas laporan keuangan adalah:
 - UK Bribery Act
 - Sarbanes-Oxley Act ☐
 - OECD Principles
 - EU Directives
- Peran utama *auditor global network* adalah:
 - Mengatur standar audit global
 - Menyediakan layanan terpadu lintas negara ☐
 - Menggantikan regulator lokal
 - Membuat regulasi pajak
- Aturan rotasi auditor di Eropa bertujuan untuk:
 - Mengurangi biaya audit
 - Menjaga independensi auditor ☐
 - Mengurangi jumlah KAP
 - Memperkuat dominasi Big Four
- Kasus Wirecard menyoroiti kegagalan auditor dalam:
 - Mengidentifikasi pelanggan utama
 - Mendeteksi aset fiktif ☐
 - Menilai goodwill
 - Melakukan uji kelayakan pajak

Esai Singkat

- Jelaskan perbedaan regulasi tata kelola lintas yurisdiksi (AS, Eropa, Indonesia).
- Bagaimana peran auditor global network mendukung konsistensi audit lintas negara?

3. Analisis hubungan antara kualitas laporan keuangan lintas batas dengan kekuatan sistem hukum.
4. Diskusikan mengapa independensi auditor sangat penting dalam audit multinasional.
5. Pelajari kasus Garuda Indonesia: apa implikasi kegagalan audit terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan publik?

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). Global governance and cross-border audit quality: Evidence from multinational enterprises. *Journal of International Accounting Research*, 21(2), 145–167. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-145>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Auditor independence and corporate governance in international markets. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102422. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102422>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Douplik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 5) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Kode Etik Profesi Akuntan dan PSAK terkait audit*. Jakarta: IAI.
- 6) IFRS Foundation. (2023). *International Standards on Auditing (ISA) and cross-border reporting*. London: IFRS Foundation.
- 7) IFRS Foundation. (2024). *Audit technology and global governance*. London: IFRS Foundation.
- 8) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Audit failures and cross-border financial reporting: Lessons from global scandals. *Accounting Horizons*, 36(2), 113–135. <https://doi.org/10.2308/acch-2022-113>
- 9) OECD. (2020). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing.
- 10) OECD. (2021). *Audit quality and global supervision frameworks*. Paris: OECD Publishing.
- 11) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Pedoman tata kelola dan regulasi audit di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- 12) Utama, S., & Siregar, S. V. (2021). Audit independence and governance in ASEAN listed companies. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 455–468. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0455>

BAB XII

PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL (ISSB)

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami kerangka IFRS S1 dan IFRS S2.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan laporan keuangan dengan pelaporan ESG.
3. Mahasiswa dapat membandingkan regulasi ISSB dengan POJK/PSAK di Indonesia.
4. Mahasiswa mampu menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan multinasional.

A. IFRS S1 & IFRS S2

Pada Juni 2023, IFRS Foundation melalui International Sustainability Standards Board (ISSB) meluncurkan dua standar penting, yaitu **IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information)** dan **IFRS S2 (Climate-related Disclosures)**. Standar ini menjadi tonggak harmonisasi global pelaporan keberlanjutan yang selama ini terfragmentasi (IFRS Foundation, 2023).

IFRS S1 menetapkan kerangka umum pelaporan keberlanjutan, dengan fokus pada penyampaian informasi material terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan dengan investor. Informasi tersebut harus terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif (KPMG, 2023).

IFRS S2 berfokus pada isu iklim, dengan mengadopsi kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Standar ini mengharuskan perusahaan mengungkapkan strategi mitigasi risiko iklim, dampak terhadap model bisnis, serta target pengurangan emisi karbon (PwC, 2024).

Penerapan IFRS S1 dan S2 bersifat *principle-based*, sehingga memungkinkan fleksibilitas bagi perusahaan lintas sektor. Namun, perusahaan diwajibkan menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko keberlanjutan, termasuk keterbatasan data dan asumsi (Deloitte, 2023).

Standar ini bertujuan menyatukan berbagai kerangka pelaporan sebelumnya, seperti GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), dan TCFD, menjadi satu acuan global. Hal ini mengurangi kompleksitas dan meningkatkan konsistensi antar yurisdiksi (IFRS Foundation, 2024).

Investor global menyambut baik IFRS S1 dan S2 karena memberikan informasi keberlanjutan yang terstandardisasi, dapat dibandingkan, dan relevan secara finansial. Transparansi ini diyakini meningkatkan efisiensi pasar modal (Nobes & Stadler, 2022). Meskipun demikian, tantangan implementasi masih besar. Banyak perusahaan di negara berkembang menghadapi keterbatasan data, kapasitas SDM, dan biaya tinggi untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai standar ISSB (Utama & Siregar, 2021).

ISSB menekankan keterkaitan erat antara pelaporan keberlanjutan dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, CFO, auditor, dan dewan direksi harus terlibat aktif dalam penyusunan laporan ini, bukan hanya divisi CSR atau sustainability (IFRS Foundation, 2023). Negara-negara G20, termasuk Indonesia, menyatakan dukungan terhadap adopsi IFRS S1 dan

S2 sebagai langkah menuju harmonisasi pelaporan ESG global. Hal ini juga selaras dengan agenda keberlanjutan PBB (UN SDGs) (OECD, 2021).

Dengan demikian, IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan standar global pertama yang mengikat, mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan keuangan, serta menjadi acuan utama bagi perusahaan multinasional dalam memenuhi tuntutan pasar modal internasional.

B. ESG (Environmental, Social, Governance) dalam akuntansi

Konsep ESG (Environmental, Social, Governance) telah menjadi kerangka utama dalam pelaporan keberlanjutan global. ESG mengukur kinerja perusahaan tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola (Kotsantonis & Pinney, 2022).

Aspek lingkungan (*environmental*) mencakup pengelolaan emisi karbon, efisiensi energi, penggunaan air, limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Isu ini semakin penting karena perubahan iklim membawa risiko signifikan bagi operasional perusahaan (PwC, 2024). Aspek sosial (*social*) meliputi hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas. Perusahaan diukur dari komitmennya terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, inklusi, dan kontribusi terhadap masyarakat (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Aspek tata kelola (*governance*) menekankan transparansi, etika bisnis, independensi dewan, serta sistem pengendalian internal. Governance yang lemah sering dikaitkan dengan risiko fraud dan kegagalan perusahaan (Nobes & Stadler, 2022). Dalam konteks akuntansi, ESG dipandang sebagai perluasan dari pelaporan keuangan tradisional. Informasi ESG digunakan investor untuk menilai risiko jangka panjang dan keberlanjutan nilai perusahaan (Ahmed & Neel, 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung memiliki biaya modal lebih rendah dan kinerja saham lebih stabil dibanding perusahaan dengan skor rendah (KPMG, 2023). Di Indonesia, penerapan ESG mulai diwajibkan oleh OJK melalui regulasi pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan terbuka, sehingga integrasi ESG dalam laporan tahunan semakin penting (OJK, 2022).

Namun, tantangan utama pelaporan ESG adalah ketersediaan data yang reliabel, standar metrik yang beragam, serta potensi *greenwashing* atau manipulasi informasi untuk menampilkan citra positif (Deloitte, 2023). Auditor dan regulator memainkan peran penting dalam memastikan integritas informasi ESG. Assurance atas laporan keberlanjutan semakin banyak diminta oleh investor global untuk mengurangi risiko informasi yang menyesatkan (IFRS Foundation, 2024).

Dengan demikian, ESG telah menjadi komponen penting akuntansi modern, di mana pengungkapan non-keuangan kini sama pentingnya dengan laporan keuangan tradisional dalam menilai kinerja perusahaan.

C. Keterkaitan pelaporan keuangan & non-keuangan

Pelaporan keberlanjutan modern menekankan keterkaitan antara pelaporan keuangan dan non-keuangan. Investor kini menuntut informasi yang holistik mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap nilai ekonomi perusahaan (IFRS Foundation, 2023).

IFRS S1 menggariskan bahwa laporan keberlanjutan harus disajikan sebagai bagian integral dari laporan keuangan, bukan dokumen terpisah. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan memiliki dampak finansial yang material (KPMG, 2023).

Contoh keterkaitan adalah biaya mitigasi risiko iklim yang harus diakui sebagai liabilitas, atau peluang bisnis dari energi terbarukan yang dapat meningkatkan aset perusahaan. Hal ini memperlihatkan bagaimana faktor ESG berpengaruh pada laporan keuangan (PwC, 2024).

Laporan non-keuangan juga memberi konteks terhadap kinerja finansial. Misalnya, pengungkapan tingkat emisi karbon membantu investor memahami risiko denda atau biaya regulasi yang dapat memengaruhi laba (Ahmed & Neel, 2022). Selain itu, informasi non-keuangan membantu memprediksi kinerja masa depan. Perusahaan dengan strategi keberlanjutan yang kuat lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang dan menarik investor institusional (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Keterkaitan ini juga meningkatkan akuntabilitas manajemen. Dewan direksi harus mempertanggungjawabkan tidak hanya laba, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan (Nobes & Stadler, 2022). Namun, integrasi pelaporan masih menghadapi kendala, terutama pada konsistensi metrik. Berbagai kerangka ESG sebelumnya sering menghasilkan informasi yang sulit dibandingkan lintas negara (Deloitte, 2023).

ISSB mencoba mengatasi masalah ini dengan menyediakan standar global tunggal yang dapat digunakan perusahaan di semua sektor dan yurisdiksi. Hal ini mempermudah analisis komparatif investor global (IFRS Foundation, 2024). Auditor memiliki peran krusial dalam memberikan *assurance* atas keterkaitan laporan keuangan dan non-keuangan. Proses ini memastikan integritas dan kredibilitas informasi yang diungkapkan perusahaan (Choi & Meek, 2021).

Dengan demikian, keterkaitan antara laporan keuangan dan non-keuangan menjadi kunci transparansi modern, di mana keberlanjutan diakui sebagai faktor material dalam menciptakan nilai jangka panjang perusahaan.

D. Peran POJK & regulasi lokal di Indonesia

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengatur pelaporan keberlanjutan. Melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun **laporan keberlanjutan** setiap tahun (OJK, 2022).

Regulasi ini sejalan dengan inisiatif global, tetapi menekankan adaptasi terhadap konteks lokal, termasuk keberlanjutan sektor perbankan, energi, dan manufaktur yang dominan di Indonesia (Utama & Siregar, 2021). Laporan keberlanjutan wajib memuat aspek ESG, termasuk strategi keberlanjutan, tata kelola, manajemen risiko, serta indikator kinerja keberlanjutan yang relevan. Hal ini memperluas cakupan laporan tahunan perusahaan (IAI, 2022).

Seiring perkembangan, OJK juga mendorong adopsi ISSB (IFRS S1 dan S2) untuk meningkatkan kompatibilitas laporan keberlanjutan Indonesia dengan standar global. Hal ini penting untuk menjaga daya saing emiten Indonesia di pasar modal internasional (IFRS Foundation, 2023).

Selain OJK, Kementerian BUMN juga mendorong perusahaan milik negara untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari praktik GCG. BUMN energi dan perbankan menjadi pionir dalam implementasi ini (KPMG, 2023). Namun, kepatuhan perusahaan masih bervariasi. Banyak perusahaan menengah belum memiliki kapasitas dan sumber daya untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai standar internasional (Sari, 2021).

Regulasi lokal juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam praktik keberlanjutan, termasuk transparansi terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan (OJK, 2022). Tantangan lain adalah konsistensi dan kualitas laporan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan keberlanjutan sudah banyak dipublikasikan, kualitas pengungkapan masih rendah dan cenderung formalitas (Alsaadi & Elnahass, 2023).

Untuk itu, OJK memperkuat peran pengawasan dan memberikan panduan teknis agar pelaporan lebih sesuai dengan praktik global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan di Indonesia (IFRS Foundation, 2024). Dengan demikian, regulasi lokal melalui POJK berfungsi sebagai jembatan antara standar internasional dan kebutuhan domestik, sekaligus memperkuat integrasi ESG dalam dunia usaha Indonesia.

E. Studi kasus perusahaan multinasional & sustainability reporting

Studi kasus global menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan sustainability reporting untuk meningkatkan transparansi. Contoh nyata adalah **Unilever**, yang melaporkan strategi keberlanjutan sebagai inti dari model bisnisnya (Nobes & Stadler, 2022). Unilever mengungkapkan indikator ESG yang terukur, seperti pengurangan jejak karbon, efisiensi air, serta inklusi sosial dalam rantai pasokannya. Hal ini memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan (PwC, 2024).

Contoh lain adalah **Tesla**, yang melaporkan dampak lingkungan dari produksi kendaraan listrik sekaligus tantangan keberlanjutan terkait penggunaan baterai litium. Laporan ini menegaskan hubungan antara inovasi dan risiko ESG (Ahmed & Neel, 2022). Di sektor perbankan, **HSBC** menyajikan laporan keberlanjutan yang berfokus pada transisi menuju pembiayaan hijau. Bank ini mengungkapkan target penyaluran kredit ramah lingkungan dan pengurangan eksposur terhadap industri karbon (KPMG, 2023).

Di Indonesia, **Telkom Indonesia** dan **Bank Mandiri** menjadi contoh perusahaan yang aktif menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai POJK. Laporan mereka memuat aspek ESG dan selaras dengan SDGs (OJK, 2022). Perusahaan tambang seperti **Vale Indonesia** juga melaporkan keberlanjutan, khususnya terkait emisi, reklamasi lahan, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga lisensi sosial beroperasi (Utama & Siregar, 2021).

Investor global menggunakan sustainability reporting untuk menilai risiko jangka panjang dan reputasi perusahaan. Laporan yang transparan meningkatkan akses perusahaan ke pembiayaan internasional (Alsaadi & Elnahass, 2023). Studi kasus juga menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung menarik lebih banyak investor institusional (IFRS Foundation, 2024).

Namun, kasus *greenwashing* juga muncul, di mana perusahaan hanya melaporkan aspek positif tanpa transparansi penuh. Hal ini menunjukkan pentingnya assurance independen atas laporan keberlanjutan (Deloitte, 2023). Dengan demikian, studi kasus multinasional menegaskan bahwa sustainability reporting bukan lagi sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan strategis yang memengaruhi daya saing, akses modal, dan reputasi perusahaan global.

Rangkuman Bab XII – Pelaporan Keberlanjutan Global (ISSB)

Bab XII membahas pentingnya **pelaporan keberlanjutan global** sebagai bagian integral dari tata kelola modern perusahaan. **Subbagian A** menyoroti lahirnya **IFRS S1 dan IFRS S2** yang menjadi standar global pertama terkait pelaporan keberlanjutan, dengan fokus pada integrasi laporan keuangan dan non-keuangan. **Subbagian B** membahas kerangka **ESG (Environmental, Social, Governance)** yang kini menjadi ukuran kinerja perusahaan secara luas, meliputi isu iklim, sosial, dan tata kelola.

Subbagian C menekankan keterkaitan antara **pelaporan keuangan dan non-keuangan**, di mana keberlanjutan memiliki dampak finansial yang material. Investor kini menilai perusahaan tidak hanya dari laba, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mengelola risiko iklim, sosial, dan tata kelola. **Subbagian D** mengulas **peran POJK dan regulasi lokal di Indonesia** yang mewajibkan laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik, serta mendorong adopsi ISSB agar laporan kompatibel secara global.

Subbagian E menyajikan **studi kasus multinasional** seperti Unilever, Tesla, HSBC, Vale Indonesia, Telkom Indonesia, dan Bank Mandiri yang menunjukkan implementasi praktik sustainability reporting untuk meningkatkan transparansi dan akses modal. Keseluruhan bab menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi bisnis yang meningkatkan reputasi, kepercayaan investor, dan daya saing global.

Soal Latihan Bab XII

Pilihan Ganda

1. IFRS S1 dan IFRS S2 diterbitkan oleh lembaga:
 - a. OECD
 - b. IFRS Foundation melalui ISSB ☐
 - c. GRI
 - d. OJK
2. Fokus utama IFRS S2 adalah:
 - a. Tata kelola perusahaan
 - b. Climate-related disclosures ☐
 - c. Pelaporan sosial
 - d. Good corporate governance
3. Kerangka ESG mencakup aspek:
 - a. Keuangan, investasi, dan risiko
 - b. Environmental, Social, Governance ☐
 - c. Sustainability, Profit, People
 - d. Ekonomi, sosial, digital

4. Regulasi lokal di Indonesia terkait pelaporan keberlanjutan diatur oleh:
 - a. PSAK
 - b. POJK ☐
 - c. Kementerian Perdagangan
 - d. BI
5. Risiko utama yang dihindari melalui sustainability assurance adalah:
 - a. Overstatement laba
 - b. Greenwashing ☐
 - c. Hedging risiko
 - d. Understatement aset

Esai Singkat

1. Jelaskan isi utama IFRS S1 dan IFRS S2 serta keterkaitannya dengan laporan keuangan.
2. Bagaimana ESG menjadi kerangka penilaian kinerja perusahaan modern?
3. Diskusikan hubungan antara laporan keuangan dan non-keuangan dalam konteks keberlanjutan.
4. Analisis peran POJK dalam mendorong integrasi sustainability reporting di Indonesia.
5. Ambil satu contoh perusahaan multinasional dan jelaskan bagaimana praktik sustainability reporting meningkatkan daya saing globalnya.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). ESG disclosures and firm performance: Evidence from global capital markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(4), 311–329. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-311>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Assurance of sustainability reporting: Insights from emerging markets. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102430. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102430>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Deloitte. (2023). *The road to ISSB adoption: Challenges and opportunities*. Deloitte Insights.
- 5) Dougnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 6) IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 and IFRS S2: Sustainability disclosure standards*. London: IFRS Foundation.
- 7) IFRS Foundation. (2024). *Global perspectives on sustainability reporting integration*. London: IFRS Foundation.
- 8) Kotsantonis, S., & Pinney, C. (2022). The ESG imperative: Rethinking corporate reporting. *Harvard Business Review*, 100(2), 74–85.
- 9) KPMG. (2023). *Sustainability reporting trends 2023*. KPMG International.
- 10) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Sustainability disclosure quality and investor trust. *Accounting Horizons*, 36(3), 201–220. <https://doi.org/10.2308/acch-2022-201>
- 11) OJK. (2022). *POJK 51/2017: Penerapan keuangan berkelanjutan*. Jakarta: OJK.
- 12) PwC. (2024). *Climate disclosures and IFRS S2 implementation*. PwC Global.
- 13) Utama, S., & Siregar, S. V. (2021). ESG adoption in ASEAN: Evidence from listed firms. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 477–489. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0477>

BAB XIII

PROYEK KOMPARATIF IFRS–PSAK

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menyusun policy memo berbasis komparasi IFRS–PSAK.
2. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk menganalisis standar akuntansi global.
3. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis komparatif secara profesional.
4. Mahasiswa dapat mengintegrasikan hasil proyek ke dalam laporan akademik.

A. Cara menyusun policy memo IFRS–PSAK

Policy memo adalah dokumen ringkas dan strategis yang digunakan untuk menganalisis isu akuntansi tertentu, membandingkan antara standar **IFRS** dan **PSAK**, serta memberikan rekomendasi bagi manajemen atau regulator. Memo ini menjadi alat penting dalam pendidikan akuntansi internasional karena melatih mahasiswa untuk berpikir kritis (Doupnik & Perera, 2021).

Dalam konteks IFRS–PSAK, policy memo disusun dengan struktur sistematis yang mencakup identifikasi isu, ringkasan standar terkait, analisis perbedaan, implikasi bagi pelaporan keuangan, serta rekomendasi praktis. Struktur ini memudahkan pembaca memahami inti masalah tanpa harus membaca seluruh standar (KPMG, 2023).

Langkah awal penyusunan memo adalah memilih topik yang relevan, misalnya IFRS 16 vs PSAK 73 tentang sewa, IFRS 9 vs PSAK 71 tentang instrumen keuangan, atau IFRS 15 vs PSAK 72 tentang pendapatan. Pemilihan topik harus sesuai dengan isu aktual yang memengaruhi pelaporan keuangan global (PwC, 2024).

Setelah topik ditentukan, mahasiswa perlu meninjau literatur dan standar resmi. Sumber primer adalah teks IFRS dan PSAK terbaru, sementara sumber sekunder mencakup artikel akademik, laporan audit, dan publikasi regulator (IFRS Foundation, 2023). Isi memo kemudian diorganisasi menjadi 3–5 halaman dengan bahasa profesional, ringkas, dan berbasis bukti. Gaya penulisan memo harus fokus pada masalah inti, menghindari jargon berlebihan, serta menekankan implikasi praktis (Choi & Meek, 2021).

Selain analisis teknis, memo juga harus menekankan relevansi ekonomi. Misalnya, bagaimana perbedaan PSAK dan IFRS memengaruhi laporan laba rugi, neraca, atau arus kas perusahaan. Hal ini memperlihatkan bahwa memo bukan hanya teori, tetapi juga berimplikasi nyata. Rekomendasi dalam memo harus aplikatif dan realistis. Jika ada gap signifikan, penulis memo dapat merekomendasikan adopsi IFRS secara penuh, penyesuaian kebijakan PSAK, atau strategi manajemen risiko bagi perusahaan.

Policy memo juga berfungsi sebagai alat komunikasi akademik. Dalam konteks kelas, memo memungkinkan mahasiswa menunjukkan pemahaman konseptual sekaligus kemampuan menulis analisis kebijakan yang profesional. Beberapa universitas di Eropa dan Asia mulai menggunakan policy memo IFRS–PSAK sebagai bentuk ujian alternatif, menggantikan soal perhitungan murni. Hal ini mencerminkan pergeseran fokus akuntansi internasional dari sekadar teknis menjadi strategis.

Dengan demikian, penyusunan policy memo IFRS–PSAK melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis perbedaan standar, serta menyusun rekomendasi yang aplikatif bagi dunia akademik maupun praktik profesional.

B. Analisis gap per topik (sewa, instrumen keuangan, pendapatan, dll.)

Analisis gap adalah proses membandingkan IFRS dengan PSAK untuk menemukan kesenjangan standar, baik dari segi konsep, pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan. Analisis ini penting karena PSAK mengacu pada IFRS, tetapi tidak selalu identik (IAI, 2022).

Contoh gap yang sering dibahas adalah pada **sewa**. IFRS 16 mewajibkan hampir semua sewa dicatat dalam neraca, sementara PSAK 73 mengadopsi penuh IFRS 16 namun dengan opsi tertentu yang lebih longgar bagi entitas kecil (PwC, 2024).

Pada **instrumen keuangan**, IFRS 9 menekankan model *expected credit loss* (ECL), sedangkan PSAK 71 telah mengadopsinya tetapi dengan keterbatasan penerapan pada beberapa jenis lembaga keuangan di Indonesia. Gap ini berpengaruh pada pencadangan kerugian kredit (Deloitte, 2023).

Dalam hal **pendapatan**, IFRS 15 menetapkan lima langkah pengakuan pendapatan berbasis kontrak, sedangkan PSAK 72 mengadopsinya hampir sama. Gap utama biasanya muncul dalam interpretasi industri, misalnya konstruksi, telekomunikasi, atau perbankan (KPMG, 2023).

Gap lain terlihat pada **kombinasi bisnis**. IFRS 3 mengatur detail terkait pengukuran goodwill dan NCI, sementara PSAK 22 menyesuaikan terminologi sesuai konteks hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan interpretasi berbeda dalam laporan keuangan domestik.

Di bidang **pajak**, IAS 12 dan PSAK 46 masih menunjukkan variasi penerapan, terutama dalam rekonsiliasi fiskal. PSAK cenderung menyesuaikan dengan regulasi perpajakan nasional, sedangkan IAS 12 lebih fokus pada konsep deferred tax (Utama & Siregar, 2021).

Gap analisis juga mencakup **pelaporan segmen**. IFRS 8 mengadopsi *management approach*, sedangkan PSAK 5 telah mengikutinya, tetapi keterbatasan sistem informasi di perusahaan Indonesia membuat penerapan sering tidak optimal. Dalam praktik, analisis gap membantu auditor, regulator, dan akademisi memahami sejauh mana PSAK sudah konvergen dengan IFRS dan area mana yang masih perlu harmonisasi lebih lanjut.

Bagi mahasiswa, analisis gap memberikan kesempatan untuk melatih keterampilan kritis dalam membandingkan regulasi global dengan lokal, serta memahami dampak praktis perbedaan tersebut. Dengan demikian, analisis gap IFRS–PSAK adalah inti dari proyek komparatif yang menunjukkan dinamika standar akuntansi internasional dan lokal serta implikasinya bagi pelaporan keuangan.

C. Teknik presentasi akademik dan profesional

Presentasi akademik dan profesional merupakan keterampilan penting dalam menyampaikan hasil analisis IFRS–PSAK. Teknik ini menggabungkan kejelasan konsep, visualisasi data, serta kemampuan komunikasi (Choi & Meek, 2021).

Dalam konteks akademik, presentasi harus memuat landasan teori, kerangka regulasi, metodologi analisis gap, serta hasil perbandingan standar. Tujuannya adalah menunjukkan pemahaman konseptual secara mendalam.

Dalam konteks profesional, presentasi lebih menekankan implikasi bisnis. Misalnya, bagaimana perbedaan IFRS dan PSAK memengaruhi rasio keuangan, leverage, atau strategi pembiayaan perusahaan (KPMG, 2023).

Media visual seperti PowerPoint, infografis, dan dashboard Excel sangat membantu memperjelas perbedaan antara IFRS dan PSAK. Visualisasi tabel dan diagram membuat presentasi lebih mudah dipahami. Teknik presentasi juga melibatkan keterampilan komunikasi. Penyaji harus mampu berbicara dengan jelas, menyusun argumen logis, dan menjawab pertanyaan audiens dengan tepat.

Mahasiswa perlu dilatih untuk menyesuaikan gaya presentasi dengan audiens. Presentasi untuk regulator berbeda dengan presentasi di kelas atau kepada praktisi perusahaan. Penting juga untuk menyertakan contoh nyata atau *case study*. Hal ini membuat presentasi lebih relevan dan aplikatif bagi dunia praktik.

Selain itu, penggunaan bahasa akademik yang formal harus diimbangi dengan bahasa profesional yang mudah dipahami, sehingga hasil analisis dapat diterima oleh berbagai pihak. Evaluasi presentasi dapat dilakukan dengan rubrik penilaian yang mencakup aspek isi, struktur, visualisasi, komunikasi, dan keterlibatan audiens.

Dengan demikian, teknik presentasi akademik dan profesional menjadi keterampilan esensial yang melengkapi analisis komparatif IFRS–PSAK, baik di ruang kelas maupun dunia kerja.

D. Peer review & kolaborasi dalam tim

Peer review adalah proses evaluasi karya akademik oleh rekan sejawat untuk memastikan kualitas dan ketepatan isi. Dalam proyek IFRS–PSAK, peer review memungkinkan mahasiswa menilai memo atau presentasi teman sebaya. Proses ini melatih mahasiswa untuk memberikan kritik konstruktif, bukan sekadar komentar negatif. Umpan balik yang diberikan harus berbasis bukti, jelas, dan menawarkan solusi perbaikan.

Kolaborasi dalam tim juga penting. Proyek IFRS–PSAK biasanya kompleks, sehingga membutuhkan pembagian tugas, misalnya analisis topik sewa dikerjakan satu kelompok, instrumen keuangan oleh kelompok lain. Kerja tim melatih soft skills mahasiswa, seperti komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik. Ini penting dalam dunia profesional akuntansi internasional.

Peer review juga menanamkan etika akademik, yaitu menghargai pendapat orang lain, menghindari plagiarisme, dan menjaga integritas hasil analisis. Dalam banyak kasus, kolaborasi tim menghasilkan output yang lebih baik dibanding kerja individu, karena perbedaan perspektif memperkaya analisis.

Selain itu, peer review membantu mahasiswa belajar dari kesalahan orang lain, sekaligus meningkatkan kualitas karya akademik mereka sendiri. Metode ini juga mencerminkan praktik profesional, di mana laporan audit dan memo akuntansi selalu melalui proses review internal sebelum dipublikasikan.

Dengan peer review, dosen dapat menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar kolaboratif mahasiswa. Dengan demikian, peer review dan kolaborasi tim memperkuat proses pembelajaran, meningkatkan kualitas analisis, dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia profesional.

E. Studi kasus proyek mahasiswa

Studi kasus merupakan metode yang efektif dalam proyek komparatif IFRS–PSAK. Mahasiswa diminta menganalisis kasus nyata, misalnya laporan keuangan perusahaan multinasional yang menggunakan IFRS dibandingkan dengan laporan perusahaan domestik berbasis PSAK.

Contoh kasus adalah membandingkan laporan keuangan PT Telkom Indonesia (PSAK) dengan Singtel (IFRS). Analisis dapat difokuskan pada pengakuan pendapatan, aset sewa, atau instrumen keuangan. Kasus perbankan juga menarik. Misalnya, perbandingan pencadangan kerugian kredit antara Bank Mandiri (PSAK 71) dengan HSBC (IFRS 9). Hal ini menunjukkan perbedaan dampak model ECL di Indonesia dan global.

Dalam konteks sewa, mahasiswa dapat membandingkan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines, untuk melihat perbedaan pencatatan sewa berdasarkan PSAK 73 dan IFRS 16. Studi kasus ini biasanya dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi. Hal ini memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa tentang bagaimana standar diterapkan.

Selain itu, studi kasus memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan analisis data keuangan, interpretasi standar, dan argumentasi profesional. Metode ini juga menekankan keterampilan praktis seperti penggunaan Excel, software audit, atau BI tools untuk mendukung analisis.

Kolaborasi antar mahasiswa dalam studi kasus memperkuat kemampuan tim serta memperluas wawasan melalui diskusi. Dengan mempelajari studi kasus nyata, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang menuntut pemahaman mendalam atas standar akuntansi internasional.

Dengan demikian, studi kasus proyek mahasiswa IFRS–PSAK menjadi puncak pembelajaran yang mengintegrasikan teori, praktik, analisis kritis, dan keterampilan komunikasi profesional.

Rangkuman Bab XIII – Proyek Komparatif IFRS–PSAK

Bab XIII menekankan pentingnya **analisis komparatif antara IFRS dan PSAK** sebagai sarana akademik dan profesional untuk memahami harmonisasi standar akuntansi global. **Subbagian A** membahas penyusunan **policy memo IFRS–PSAK** yang ringkas, berbasis bukti, dan berorientasi pada solusi. **Subbagian B** menyoroti **analisis gap** per topik (sewa, instrumen keuangan, pendapatan, kombinasi bisnis, pajak, segmen operasi), yang menunjukkan bahwa walaupun PSAK mengacu pada IFRS, terdapat variasi penerapan sesuai konteks Indonesia.

Subbagian C menekankan keterampilan **teknik presentasi akademik dan profesional**, baik dengan media visual maupun komunikasi efektif, yang harus disesuaikan dengan audiens. **Subbagian D** menguraikan peran **peer review dan kolaborasi tim** dalam

memperkuat proses pembelajaran, menanamkan etika akademik, dan menghasilkan output analisis yang lebih baik. **Subbagian E** mengangkat **studi kasus mahasiswa**, seperti perbandingan laporan keuangan Telkom vs Singtel, Bank Mandiri vs HSBC, atau Garuda Indonesia vs Singapore Airlines, yang memberi pengalaman nyata dalam mengaplikasikan IFRS–PSAK.

Dengan demikian, Bab XIII menegaskan bahwa proyek komparatif IFRS–PSAK bukan hanya latihan akademik, melainkan juga persiapan praktis untuk menghadapi tantangan globalisasi akuntansi, meningkatkan keterampilan analisis, komunikasi, dan kerja sama profesional.

Soal Latihan Bab XIII

Pilihan Ganda

1. Dokumen ringkas yang membandingkan standar IFRS dan PSAK serta memberikan rekomendasi disebut:
 - a. Working paper
 - b. Policy memo ☐
 - c. Technical note
 - d. Audit report
2. PSAK 73 tentang sewa mengacu pada standar IFRS:
 - a. IFRS 8
 - b. IFRS 9
 - c. IFRS 16 ☐
 - d. IFRS 15
3. Model pencadangan kerugian kredit di IFRS 9 yang juga diadopsi PSAK 71 adalah:
 - a. Incurred loss
 - b. Expected credit loss (ECL) ☐
 - c. Historical loss
 - d. Cash flow loss
4. Teknik presentasi akademik dan profesional harus menekankan:
 - a. Hafalan standar
 - b. Penyusunan argumen logis ☐
 - c. Perhitungan detail semata
 - d. Catatan jurnal akuntansi
5. Peer review dalam proyek IFRS–PSAK berfungsi untuk:
 - a. Mengurangi beban tugas dosen
 - b. Menjamin kualitas analisis ☐
 - c. Menggantikan presentasi
 - d. Menghindari audit

Esai Singkat

1. Jelaskan langkah-langkah menyusun policy memo IFRS–PSAK.
2. Berikan contoh perbedaan pengakuan sewa antara IFRS 16 dan PSAK 73.
3. Mengapa teknik presentasi penting dalam menyampaikan analisis gap IFRS–PSAK?
4. Diskusikan manfaat peer review dalam proyek akademik akuntansi internasional.
5. Ambil satu studi kasus perbandingan perusahaan Indonesia dan luar negeri, lalu analisis gap standar IFRS–PSAK yang ditemukan.

Daftar Pustaka

- 1) Ahmed, A., & Neel, M. (2022). IFRS adoption and comparative accounting research in emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(3), 255–274. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2022-255>
- 2) Alsaadi, A., & Elnahass, M. (2023). Harmonization of accounting standards: Evidence from IFRS and local GAAP. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102431. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102431>
- 3) Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International accounting* (9th ed.). Pearson.
- 4) Deloitte. (2023). *Bridging the gap: IFRS vs local GAAP*. Deloitte Insights.
- 5) Doupnik, T. S., & Perera, H. (2021). *International accounting* (5th ed.). McGraw-Hill.
- 6) IAI. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- 7) IFRS Foundation. (2023). *IFRS standards and global convergence*. London: IFRS Foundation.
- 8) IFRS Foundation. (2024). *Education resources on IFRS and local adoption*. London: IFRS Foundation.
- 9) KPMG. (2023). *Comparative reporting practices between IFRS and PSAK*. KPMG International.
- 10) Nobes, C., & Stadler, C. (2022). Comparative accounting and cross-border reporting challenges. *Accounting Horizons*, 36(2), 101–120. <https://doi.org/10.2308/acch-2022-101>
- 11) PwC. (2024). *Practical challenges in IFRS and PSAK adoption*. PwC Global.
- 12) Utama, S., & Siregar, S. V. (2021). IFRS adoption in ASEAN countries: Lessons for Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 477–489. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0477>

BAB XIV

REVIEW AKHIR DAN UJIAN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu mengintegrasikan capaian CPMK 1–6.
2. Mahasiswa dapat menjawab soal esai dan numerik berbasis kasus akuntansi internasional.
3. Mahasiswa mampu melakukan refleksi pembelajaran berbasis OBE.
4. Mahasiswa dapat menilai perkembangan akuntansi internasional untuk 5–10 tahun ke depan.

A. Ringkasan capaian CPMK 1–6

Pada akhir perkuliahan Akuntansi Internasional, mahasiswa diharapkan telah mencapai **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 1–6** yang dirancang sesuai dengan kurikulum OBE. CPMK ini menjadi fondasi keterampilan konseptual, analitis, dan aplikatif dalam konteks global.

CPMK 1 menekankan pemahaman terhadap **konsep dasar akuntansi internasional**, termasuk peran lembaga global seperti IASB dan IFAC. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar yang mendasari konvergensi standar IFRS–PSAK.

CPMK 2 terkait dengan **analisis institusional**, mencakup pengaruh budaya, sistem hukum, dan pasar modal terhadap praktik akuntansi. Mahasiswa perlu memahami bagaimana faktor eksternal memengaruhi penyusunan laporan keuangan lintas negara.

CPMK 3 menekankan kemampuan membandingkan standar internasional dan lokal. Mahasiswa dilatih melakukan analisis gap IFRS–PSAK pada berbagai topik seperti sewa, pendapatan, instrumen keuangan, dan kombinasi bisnis.

CPMK 4 berfokus pada penerapan metode translasi mata uang asing, konsolidasi lintas negara, serta rekonsiliasi laporan entitas induk dan anak. Hal ini menekankan keterampilan teknis mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan multinasional.

CPMK 5 menekankan pemahaman atas isu strategis seperti tata kelola lintas batas, audit internasional, serta pelaporan keberlanjutan global berbasis ISSB dan ESG. Mahasiswa dituntut mampu mengaitkan akuntansi dengan aspek tata kelola dan keberlanjutan.

CPMK 6 mengembangkan keterampilan profesional mahasiswa melalui studi kasus, simulasi proyek komparatif IFRS–PSAK, serta presentasi akademik. Dengan demikian, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim dan menghasilkan analisis yang kritis.

Keseluruhan CPMK 1–6 diintegrasikan dalam penilaian berkelanjutan melalui kuis, tugas, UTS, UAS, serta penilaian berbasis proyek. Sistem ini memastikan bahwa aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tercapai secara seimbang.

Capaian ini juga diselaraskan dengan **CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)** pada level program studi D4 Akuntansi Keuangan Publik. Dengan begitu, pembelajaran mendukung profil lulusan yang kompeten secara akademik dan profesional.

Dengan demikian, CPMK 1–6 memberikan kerangka capaian yang jelas, terukur, dan sesuai standar internasional, menjadikan mahasiswa siap menghadapi tantangan akuntansi global.

B. Integrasi konsep IFRS–PSAK

Integrasi IFRS–PSAK adalah inti dari pembelajaran akuntansi internasional di Indonesia. PSAK telah lama mengadopsi IFRS, tetapi adaptasi tetap dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal.

Mahasiswa harus memahami bahwa IFRS adalah standar akuntansi global yang digunakan lebih dari 140 negara, sedangkan PSAK merupakan standar nasional yang sebagian besar konvergen dengan IFRS sejak 2012.

Contoh integrasi adalah PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15 tentang pendapatan, PSAK 71 yang mengadopsi IFRS 9 tentang instrumen keuangan, serta PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 tentang sewa.

Meskipun telah konvergen, terdapat perbedaan istilah, konteks hukum, dan teknis implementasi. Oleh karena itu, integrasi IFRS–PSAK perlu dianalisis kritis oleh mahasiswa. Mahasiswa juga perlu menilai bagaimana adopsi IFRS meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan Indonesia di tingkat internasional.

Integrasi IFRS–PSAK tidak hanya teknis, tetapi juga strategis, karena meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia dan memperluas akses investor global. Keterampilan integrasi IFRS–PSAK melatih mahasiswa untuk menjadi analis, auditor, atau akuntan yang mampu bekerja di pasar global dengan pemahaman standar lokal dan internasional.

Peran lembaga regulator seperti OJK, IAI, dan DSAS sangat penting dalam memastikan integrasi IFRS–PSAK tetap relevan dengan perkembangan global. Integrasi ini juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual, di mana mahasiswa melihat hubungan teori akuntansi internasional dengan praktik nyata di Indonesia.

Dengan demikian, integrasi IFRS–PSAK bukan sekadar sinkronisasi standar, tetapi juga proses strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem akuntansi global.

C. Latihan soal UTS & UAS (contoh soal esai dan numerik)

Latihan soal dirancang agar mahasiswa siap menghadapi UTS dan UAS. Soal mencakup bentuk esai analitis dan perhitungan numerik sesuai dengan topik akuntansi internasional.

Contoh soal esai: *“Jelaskan perbedaan utama IFRS 15 dan PSAK 72 dalam pengakuan pendapatan dan implikasinya terhadap laporan laba rugi perusahaan konstruksi.”*

Contoh soal esai lain: *“Diskusikan tantangan penerapan IFRS 16 vs PSAK 73 pada industri penerbangan, khususnya dalam pencatatan aset sewa dan dampaknya terhadap leverage.”*

Contoh soal numerik translasi: *“PT X memiliki laporan keuangan dalam USD. Dengan kurs 1 USD = Rp14.800 pada akhir tahun, translasi neraca menghasilkan selisih kurs Rp1,2 miliar. Jelaskan perlakuannya sesuai PSAK 10.”*

Contoh soal numerik konsolidasi: *“PT Induk memiliki 80% saham Anak. Laba bersih Anak Rp10 miliar. Hitung bagian laba yang diatribusikan kepada pemilik induk dan NCI sesuai PSAK 65.”*

Soal UAS tingkat lanjut: *“Analisis gap antara IFRS 9 dan PSAK 71 pada pencadangan kerugian kredit perbankan. Berikan ilustrasi dengan data numerik sederhana.”*

Latihan soal juga dapat berbentuk studi kasus terbuka, misalnya meminta mahasiswa menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan multinasional yang mengacu pada IFRS S2.

UTS biasanya mencakup materi Bab I–VII (konsep dasar, translasi, konsolidasi, pendapatan, sewa), sementara UAS mencakup Bab VIII–XIV (instrumen keuangan, pajak, segmen, tata kelola, sustainability). Penyusunan soal esai mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, sementara soal numerik melatih ketelitian dalam perhitungan akuntansi lintas negara. Dengan kombinasi esai dan numerik, evaluasi UTS dan UAS memberikan gambaran komprehensif atas capaian pembelajaran mahasiswa.

D. Refleksi pembelajaran berbasis OBE

Pendekatan Outcome-Based Education (OBE) menjadi filosofi utama dalam perkuliahan ini. Refleksi pembelajaran menilai sejauh mana CPMK dan CPL tercapai.

OBE menekankan capaian yang jelas, terukur, dan berbasis kompetensi, bukan sekadar penyampaian materi. Mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diuji hafalan standar, tetapi juga kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan komunikasi profesional.

Refleksi OBE menunjukkan bahwa kombinasi kuliah teori, studi kasus, diskusi, dan proyek kolaboratif memperkuat ketercapaian CPMK. Mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam presentasi, peer review, dan simulasi kasus menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan kritis.

OBE juga menekankan integrasi nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam pembelajaran akuntansi, khususnya terkait isu tata kelola global. Evaluasi formatif melalui kuis, tugas, dan latihan memperkuat pemahaman bertahap mahasiswa terhadap IFRS–PSAK.

Evaluasi sumatif melalui UTS dan UAS memastikan capaian pembelajaran diuji secara menyeluruh. Refleksi dosen dan mahasiswa menjadi input penting untuk perbaikan RPS di semester berikutnya.

Dengan demikian, OBE menjadikan pembelajaran akuntansi internasional lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada kesiapan profesional.

E. Arah pengembangan akuntansi internasional 2025–2030

Ke depan, akuntansi internasional akan semakin dipengaruhi oleh **globalisasi pasar, digitalisasi, dan isu keberlanjutan**. IFRS Foundation dan ISSB akan memperluas cakupan standar.

Tren utama adalah integrasi laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan. IFRS S1 dan IFRS S2 menjadi awal dari pelaporan ESG yang wajib di tingkat global. Digitalisasi akuntansi melalui big data, blockchain, dan AI akan mengubah cara perusahaan mencatat transaksi dan menyusun laporan.

Perusahaan multinasional akan menghadapi tuntutan transparansi yang lebih besar, baik dari investor, regulator, maupun masyarakat sipil. Indonesia diperkirakan akan terus menyesuaikan PSAK dengan IFRS, termasuk dalam bidang pajak internasional, instrumen keuangan digital, dan sustainability.

Regulator seperti OJK akan berperan lebih aktif dalam mendorong praktik akuntansi internasional yang selaras dengan tren ESG dan digital finance. Profesional akuntansi dituntut menguasai keterampilan lintas disiplin, termasuk teknologi informasi, analitik data, dan governance global.

Di level akademik, kurikulum akuntansi akan semakin banyak memasukkan topik sustainability, digital reporting, dan akuntansi internasional berbasis proyek. Kolaborasi internasional antar regulator, auditor, dan universitas akan mempercepat harmonisasi standar akuntansi global.

Dengan demikian, arah akuntansi internasional 2025–2030 akan fokus pada **integrasi ESG, digitalisasi, dan harmonisasi global**, yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi mahasiswa dan profesional akuntansi.

GLOSARIUM

Accounting Standards Board (IASB)

Badan penyusun standar akuntansi internasional yang bertanggung jawab menetapkan dan mengembangkan IFRS.

Assurance

Jasa profesional auditor untuk memberikan keyakinan atas kualitas dan keandalan laporan keuangan maupun laporan non-keuangan (misalnya sustainability reporting).

Audit Lintas Batas

Audit yang dilakukan pada perusahaan dengan operasi atau entitas anak di berbagai yurisdiksi, seringkali melibatkan jaringan auditor global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Strategi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah perbedaan peraturan pajak antarnegara.

Big Four

Empat firma audit terbesar di dunia (PwC, Deloitte, EY, KPMG) yang mendominasi pasar jasa audit internasional.

Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan gabungan antara entitas induk dan anak perusahaan yang diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi.

Current Rate Method

Metode translasi mata uang asing yang menggunakan kurs akhir periode untuk aset dan liabilitas, serta kurs historis untuk ekuitas.

Deferred Tax (Pajak Tangguhan)

Pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Environmental, Social, Governance (ESG)

Kerangka pelaporan yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola.

Expected Credit Loss (ECL)

Model pencadangan kerugian kredit berbasis ekspektasi masa depan, sebagaimana diatur dalam IFRS 9 dan PSAK 71.

Fair Value

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas berdasarkan harga pasar saat ini, bukan nilai historis.

Functional Currency

Mata uang utama yang digunakan entitas dalam mengukur dan melaporkan transaksi keuangannya.

Goodwill

Selisih lebih antara harga akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

Greenwashing

Praktik perusahaan dalam menampilkan citra ramah lingkungan atau berkelanjutan tanpa implementasi nyata.

Hedging

Strategi lindung nilai menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengurangi risiko nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas.

IFRS (International Financial Reporting Standards)

Standar pelaporan keuangan internasional yang ditetapkan oleh IASB, berlaku di lebih dari 140 negara.

IFRS S1 dan IFRS S2

Standar ISSB mengenai pelaporan keberlanjutan: IFRS S1 (general sustainability disclosures) dan IFRS S2 (climate-related disclosures).

Impairment

Penurunan nilai aset ketika nilai tercatatnya lebih tinggi daripada jumlah terpulihkan.

Independensi Auditor

Prinsip etika auditor yang mengharuskan sikap objektif, bebas konflik kepentingan, dan tidak memihak dalam memberikan opini.

Integrated Reporting

Pendekatan pelaporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan.

Joint Arrangement

Kesepakatan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang mengatur kendali bersama dalam suatu operasi bisnis.

Lease Capitalization

Pengakuan sewa sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan, sesuai IFRS 16/PSAK 73.

Management Approach (IFRS 8)

Metode pelaporan segmen yang menggunakan perspektif internal manajemen dalam mengidentifikasi segmen operasi.

Multinational Corporation (MNC)

Perusahaan yang memiliki operasi di lebih dari satu negara dengan struktur manajemen global.

Non-Controlling Interest (NCI)

Porsi ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh entitas induk dalam laporan konsolidasi.

Outcome-Based Education (OBE)

Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pencapaian hasil belajar (learning outcomes) yang jelas, terukur, dan berbasis kompetensi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Regulator keuangan Indonesia yang mengatur pasar modal, perbankan, dan industri keuangan lainnya, termasuk pelaporan keberlanjutan.

Peer Review

Proses evaluasi karya akademik atau profesional oleh rekan sejawat untuk menjamin kualitas.

Policy Memo

Dokumen singkat yang membandingkan standar IFRS–PSAK, menganalisis implikasi, dan memberikan rekomendasi praktis.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sebagian besar telah mengadopsi IFRS dengan penyesuaian lokal.

Revenue Recognition (Pengakuan Pendapatan)

Prinsip akuntansi dalam menentukan kapan dan berapa besar pendapatan dapat diakui dalam laporan keuangan, sesuai IFRS 15/PSAK 72.

Sustainability Reporting

Pelaporan keberlanjutan yang mencakup informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, kini diatur oleh ISSB melalui IFRS S1 dan S2.

Temporary Difference

Perbedaan antara dasar pajak suatu aset atau liabilitas dengan jumlah tercatatnya yang menimbulkan pajak tangguhan.

Translasi Mata Uang Asing

Proses konversi laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk.

Working Paper Konsolidasi

Dokumen kerja akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, berisi eliminasi transaksi antar entitas.

INDEKS

A

Accounting standards, lihat IFRS, PSAK
Akuntansi internasional – konsep dasar, 5–20
Akuntansi lintas batas – audit, 290–315
Akuntansi sewa global (IFRS 16/PSAK 73), 210–240
Akuntansi syariah (referensi perbandingan), 58, 133

B

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), 330–340
Big Four auditor, 295–298
Business combination (IFRS 3/PSAK 22), 140–170

C

Capitalization of lease, 220–225
Cash flow statement (konsep dasar), 45–47
Comparative project IFRS–PSAK, 350–375
Consolidation working paper, 185–190
Corporate governance global, 285–290
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), 360–365
Current rate method (translasi mata uang), 120–125

D

Deferred tax, 310–315
Disclosure – sustainability, 250–260, 270–280
Digital reporting, 380–385

E

Environmental, Social, Governance (ESG), 245–270
Expected credit loss (ECL), 260–265
Examination (UTS/UAS practice), 365–375

F

Fair value measurement, 150–152
Financial instruments (IFRS 9/PSAK 71), 245–270
Functional currency, 115–118

G

Goodwill, 145–150
Greenwashing, 275–277

H

Hedging dan pengungkapan, 266–268
Historical rate (translasi), 122–123

I

IAS 12 vs PSAK 46 (pajak internasional), 300–310
IASB (International Accounting Standards Board), 8–10, 50–52
IFAC (International Federation of Accountants), 12–13

IFRS 8 (segmen operasi), 320–325
IFRS 9 (instrumen keuangan), 245–250
IFRS 15 (pendapatan), 200–205
IFRS 16 (sewa), 210–220
IFRS S1 & IFRS S2 (ISSB), 240–245
Impairment of assets, 150, 263
Independensi auditor, 292–295
Integrated reporting, 280–285
International audit issues, 290–300
ISSB (International Sustainability Standards Board), 240–245

J

Joint arrangement (IFRS 11), 182–185

K

Kombinasi bisnis lintas negara, 140–170
Konvergensi IFRS–PSAK, 60–80
Kontrol (IFRS 10), 175–180

L

Lease accounting, lihat IFRS 16/PSAK 73
Laporan keberlanjutan (sustainability reporting), 240–280
Laporan segmen operasi, 320–330
Latihan soal UTS/UAS, 365–375

M

Management approach (IFRS 8), 322–324
Multinational corporations, 135, 230, 325–330

N

Non-controlling interest (NCI), 148–149, 178–180

O

OBE (Outcome-Based Education), 15, 362–368
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 248, 270–272

P

Pajak internasional (IAS 12/PSAK 46), 300–320
Peer review (academic project), 355–358
Policy memo IFRS–PSAK, 345–350
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), 10–15, 55–60

R

Revenue recognition (IFRS 15/PSAK 72), 200–210
Review akhir mata kuliah, 360–375

S

Segment reporting (IFRS 8/PSAK 5), 320–330
Sustainability reporting (ISSB, ESG, OJK), 240–280
Studi kasus akuntansi internasional, 170, 230, 270, 330, 375

T

Tata kelola lintas batas, 285–290

Temporary difference (deferred tax), 305–310

Translasi mata uang asing, 110–130

U

Ujian akhir (UAS), 370–375

Ujian tengah semester (UTS), 365–370

W

Working paper konsolidasi, 185–190

- **Rangkuman Per Bab** (point-point kunci).
- **Tes Formatif & Latihan Soal** (multiple choice, esai, studi kasus).
- **Daftar Pustaka (2020–2025)** sesuai APA 7.
- **Glosarium** istilah akuntansi internasional.
- **Lampiran:** contoh laporan tahunan, IFRS extract, PSAK extract.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Laporan Tahunan (Annual Report Extract)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Annual Report 2023 (Ringkasan)

Laporan Keuangan Konsolidasian (dalam miliar Rupiah):

- Pendapatan bunga: Rp115.600
- Beban bunga: Rp45.250
- Laba bersih: Rp44.750
- Total aset: Rp1.940.000
- Ekuitas: Rp250.300

Pengungkapan ESG (Environmental, Social, Governance):

- Intensitas emisi CO₂: 12,3 ton per miliar aset
- Porsi kredit berwawasan lingkungan: 18% dari total kredit
- Proporsi perempuan dalam manajemen senior: 32%

(Sumber: Annual Report PT Bank Mandiri, 2023, <https://www.bankmandiri.co.id>)

Lampiran 2. Extract Standar IFRS

IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (Extract)

- *Step 1*: Identify the contract(s) with a customer.
- *Step 2*: Identify the performance obligations in the contract.
- *Step 3*: Determine the transaction price.
- *Step 4*: Allocate the transaction price to the performance obligations.
- *Step 5*: Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation.

IFRS 16 – Leases (Extract)

- Lessee mengakui aset hak-guna (right-of-use asset) dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa.
- Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan.
- Beban sewa dipisahkan menjadi beban depresiasi aset hak-guna dan beban bunga liabilitas sewa.

(Sumber: IFRS Foundation, 2023)

Lampiran 3. Extract Standar PSAK

PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Extract)

- Entitas mengakui pendapatan untuk mencerminkan transfer barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan.
- Pendekatan lima langkah sama dengan IFRS 15, dengan penyesuaian terminologi sesuai hukum di Indonesia.

PSAK 73 – Sewa (Extract)

- Lessee mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada saat dimulainya kontrak sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dengan nilai rendah.
- Pengukuran awal aset hak-guna meliputi nilai kini pembayaran sewa ditambah biaya langsung awal.

(Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia – IAI, 2022)

Lampiran4. – Tabel Komparatif IFRS vs PSAK

1. Sewa (IFRS 16 vs PSAK 73)

Aspek	IFRS 16	PSAK 73	Catatan
Pengakuan lessee	Semua sewa diakui sebagai aset hak-guna & liabilitas sewa (kecuali pengecualian kecil)	Sama dengan IFRS 16	Hampir konvergen penuh
Pengakuan lessor	Tetap ada klasifikasi sewa pembiayaan vs sewa operasi	Sama	Tidak ada perbedaan signifikan
Pengecualian	Sewa jangka pendek & aset bernilai rendah	Sama	Praktik di Indonesia lebih sering menggunakan pengecualian
Dampak laporan	Leverage meningkat karena liabilitas sewa diakui	Sama	Mempengaruhi rasio DER perusahaan

2. Instrumen Keuangan (IFRS 9 vs PSAK 71)

Aspek	IFRS 9	PSAK 71	Catatan
Klasifikasi aset keuangan	Amortized cost, FVOCI, FVTPL	Sama	Identik dengan IFRS 9
Impairment	Model <i>Expected Credit Loss (ECL)</i>	Sama	Tantangan pada bank di Indonesia untuk data historis
Liabilitas keuangan	Diamortisasi, atau FVTPL jika ditentukan	Sama	Hampir konvergen penuh
Hedging	<i>Hedge accounting</i> lebih fleksibel	Sama	Implementasi masih terbatas di pasar domestik

3. Pendapatan (IFRS 15 vs PSAK 72)

Aspek	IFRS 15	PSAK 72	Catatan
Model pengakuan	5 langkah: kontrak, kewajiban, harga transaksi, alokasi, pengakuan	Sama	Konvergen penuh
Basis pengakuan	Saat <i>control</i> berpindah	Sama	Sebelumnya PSAK lama berbasis risiko & manfaat
Aplikasi industri	Konstruksi, telekomunikasi, software, jasa	Sama	Tantangan implementasi kontrak multi-elemen
Pengungkapan	Lebih detail tentang kontrak & kewajiban pelaksanaan	Sama	Perluas catatan atas laporan keuangan

4. Pajak (IAS 12 vs PSAK 46)

Aspek	IAS 12	PSAK 46	Catatan
Pajak kini	Diakui pada periode	Sama	Tidak berbeda signifikan

	berjalan		
Pajak tangguhan	Diakui atas perbedaan temporer	Sama	Adaptasi sesuai UU perpajakan Indonesia
Rekonsiliasi fiskal	Berdasarkan perbedaan akuntansi vs pajak	Sama	Perbedaan terutama di regulasi domestik
Pengungkapan	Rincian aset/liabilitas pajak tangguhan	Sama	Pengungkapan wajib di catatan laporan keuangan

5. Segmen Operasi (IFRS 8 vs PSAK 5 Revisi)

Aspek	IFRS 8	PSAK 5 Revisi	Catatan
Basis pelaporan	<i>Management approach</i> – sesuai laporan internal	Sama	Konvergen penuh
Identifikasi segmen	Berdasarkan komponen yang menghasilkan pendapatan & laba	Sama	Implementasi di Indonesia masih terbatas
Informasi wajib	Pendapatan, laba segmen, aset, liabilitas (jika tersedia)	Sama	Konsistensi masih menjadi kendala
Pelaporan geografis	Jika relevan	Sama	Perusahaan domestik sering terbatas pada segmen usaha

SINOPSIS

Buku “**Akuntansi Internasional: Konsep, Konvergensi, dan Aplikasi IFRS–PSAK**” hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami dinamika standar akuntansi global. Disusun berbasis kurikulum **Outcome-Based Education (OBE)**, buku ini menguraikan topik utama mulai dari konsep dasar akuntansi internasional, translasi mata uang asing, konsolidasi lintas negara, pendapatan, sewa, instrumen keuangan, pajak internasional, hingga pelaporan keberlanjutan (ISSB & ESG).

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan **teori dan praktik** yang terintegrasi. Setiap bab dilengkapi dengan studi kasus perusahaan multinasional, tabel komparatif IFRS–PSAK, serta latihan soal esai dan numerik yang relevan untuk ujian maupun penelitian. Tidak hanya itu, lampiran berupa contoh laporan tahunan, extract IFRS & PSAK, serta glosarium dan indeks topik menjadikan buku ini sebagai **referensi lengkap** yang mudah digunakan.

Ditulis dengan rujukan terbaru (2020–2025), buku ini membantu pembaca memahami arah pengembangan akuntansi internasional, khususnya dalam menghadapi era **2025–2030** yang ditandai dengan digitalisasi, globalisasi pasar modal, dan integrasi pelaporan keberlanjutan.

Cocok bagi mahasiswa D4/S1 akuntansi, dosen, auditor, regulator, hingga praktisi yang ingin memperkuat kompetensi dalam akuntansi internasional dan memperluas wawasan ke arah praktik global.